

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**PENGARUH KO MANAJEMEN PENGELOLAAN PERAIRAN UMUM  
DARATAN TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DESA TELUK AUR KECAMATAN BUNUT HILIR  
KABUPATEN KAPUAS HULU**



**TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Manajemen**

**Disusun Oleh :**

**HARTI SUNTHARI**

**NIM. 018495933**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Pengaruh ko manajemen pengelolaan perairan umum daratan terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu

Harti Sunthari

hartisunthari1981@gmail.com

Universitas Terbuka

Kata Kunci: Ko-manajemen, Tingkat Kesejahteraan, Pengelolaan Perairan Umum Daratan

Penelitian ini dilakukan untuk mencari kejelasan tentang pengaruh ko manajemen pengelolaan perairan umum daratan terhadap kesejahteraan masyarakat di wilayah Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini diarahkan untuk melihat fenomena dan masalah sosial yang berhubungan dengan ko-manajemen sumberdaya perikanan, yakni proses, peranan pelaksanaan ko-manajemen sumberdaya di Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu serta seberapa besar strategi ko-manajemen perairan umum daratan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat.

Subjek penelitian adalah beberapa narasumber yang mengerti tentang pelaksanaan ko manajemen di Desa Teluk Aur yang terdiri dari Pegawai Dinas Perikanan, pegawai Kantor Kecamatan Bunut Hilir, serta masyarakat Desa Teluk Aur. Pengambilan data dilakukan dengan metode observasi, dan wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses ko-manajemen pengelolaan perairan umum daratan yang ada di Desa Teluk Aur berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan tersedianya sebagian sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat dan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses ko manajemen pengelolaan perairan umum daratan di Desa Teluk Aur bermula dari menurunnya persediaan ikan. Dari kerjasama yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat memberikan bukti nyata bahwa daerah yang dikelola atau diatur memiliki produktivitas perairan yang tinggi dan berimbas pada kesejahteraan masyarakat dalam sektor perikanan.

## ABSTRACT

Effect of co management of inland public waters of the Bay Village community  
welfare Aur subdistrict Bunut Downstream  
Kapas Hulu

Harti Sunthari

hartisunthari1981@gmail.com

The Open University

Keywords: Co-management, Welfare, Public Water Management Mainland

This study was conducted to seek clarity on the effect of co management of inland public waters of the level of welfare in the Bay Village area Aur Hilir Subdistrict Bunut Kapuas Hulu.

This study is a descriptive qualitative research . This research is directed to look at the phenomenon and social issues related to co - management of fishery resources, the process, the role of the implementation of co - management of resources at the District Bunut Aur Bay Village Lower Kapuas Hulu and how much co - management strategies inland public waters affect the level of welfare society.

Subjects were several speakers who know about the implementation of management ko Aur Bay Village consisting of Fishery Bureau staff, employees Bunut Hilir District Office, as well as the Bay Village community Aur. Data collection was performed by the method of observation, and interviews.

The results showed that the co - management of inland public waters in the village of Aur Gulf succeeded in improving the welfare of the community by providing most of the necessary infrastructure of society and the increasing standard of living.

In conclusion, this study concludes that the process of co management of inland public waters in the Bay Village Aur stems from declining fish stocks. Of cooperation between the government and the community provide clear evidence that the area is managed or distur have high marine productivity and impact on the welfare of the community in the fisheries sector

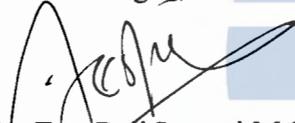
## LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Pengaruh Ko Manajemen Pengelolaan Perairan Umum Daratan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu

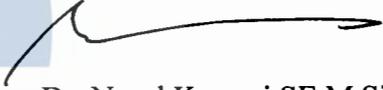
Penyusun TAPM : Harti Sunthari  
 NIM : 018495933  
 Program Studi : Magister Manajemen  
 Hari/Tanggal : Sabtu, 12 April 2014

Menyetujui :

Pembimbing II,

  
 Dr. Ety Puji Lestari, M.Si  
 NIP. 19670416 200212 2 001

Pembimbing I,

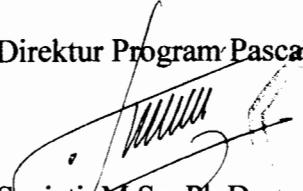
  
 Dr. Nurul Komari, SE.M.Si  
 NIP. 19600519 198703 2 002

Penguji Ahli

  
 Dr. Dewi Hanggraeni

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

  
 Suciati, M.Sc. Ph.D.  
 NIP. 19520213 198503 2 001

Ketua Bidang Ilmu Magister Manajemen

  
 Maya Maria, S.E., M.M.  
 NIP. 19720501 199903 2 003

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI : MAGISTER MANAJEMEN**

**PENGESAHAN**

Nama : Harti Sunthari  
NIM : 018495933  
Program Studi : Magister Manajemen  
Judul Tesis : Pengaruh Ko Manajemen Pengelolaan Perairan Umum Daratan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 April 2014  
W a k t u : 09.30 – 11.30 wib

dan telah dinyatakan **LULUS**

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Ketua Komisi Penguji

Tanda Tangan:

Suciati, M.Sc., Ph.D

Penguji Ahli

Dr. Dewi Hanggraeni

Pembimbing I

Dr. Nurul Komari, SE., M.Si

Pembimbing II

Dr. Ety Puji Lestari., M.Si

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya serta Sholawat teriring salam semoga selalu terlimpah ruwah kepada Beliau Baginda agung Rasullulah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman, serta doa restu beliau Ghoutsu hadzazzaman RA Amin. peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul: **Pengaruh ko manajemen pengelolaan perairan umum daratan terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.** Adapun TAPM ini disusun untuk diajukan guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Manajemen Universitas Terbuka.

Dalam penulisan ini, peneliti menyadari sepenuhnya telah banyak mendapat bantuan baik secara moril maupun materil langsung maupun tidak langsung. Untuk itu dengan kerendahan hati melalui halaman ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian TAMP ini, semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan hidayah dan ridhonya. pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Dr.Suciati, Ph.D,Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Indonesia di Jakarta.
2. Dr. Nurul Komari,SE.M.Si Selaku Dosen Pembimbing pertama
3. Dr. Ety Puji Lestari selaku Dosen Pembimbing Kedua

4. Para dosen, staf pengajar dan administrasi/sekretariat pada Program Magister Manajemen Universitas Terbuka Pontianak,
5. Kedua Orang Tua, Mertua, Suami dan anak-anak tercinta serta seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan motivasi
6. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu beserta jajarannya yang telah berkenan membantu memberikan kemudahan kepada peneliti untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan selama penelitian,
7. Kepala Desa Teluk Aur Beserta Perangkat Desa lainnya yang telah banyak memberikan informasi dan kemudahan selama peneliti melaksanakan penelitian di Desa Teluk Aur
8. Jajaran Pemerintahan Kecamatan Bunut Hilir yang telah banyak membantu dalam proses penelitian ini.

Dalam penyusunan tesis ini peneliti merasa banyak kekurangan dan kelemahannya, karena itu peneliti menerima kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan hasil penelitian ini. guna memperkaya khasanah keilmuan terutama yang berkaitan dengan tesis ini. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Pontianak, April 2014  
Peneliti

Harti Sunthari  
NIM. 018495933



## DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Penelitian Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Kegunaan Penelitian	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori	9
1. Definisi Ko Manajemen	9
2. Manfaat Ko Manajemen	14
3. Ciri-ciri Ko Manajemen	16
4. Ko Manajemen Perikanan	16
5. Manajemen Sumber Daya Manusia	22
6. Definisi Kesejahteraan	23
B. Hasil Penelitian Terdahulu	25
C. Kerangka Berfikir	28
D. Definisi Operasional	30

D. Definisi Operasional .....	30
1. Ko-Manejamen .....	30
2. Kesejahteraan Masyarakat .....	31
<b>BAB III.        METODE PENELITIAN</b>	
A. Desain Penelitian .....	32
B. Instrument Penelitian .....	34
1. Lokasi Penelitian .....	35
2. Subjek Penelitian .....	36
C. Prosedur Pengumpulan Data .....	38
1. Teknik Pengumpulan Data .....	38
a. Observasi .....	39
b. Wawancara .....	40
c. Dokumentasi .....	42
2. Alat Pengumpul Data .....	43
a. Pedoman Observasi .....	43
b. Panduan Wawancara.....	44
c. Alat Dokumentasi .....	46
D. Metode Analisis Data .....	47
1. Meringkas .....	47
2. Memaparkan .....	48
3. Menyimpulkan .....	48
E. Pengecekan keabsahan Data .....	49
1. Perpanjangan Pengamatan.....	49
2. Triagulasi .....	49
a. Triagulasi Sumber .....	50
b. Triagulasi Teknik .....	50
c. Triagulasi Waktu .....	50

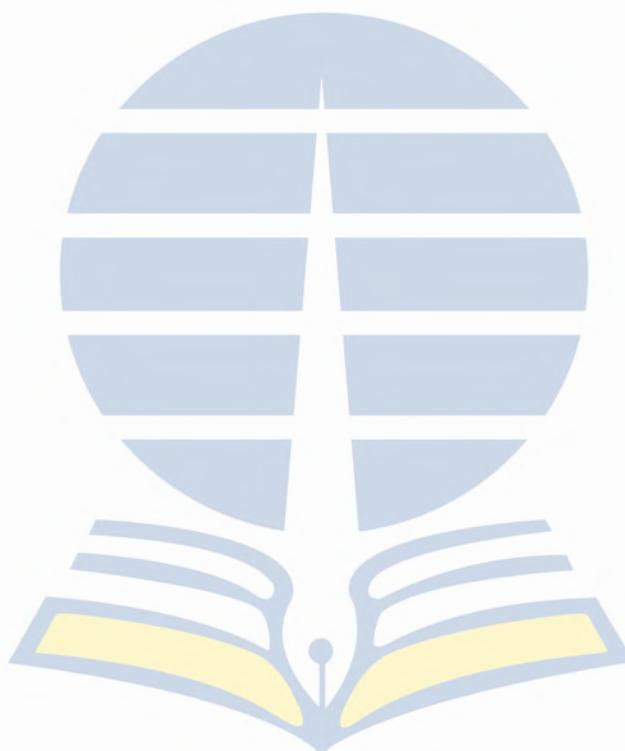
F. Tahap-tahap Penelitian .....	50
a. Tahap Persiapan .....	51
b. Tahap Pelaksanaan .....	51
c. Tahap Pelaporan .....	51

#### BAB IV. PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Objek Penelitian .....	52
1. Perairan Umum Daratan.....	52
2. Kondisi Geografis Desa Teluk Aur.....	53
3. Kondisi Geografis dan Sosial Ekonomi .....	56
B. Pembahasan .....	62
1. Pelaksanaan Ko-Manajemen Perairan Umum Daratan Desa Teluk Aur .....	69
a. Tahapan Pra-implementasi.....	75
b. Tahap Implementasi .....	78
c. Pasca Implementasi .....	85
2. Peranan Ko- Manajemen Sumber Daya Perikanan di Desa Teluk Aur .....	89
a. Pendapatan Nelayan .....	90
b. Kesadaran Masyarakat menjaga dan melestarikan Sumber daya ikan .....	90
c. Program Kemitraan dalam Pemanfaatan Perairan umum daratan	93
3. Faktor – faktor Pendukung Keberhasilan Ko-Manajemen di Desa Teluk Aur .....	95
a. Semangat dan Partisipasi Masyarakat .....	95
b. Organisasi Kemasyarakatan .....	98
c. Peningkatan Pendapatan Masyarakat .....	101

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan	.....	102
B. Saran	.....	103
DAFTAR PUSTAKA	.....	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN		



## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Indikator Keberhasilan Ko Manajemen.....	21
Tabel 1.2 Informan (Subjek) Penelitian.....	.38
Tabel 1.3 Jumlah Perairan Umum Daratan Desa Teluk Aur.....	55
Tabel 1.4 Data Umum Lahan Potensi desa Teluk Aur berdasarkan Sub Bidang.....	56
Tabel 1.5 Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Teluk Aur.....	57
Tabel 1.6 Data Perkembangan Hasil Penangkapan Ikan di Desa Teluk Aur.....	58
Tabel 1.7 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Teluk Aur.....	59
Tabel 1.8 Sarana dan Prasarana di Desa Teluk Aur.....	61
Tabel 1.9 Daftar Alokasi Dana dari Zona Kas Desa Danau Lindung Pengelang.....	71
Tabel 1.10 Pra-Iplementasi Ko-manajemen SDP.....	78
Tabel 1.11 Potensi SDP yang Dikelola.....	80
Tabel 1.12 Kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan di Desa Teluk Aur yang teridentifikasi.....	84
Tabel 1.13 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi antara Pemerintah dan Masyarakat.....	88

**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 1.1 Variasi Ko Manajemen Perikanan menurut peran pemerintah dan pelaku perikanan.....	18
Gambar 1.2 Kerangka Berfikir.....	30
Gambar 1.3 Lokasi Penelitian.....	36
Gambar 1.4 Zonasi Danau Lindung.....	73



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran I	Pedoman Wawancara .....110
Lampiran 2	Transkrip Hasil Wawancara.....111
Lampiran 3	SK Peraturan Danau lindung Pengelang dan Aur .....125
Lampiran 4	Pedoman Observasi .....130
Lampiran 5	Dokumentasi .....131



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada era otonomi saat ini daerah dituntut untuk mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mesti didasarkan pada kekayaan alam yang dimiliki, (Hamid, 2011). Salah satu sumber kekayaan alam adalah sektor perikanan yang dibangun menjadi suatu kegiatan ekonomi yang berkelanjutan karena didukung dengan potensi sumber daya ikan yang memiliki keanekaragaman sumber daya ikan yang ada di perairan umum daratan yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena merupakan sumber mata pencaharian masyarakat dan pemasukan bagi kas desa setempat.

Sebagian besar wilayah Indonesia khususnya Kabupaten Kapuas Hulu memanfaatkan sebagian kekayaan alamnya seperti perairan umum daratan sebagai mata pencaharian masyarakat dalam sektor perikanan yang merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan tarap pertumbuhan ekonomi, karena memiliki keanekaragaman fauna terutama jenis ikan dan dengan kekayaan alam tersebut selanjutnya bagaimana peranan pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan perairan daratan atau lebih dikenal dengan sungai dan danau sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat khususnya masyarakat nelayan. Pemanfaatan perairan umum daratan Kapuas Hulu dikembangkan sebagian masyarakat dengan berbagai kepentingan seperti kebutuhan dari segi ekonomi. Intensitas tekanan social ekonomi membawa masyarakat pada kebutuhan hidup sehari-hari

disebabkan oleh faktor-faktor yang kompleks. Masyarakat mengantungkan hidupnya pada pemanfaatan sumber daya yang ada.

Banyak perairan umum daratan di beberapa daerah mengalami kegagalan dalam pengelolaan sumber daya alam di sektor perikanan dikarenakan beberapa ulah manusia dalam pemanfaatannya seperti penubaan dan sebagainya. Hal ini mengakibatkan persediaan ikan di wilayah perairan tersebut mengalami penurunan berdasarkan permasalahan tersebut maka salah satu cara dalam mendukung keberhasilan pengelolaan perairan umum daratan adalah dengan ko Manajemen perikanan. Ko manajemen merupakan salah satu aspek yang berperan dalam pemanfaatan sumber daya diperairan umum daratan sehingga masyarakat diharapkan mampu mengembangkan sekaligus menjaga sumber daya yang ada salah satu cara untuk mengoptimalkan peranan dan kreativitas masyarakat untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam maupun meningkatkan kondisi sosial ekonomi adalah dengan ko Manajemen (Mustamin, 2003).

Ko-manajemen merupakan bentuk kegiatan pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya yang ada (Hamid,2011). Dalam hal ini masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab bersama-sama dalam pengelolaan sumber daya alam seperti perairan umum daratan yang berpotensi di daerah tersebut. Pengelolaan berbasis masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumber daya alam dimana masyarakat lokal terlibat secara aktif dalam proses pengelolaan sumber daya alamnya dengan mempertimbangkan aturan-aturan atau kearifan lokal yang telah di buat oleh masyarakat.

Kearifan lokal (tradisional) adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal Keraf, (2002).

Pendekatan pembangunan menurut kearifan lokal merupakan pendekatan yang harus dilakukan terhadap masyarakat terutama dalam pengelolaan sumber daya alam perairan daratan di wilayah Kapuas Hulu. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku (aktor) yang menentukan hidup mereka Wahyono, (2001).

Perkembangan perikanan yang berbasis pada kearifan masyarakat lokal dalam bentuk ikatan peraturan adat yang telah berhasil memberikan teladan bagi sistem pengelolaan ko manajemen yang baik. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan khususnya diperairan umum daratan menjadi suatu inspirasi dan teladan dari berbagai konsep pengelolaan dalam pelestariannya maupun pemanfaatannya. Salah satu desa di Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah menerapkan kearifan local yaitu Desa Teluk Aur. Kearifan lokal berkembang bermula dengan adanya kesadaran masyarakat menjaga serta melestarikan sumber daya alam dengan peraturan adat yang disepakati oleh dua etnis suku yang mendiami desa Teluk Aur. Kesepakatan peraturan adat

dalam memanfaatkan perairan umum daratan yang terdapat di desa Teluk Aur membawa masyarakat hidup kearah yang lebih baik yaitu dengan memanfaatkan perairan umum daratan disertai berlakunya peraturan adat.

Keberadaan kearifan lokal telah mampu mengelola perairan umum daratan menjadi suatu manajemen yang baik bagi inkam desa yang dahulunya mengalami krisis pada tingkat kesejahteraan dengan minimnya pendapatan kas desa. Dengan berlakunya peraturan adat tersebut masyarakat mengalami peningkatan kesejahteraan dengan bertambahnya inkam desa. Hal ini terwujud pada tercapainya pendapatan masyarakat setempat dalam bentuk meningkatnya pendapatan nelayan khususnya pada sektor perikanan.

Keberhasilan ini tidak lepas dari sistem ko manajemen yang dilaksanakan oleh instansi Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu terhadap masyarakat di desa Teluk Aur dimana hasil dari pengelolaan danau lindung tersebut mampu membangun sarana dan prasarana dalam bidang pendidikan yaitu pembangunan perumahan guru, sarana ibadah seperti gereja dan mesjid sarana penerangan seperti listrik desa, infrastruktur yaitu pembuatan jalan, serta bantuan perayaan adat suku setempat.

Keberhasilan ko-manajemen pengelolaan perairan umum daratan dapat dilihat dari berbagai aspek. Menurut Dahuri 1998 (Kumaat, 2007:8-9) : 1). tingkat pendapatan masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan, 2). Kesadaran dan tanggungjawab masyarakat meningkat terhadap dalam menjaga sumber daya alam, 3). Meningkatnya motivasi masyarakat dalam proses pengelolaan, 4). Meningkatnya jumlah pemanfaatan sumber daya oleh masyarakat, 5).

Komitmen pelaksanaan aturan lokal yang disetujui masyarakat, 6). Adanya program kemitraan dalam memanfaatkan sumber daya alam.

Bersumber dari pendapat tersebut, di Desa Teluk Aur diperoleh hal-hal sebagai berikut yaitu: meningkatnya pendapatan masyarakat yang di ikuti dengan kesadaran dalam menjaga sumber daya alam yang disebabkan oleh kebebasan pengelolaan kepada masyarakat sehingga mendorong mereka untuk mengeksplorasi dan menjaga sumber daya alam perikanan dan mencari terobosan terhadap jenis pemanfaatan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan tidak mengabaikan system kearifan lokal yang telah disepakati oleh masyarakat yang tidak lepas dari campur tangan dinas perikanan sebagai mitra kerjasama melaksanakan pengelolaan perairan daratan. Melihat aspek-aspek keberhasilan tersebut yang telah ditetapkan antara masyarakat dan pemerintah. Aspek-aspek tersebut meliputi kerjasama pengelolaan secara otonomi kepada masyarakat yang berdampak kepada kebebasan masyarakat untuk memanfaatkan danau dan penggalian sumber daya alam tersebut tidak lepas dari wujud kearifan lokal setempat seperti peraturan adat yang mengikat masyarakat untuk mengeksplorasi pengelolaan perairan umum daratannya. Hal ini berdampak pada keserasian antara pihak pemerintah dan masyarakat terhadap pemanfaatan perairan yang meliputi sungai dan danau di Desa Teluk Aur. Namun keberhasilan ini perlu di evaluasi dengan tujuan melihat sejauh mana pengelolaan perairan umum daratan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang di laksanakan.

Penelitian ini pada dasarnya merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, salah satunya Hamid (2011), "*Pelaksanaan Ko-Manajemen di*

*Wilayah Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir*” memperoleh hasil penelitian tentang perlunya campur tangan pemerintah dalam hal ini Dinas Perikanan setempat dalam rangka meningkatkan produktivitas perikanan di Desa Empangau. Berawal dari penelitian tersebut, peneliti ingin mengembangkan penelitian lanjutan yang menganalisis bagaimana pengaruh ko manajemen pengelolaan perairan umum daratan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir. Pengaruh ko manajemen terhadap kesejahteraan masyarakat yang meliputi program pengelolaan dan bagaimana peran masyarakat dalam mendukung program pengelolaan perairan umum daratan sehingga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Teluk Aur. Pengelolaan danau lindung di daerah ini dipandang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari sistem ko manajemen yang terlaksana antara dinas perikanan dan masyarakat. Sistem ko manajemen diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pembinaan terimplementasi dalam program yang dimiliki oleh Dinas Perikanan terkolaborasi dengan kearifan lokal yang ada di Desa Teluk Aur sehingga menghasilkan kesejahteraan masyarakat menjadi bahan tulisan yang menarik untuk diteliti. Oleh sebab itu peneliti tertarik meneliti pengaruh ko-manajemen di desa Teluk Aur. Terutama untuk mencari dan menggali informasi tentang pengaruh ko-manajemen di desa Teluk Aur terhadap kesejahteraan masyarakat.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Program apa saja yang dilakukan ko manajemen pengelolaan perairan umum daratan di wilayah Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu?
2. Bagaimana peran masyarakat dalam mendukung ko manajemen perairan umum daratan di wilayah Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu?
3. Apakah ko-manajemen pengelolaan perairan umum daratan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di wilayah Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu?

## C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana uraian pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mencari kejelasan tentang pengaruh ko manajemen pengelolaan perairan umum daratan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

Lebih khusus, penelitian bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang:

1. Menerangkan program yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu terhadap ko manajemen pengelolaan perairan umum daratan di wilayah Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Menganalisis peran masyarakat dalam mendukung ko manajemen perairan umum daratan di wilayah Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu
3. Menganalisis pengaruh ko manajemen pengelolaan perairan umum daratan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

#### **D. Kegunan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat,naik secara praktis maupun secara teoritis diantaranya sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Akademik**

Memberikan Sumbangan terhadap pemikiran ilmiah mengenai perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan strategi ko manajemen pengelolaan perairan umum daratan kedepannya serta menambah bahan kajian dalam pengembangan sistem ko manajemen perairan daratan serta cara memanfaatkan sumber daya alam yang bijaksana.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Defenisi Ko-Manajemen

Beberapa pendapat ahli mendefinisikan mengenai kolaborasi manajemen atau disingkat ko-manajemen sebagai bentuk kerjasama antara individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan yang telah disepakati oleh kelompok tersebut.

Thomson, *et al* (2007:3) "*Collaboration is a process in which autonomous or semiautonomous actors interact through formal and informal negotiation, jointly creating rules and structures governing their relationships and ways to act or decide on the issues that brought them together; it is a process involving shared norms and mutually beneficial interactions.*" Artinya: kolaborasi adalah proses dimana individu secara bebas untuk berinteraksi melalui negosiasi formal dan informal, bersama-sama menciptakan aturan dan struktur yang mengatur hubungan mereka dan cara untuk bertindak atau memutuskan sesuatu secara bersama-sama dengan memandang norma untuk mencapai keuntungan bersama. Thomson memandang kerjasama sebagai kolaborasi (collaboration).

Kalu (2008:9) Menyatakan "*The collaboration process essentially involves three design features: the protection of institutional identity, reciprocity or deferential reasoning involved in the 'give and take' necessary to sustain the process, and negotiation in terms of the strategies and tactics employed by the players to advance one's interest or a specific point of view*" Artinya: Proses kolaborasi pada dasarnya melibatkan tiga aspek, yaitu: jaminan lembaga, interaksi/hubungan timbal balik dan, strategi yang digunakan oleh individu untuk memajukan lembaga/organisasi.

Dari kedua pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa kolaborasi menekankan pada proses interaksi antara individu untuk mencapai tujuan yang disepakati oleh organisasi.

Definisi manajemen menurut beberapa ahli seperti diantaranya, Barnawi dan Arifin (2012:14) memberikan pengertian bahwa manajemen adalah usaha yang sistematis dalam mengatur dan menggerakkan orang yang ada di dalam organisasi agar mereka bekerja sepenuh kesanggupan dan kemampuan yang dimilikinya Barnawi dan Arifin (2012:14), menyatakan manajemen berfungsi untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan orang lain, mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan.

Kedua pendapat di atas menjelaskan bahwa manajemen sebagai upaya untuk menggerakkan orang-orang dalam kelompok yang dilakukan secara sistematis sehingga mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Selanjutnya, Barnawi dan Arifin (2012:14) mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Antara kolaborasi dan manajemen jika dikaitkan dengan manfaat dan keberadaannya sama-sama menekankan pada proses atau cara serta strategi yang berkaitan dengan bagaimana upaya untuk memajukan organisasi yang didalamnya tercantum tujuan dari organisasi tersebut. Ko-manajemen menekankan pada proses kerja pengelolaan sumber daya baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sarana yang disertai dengan adanya pengawasan dari sumber daya tersebut agar penggunaannya tepat

guna sehingga berjalan sesuai dengan aturan yang telah disepakati untuk mencapai tujuan.

Ko-manajemen atau kolaborasi manajemen merupakan salah satu bentuk dari pengelolaan sumberdaya dan lingkungan. Ko-manajemen dapat didefinisikan sebagai pembagian atau pendistribusian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat local dalam mengelola sumberdaya alam dan lingkungan (Hidayat, 2009). Menurut definisi yang disampaikan oleh Borrini-Feyabarend, *et al.* dalam Adrianto (2007), Ko-manajemen adalah sebuah situasi di mana lebih dari satu pihak (*stakeholders*) bernegosiasi, mendefinisikan dan menjamin pembagian peran dalam pengelolaan dan tanggung jawab di antara mereka terhadap sebuah area atau sistem sumberdaya. *Stakeholders* atau sering disebut dengan istilah "Pemangku kepentingan" dalam ko-manajemen didefinisikan sebagai individu, kelompok maupun organisasi yang tertarik, terlibat atau dipengaruhi dan mempengaruhi, berkepentingan secara langsung maupun tidak, dalam pengelolaan sumberdaya perikanan. Dalam kerangka ko-manajemen, keseimbangan representatif dan jumlah stakeholders menjadi unsur penting bagi suksesnya ko-manajemen (Pomeroy and Rivera-Guieb, 2006).

Menurut Borrini-Feyerabend (2000), manajemen kolaborasi merupakan sebuah kesepakatan antara dua atau lebih pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk membagi informasi, peran, fungsi dan tanggung jawab dalam suatu hubungan dan mekanisme kemitraan yang disetujui bersama.

Manajemen kolaborasi diharapkan dapat menciptakan sebuah tata kelola mandiri yang akan menciptakan keuntungan bagi seluruh stakeholder. Ciri khas dari kolaborasi adalah adanya proses saling belajar, terutama berbagi informasi yang akan membantu para pemangku kepentingan untuk menciptakan rencana-rencana kegiatan yang adaptif.

Dikaitkan dengan pengelolaan sumber daya alam, maka tujuan ko-manajemen adalah upaya untuk melakukan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dengan tepat, lebih efisien serta lebih adil dan merata. Selain itu ko-manajemen lahir disebabkan dua hal, pertama adalah karena adanya kemauan serta inisiatif pemerintah dan masyarakat, yang kedua, adalah adanya sensitivitas dan kesadaran pemerintah dan masyarakat terhadap perkembangan suatu keadaan dan situasi. Secara lebih khusus tujuan ko-manajemen adalah: (1) Ko-manajemen merupakan jalan menuju arah terwujudnya pembangunan berbasis masyarakat, (2) Ko-manajemen merupakan cara untuk mewujudkan proses pengambilan keputusan secara desentralisasi sehingga dapat memberikan hasil yang lebih efektif dan (3) Ko-manajemen adalah mekanisme untuk mencapai visi dan tujuan masyarakat dalam mengelola sumberdaya dan lingkungan serta mengurangi konflik melalui proses demokrasi partisipatif (Mustamin, 2009)

Donda (2005: 24) menyatakan “co-management is a partnership and the sharing of power and responsibility between the government and the resource users. This system takes the bottom-up approach and has two core elements: authority to execute and participatory decision making. Authority to execute is the granting of authority by the government to the user community organizations to implement management functions alongside the government. Participatory decision making is the enabling of the resource users to participate in the resource management decision making process with the government”. Ko-Manajemen adalah sebuah bentuk kemitraan dan pembagian kekuasaan dan tanggung jawab antara pemerintah dan pengguna sumber daya. Sistem ini menggunakan pendekatan bawah-atas (bottom-up) dan memiliki dua elemen inti yaitu kewenangan untuk mengeksekusi dan pengambilan keputusan partisipatif. Kewenangan untuk mengeksekusi adalah pemberian kewenangan oleh pemerintah kepada organisasi masyarakat pengguna untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen bersama-sama dengan pemerintah. Pengambilan keputusan partisipatif adalah memungkinkan pengguna sumber daya untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya bersama dengan pemerintah.

Ian et al., (2004: 15) menyatakan bahwa “An essential element in co-management is continuous shared responsibility and decision-making between government, fishers and other stakeholders. Co-management is one possible mechanism that could ensure that the human element is accounted for. Inclusion of all stakeholders in co-management systems ensures that decisions better reflect local, social, economic and environmental conditions”.

Sebuah element penting dalam ko-manajemen adalah pembagian tanggung jawab dan pengambilan keputusan secara bersama sama dan terus menerus antara pemerintah, nelayan dan pemangku kepentingan lainnya. Ko-Manajemen adalah salah satu mekanisme yang memungkinkan dan dapat meyakinkan semua element yang terlibat didalamnya. Termasuk semua pihak yang terlibat dalam sistem ko-manajemen yakin bahwa keputusan yang diambil lebih baik dalam merefleksikan kondisi lokal, sosial, ekonomi dan lingkungan.

Moebyarto (1999:23), mengemukakan ciri-ciri pendekatan pengelolaan sumberdaya lokal yang berbasis masyarakat, yang meliputi: (1) Keputusan dan inisiatip untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dibuat di tingkat lokal, oleh masyarakat yang memiliki identitas yang diakui

peranannya sebagai partisipan dalam proses pengambilan keputusan. (2) Fokus utama pengelolaan sumberdaya lokal adalah memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam mengarahkan asset-asset yang ada dalam masyarakat setempat, untuk memenuhi kebutuhannya. (3) Toleransi yang besar terhadap adanya variasi. Oleh karena itu mengakui makna pilihan individual, dan mengakui proses pengambilan keputusan yang desentralistis. (4) Budaya kelembagaannya ditandai oleh adanya organisasi-organisasi yang otonom dan mandiri, yang saling berinteraksi memberikan umpan balik pelaksanaan untuk mengoreksi diri pada setiap jenjang organisasi. (5) Adanya jaringan koalisi dan komunikasi antara pelaku dan organisasi lokal yang otonom dan mandiri, mencakup kelompok penerima manfaat, pemerintah lokal, bank lokal dan sebagainya yang menjadi dasar bagi semua kegiatan yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan dan penguasaan masyarakat atas berbagai sumber yang ada, serta kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya setempat

## 2. Manfaat Ko-manajemen

Armitage, Berkes, and Doubleday (2007 : 3) menyatakan bahwa dalam penerapan Ko-Manajemen diperoleh manfaat sebagai berikut :

### Benefits of co-management

Benefits can be considered through processes and goals such as (1) comanagement for community-based economic and social development, (2) co-management to decentralize resource management decisions, and (3) co-management as a mechanism for reducing conflict through participatory democracy.

Co-management may enhance the functions of (1) data gathering, (2) logistical decisions such as who can harvest and when, (3) allocation decisions, (4) protection of resources from environmental damage, (5) enforcement of regulations, (6) enhancement of long-term planning, and (7) more inclusive decision making.

#### Manfaat dari co-management

Manfaat dapat dipertimbangkan melalui proses dan tujuan seperti (1) pengelolaan bersama untuk pembangunan ekonomi dan sosial berbasis masyarakat, (2) co-management untuk mendesentralisasikan keputusan manajemen sumber daya, dan (3) co-manajemen sebagai mekanisme untuk mengurangi konflik melalui demokrasi partisipatoris.

Co-manajemen dapat meningkatkan fungsi (1) pengumpulan data, (2) keputusan logistik seperti yang bisa panen dan kapan, (3) alokasi keputusan, (4) perlindungan sumber daya dari kerusakan lingkungan, (5) penegakan peraturan, (6) peningkatan perencanaan jangka panjang, dan (7) pengambilan keputusan yang lebih inklusif.

Manfaat adanya ko manajemen menurut Wiyanto dalam Wijanarko (2006: 28) akan terwujud bila selaras dengan proses dan tujuannya, yaitu:

- a. Untuk pengembangan ekonomi dan sosial yang bertumpu pada prakarsa dan kemampuan masyarakat.
- b. Untuk mengalihkan kewenangan dalam menetapkan keputusan pengelolaan sumber daya/ruang terbuka hijau.
- c. Sebagai cara untuk mengurangi terjadinya perselisihan melalui keikutsertaan seluruh pihak yang terlibat secara demokratis.

Pemanfaat sumber daya menerima manfaat dengan ikut serta dalam menetapkan keputusan dalam pengelolaan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka, sedangkan pemerintah menerima manfaat dari berkurangnya kewenangan. Pemerintah juga akan menetapkan hak dan kewenangan atas hukum yang setara dan mengalihkan sebagian kewenangannya.

### 3. Ciri-ciri Ko-manajemen

Menurut Wiyanto dalam Wijanarko (2006: 28) bahwa ciri-ciri dari ko manajemen adalah:

- a. Sebagai jalan tengah antara pengelolaan tanaman pantai secara terpusat sepenuhnya oleh pemerintah dengan tujuan efisiensi dan pemerataan serta pengelolaan sepenuhnya oleh masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengelola dan mengatur diri sendiri dan ikut serta secara aktif.
- b. Sebagai proses pengelolaan sumber daya, dengan melakukan penyesuaian/perubahan dari waktu ke waktu, yang mencakup segi pemberdayaan masyarakat, pengalihan kewenangan, pembagian kekuasaan dan kesetaraan (demokratisasi).
- c. Sebagai strategi pengelolaan yang luwes, yang merupakan wahana untuk ikut serta, membuat aturan, mengatasi perselisihan, membagi kewenangan, kepemimpinan, dialog, membuat keputusan, menambah dan membagi pengetahuan, belajar serta pembinaan diantara para pemanfaat sumber daya pemangku kepentingan dan pemerintah.

### 4. Ko-manajemen Perikanan

Pengelolaan perikanan di wilayah perairan Indonesia tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang berlaku baik berbentuk undang-undang maupun peraturan pemerintah dan keputusan menteri, dan juga peraturan-peraturan yang bersifat internasional. UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Pasal 1 menyatakan bahwa pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi,

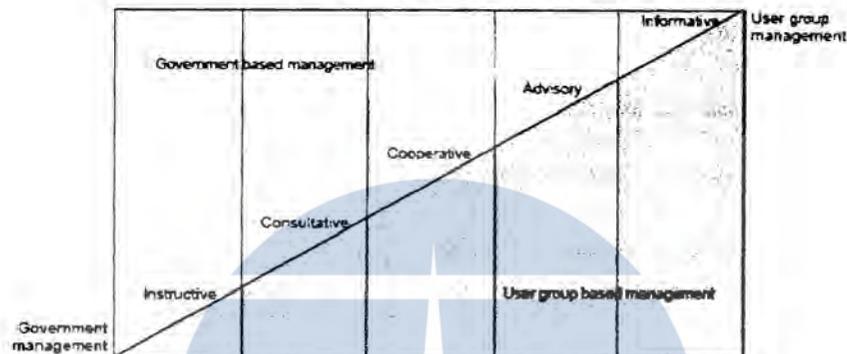
analisis, perencanaan, perencanaan, konsultasi, pembuat keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati. Pada pasal 2 dinyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.

Tujuan pengelolaan perikanan tercantum pada pasal 3, yaitu (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil, (2) meningkatkan penerimaan dan devisa Negara, (3) mendorong perluasan dan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (5) mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan, (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industry pengelolaan ikan, (8) mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal, serta (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Untuk melihat apakah ko-manajemen pengelolaan sumberdaya dapat dikatakan berhasil atau gagal, tentunya harus ada indikator yang dapat diukur sesuai dengan tujuan dan proses pelaksanaan ko-manajemen tahap demi tahap. Indikator ini harus ditetapkan bersama antara pemerintah

dan masyarakat sebagai pemegang kepentingan dalam ko-manajemen sebelum pelaksanaan ko-manajemen tersebut dimulai.

Gambar 1.1.  
Variasi Ko-manajemen Perikanan menurut Peran  
Pemerintah & Pelaku Perikanan



Sumber : Pomeroy dan Guieb (2006)

Menurut Pomeroy dan Guieb (2006), rangkaian proses ko-manajemen dapat dibagi dalam tiga fase, yakni : pra implementasi, implementasi, dan pasca implementasi. Untuk lebih rincinya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pra implementasi, dalam tahap pra-implementasi ko-manajemen perikanan terdapat dua tipe permulaan yaitu permulaan internal di mana lebih banyak inisiasi ko-manajemen perikanan berasal dari dalam komunitas dan stakeholders perikanan; dan permulaan eksternal di mana inisiasi berasal dari luar komunitas dan stakeholders perikanan. Pada Tipe permulaan memiliki potensi keberlanjutan yang tinggi mengingat komunitas dan stakeholders perikanan memiliki perhatiannya sendiri terhadap krisis sumberdaya, memiliki insentif untuk melakukan aksi ko-manajemen perikanan, dan memimpin dalam

proses menemukan solusi. Sedangkan pada tipe Eksternal biasanya dipicu oleh misalnya problem destruksi sumberdaya perikanan yang kemudian oleh LSM, universitas atau pemerintah perlu diinisiasi ko-manajemen perikanan. Atau dalam kasus penetapan sebuah kawasan laut menjadi kawasan perlindungan, maka diperlukan upaya eksternal untuk menginisiasi ko-manajemen perikanan dalam konteks konservasi sumberdaya perikanan

2. Implementasi, memiliki empat komponen utama : 1) pengelolaan sumberdaya, 2) pengembangan masyarakat dan ekonomi, 3) pengembangan kapasitas, dan 4) dukungan kelembagaan .
3. Pasca implementasi, terdiri dari kegiatan pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat serta pemegang kepentingan lainnya.

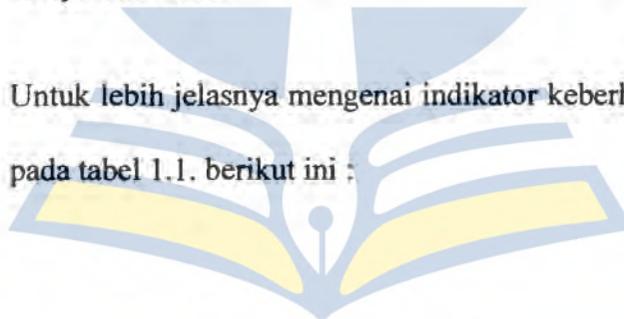
Oleh karena itu Dahuri dalam Nikijuluw (2002:198) menjelaskan ada tujuh indikator dapat diukur untuk mengetahui keberhasilan ko-manajemen seperti pada uraian dibawah ini:

1. *Tingkat pendapatan.* kriteria tingkat pendapatan ini dapat dilihat dari adanya peningkatan pendapatan lokal. Cara mengukurnya adalah dengan membandingkan pendapatan sebelum dan sesudah diterapkan ko-manajemen. Tingkat inflasi harus diperhitungkan, dengan melihat kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer dan sekunder.
2. *Tingkat pendidikan formal dan informal.* Yaitu kriteria peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan formal dan informal. Cara mengukurnya adalah dengan membandingkan jumlah relatif lulusan masyarakat lokal yang telah mengikuti pendidikan formal mulai tingkat SD sampai Perguruan tinggi, maupun pendidikan informal seperti pesantren dan sebagainya.
3. *Kesadaran masyarakat.* Yaitu meningkatnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam menjaga dan memelihara

sumberdaya alam. Indikator ini dapat diamati melalui realitas semakin berkurangnya kegiatan yang dapat merusak lingkungan, dan sebaliknya semakin banyak kegiatan yang menunjang kelestarian sumberdaya alam.

4. *Motivasi masyarakat*. Yaitu meningkatnya motivasi masyarakat dalam tahapan dan proses pengelolaan sumberdaya perikanan, dengan mengamati apakah semakin banyak usulan dan keinginan masyarakat yang disampaikan dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan ko-manajemen dan semakin meningkatnya peranan masyarakat dalam proses-proses pengelolaan sumberdaya alam setelah diterapkan ko-manajemen.
5. *Kreativitas dan kemandirian*. Yaitu kriteria meningkatnya bentuk dan variasi pemanfaatan sumberdaya alam yang lestari oleh masyarakat, dengan melihat apakah ada peningkatan jumlah dan variasi pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan masyarakat setelah diterapkannya ko-manajemen.
6. *Pengakuan hak*. Yaitu diakuiinya hukum tradisional atau masyarakat lokal dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam, dengan melihat peningkatan jumlah dan intensitas pelaksanaan aturan lokal dan tradisional.
7. *Program kemitraan*. Yaitu terbentuknya program kemitraan dalam pemanfaatan sumberdaya alam dengan melihat efisiensi dan intensitas program kemitraan dalam menunjang kegiatan masyarakat lokal.

Untuk lebih jelasnya mengenai indikator keberhasilan dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut ini :



Tabel 1.1.  
Indikator keberhasilan ko-manajemen

KRITERIA	INDIKATOR	CARA MENGUKUR
Tingkat pendapatan	Peningkatan relative pendapatan masyarakat lokal	Secara kualitatif membandingkan pendapatan sebelum dan sesudah diterapkannya ko-manajemen.
Pendidikan formal dan informal	Peningkatan jumlah masyarakat yang mengikuti pendidikan formal dan informal	Perbandingan jumlah relative lulusan masyarakat lokal dari pendidikan formal dan informal
Kesadaran masyarakat	Meningkatnya kesadaran & tanggung jawab masyarakat dalam menjaga & memelihara SDA	Semakin berkurangnya kegiatan yang merusak dan semakin banyak kegiatan yang menunjang kelestarian SDA
Motivasi	Meningkatnya motivasi masyarakat dalam tahapan dan proses pengelolaan	Semakin banyak usulan dan keinginan masyarakat yang disampaikan dalam penyusunan perencanaan & pelaksanaan manajemen & semakin meningkatnya peranan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam
Kreativitas & kemandirian	meningkatnya bentuk dan variasi pemanfaatan sumberdaya alam yang lestari oleh masyarakat	Jumlah dan variasi pemanfaatan sumberdaya yang dilakukan masyarakat
Pengakuan hak	Diakuinya hukum tradisi-onal atau masyarakat lokal dalam pelaksanaan pengelolaan SDA	Jumlah dan intensitas pelaksanaan aturan lokal dan tradisional
Program kemitraan	Terbentuknya program kemitraan dalam pemanfaatan sumberdaya alam	Efisiensi dan intensitas program kemitraan dalam menunjang kegiatan masyarakat lokal

Sumber : Dahuri (1998)

## 5. Manajemen Sumber Daya Manusia

Stoner dalam Barnawi (2012:14) memandang manajemen sebagai perencanaan, organisasi, pengarahan dan pengawasan. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan peranan manusia dalam organisasi publik atau perusahaan. Fokus yang dipelajari manajemen sumber daya manusia mengkaji karakteristik dan seluk beluk tenaga kerja manusia.

Pengertian manajemen sumber daya manusia terdiri atas dua kalimat; manajemen dan sumber daya. Manajemen adalah *the art of getting things done through the effort of other people*. Sumber daya manusia atau personalia adalah tenaga kerja, buruh atau pegawai yang mengandung arti keseluruhan orang-orang yang bekerja pada suatu organisasi tertentu (Hasibuan, 2005). Sehingga manajemen personalia atau manajemen sumber daya manusia adalah manajemen terhadap tenaga kerja/pegawai, yaitu bagaimana mengatur pegawai dalam perusahaan atau pengaturan tenaga kerja dalam organisasi dan lembaga, dimana pengaturan ini dalam arti seluas-luasnya.

Menurut Sunyoto, (2012:1). Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting dalam suatu organisasi atau perusahaan, disamping faktor lain seperti aktiva dan modal. Oleh karena itu sumber daya manusia harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi, sebagai salah satu dalam perusahaan yang dikenal dengan manajemen sumber daya manusia.

Sinurat (2008) mengatakan bahwa sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya perusahaan yang memiliki kekuasaan untuk merencanakan dan mengendalikan sumber daya yang lain dalam organisasi. Sumber daya manusia adalah satu-satunya sumber daya yang memiliki kekuasaan untuk merencanakan dan mengendalikan kegiatannya sendiri.

## 6. Defenisi Kesejahteraan

Kesejahteraan memiliki arti yang luas dan relative, secara umum hidup sejahtera adalah hidup bahagia secara lahir dan batin, kebahagiaan lahir berarti terpenuhinya kebutuhan materi seperti sandang, pangan dan papan serta kebutuhan lainnya sebaliknya kebutuhan lahir dan batin meliputi kebutuhan rahani seperti ketentraman hidup, keindahan, pendidikan keagamaan dan sebagainya. (Hamid, 2011: 42 - 43).

Menurut Midley dalam Suud (2006: 5) menjelaskan bahwa: Suatu keadaan kesejahteraan secara sosial tersusun dari tiga unsur sebagai berikut itu adalah *pertama* setinggi apa masalah-masalah sosial dikendalikan, *kedua* setulus apa kebutuhan-kebutuhan dipenuhi dan *terakhir* setinggi apa kesempatan-kesempatan untuk maju tersedia tiga unsur ini berlaku bagi individu keluarga komunitas dan bahkan seluruh masyarakat. Masyarakat yang sejahtera mengandung arti bahwa setiap anggota masyarakat dapat memperoleh kebahagiaan, usaha untuk menyejahteraan masyarakat berarti usaha untuk menjadikan semua anggota masyarakat dapat hidup bahagia Dalam hal ini dapat diartikan bahwa peningkatan kesejahteraan sama dengan peningkatan pendapatan masyarakat.

Penciptaan alternatif ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan masyarakat yang artinya mengarah pada perbaikan mutu hidup dalam kehidupan masyarakat yang berarti adanya peningkatan tingkat kesejahteraan. Tingkat hidup/kesejahteraan dicerminkan oleh semakin banyak tersedianya kebutuhan fisik dibarengi dengan perbaikan mutu kehidupan yang meliputi mutu lingkungan fisik, pola konsumsi, rasa aman, tersedianya alternatif jenis pekerjaan yang dapat dimasuki (Syafriil 2002). Dua hal menurut Aryono (2004: 21), mengenai kesejahteraan adalah (1) kesejahteraan menurut adanya kekayaan meningkat yaitu mengukur kesejahteraan dengan ukuran fisik, (2) kesejahteraan tercapai bila ada distribusi dari pendapatan yang dirasa adil oleh masyarakat. Dalam hal ini dimaksudkan untuk strategi pada tingkat kesejahteraan.

Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan karena sejahtera adalah masyarakat yang merasa aman sentosa dan selamat tak kurang sesuatu apapun karena sejahtera adalah sesuatu yang bersifat subyektif dimana setiap orang mempunyai pedoman tujuan dan cara hidup yang berbeda-beda pula terhadap faktor-faktor yang menentukan tingkat kesejahteraan, Sarman (Mustamin, 2003).

## B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang menginspirasi penulisan tesis ini diantaranya hasil karya dari :

Sipahelut (2010) tesis dengan judul: “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara” Penelitian menggunakan metode survei dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir telah memicu meningkatnya ekonomi masyarakat pesisir sehingga dengan adanya program ini telah membawa perubahan baik pada tingkat sosial budaya, kelembagaan masyarakat yang ada di Kabupaten Halmahera Utara. Perubahan penting pada aspek sosial budaya adalah menghidupkan kembali nilai-nilai lokal yaitu nilai kejujuran, keterbukaan, dan gotong royong yang diwujudkan dalam bentuk kelompok masyarakat pemanfaat (KMP), kelompok usaha bersama (KUB) dan koperasi LEPP-M3. Pembentukan kelembagaan tersebut diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berorganisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian terhadap pengembangan usaha mereka dan pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan.

Joetidawati, *et al* (2005) artikel penelitian dengan judul: “Alternatif pengelolaan Perikanan Lemuru di Selat Bali (*The Alternative Management for The Bali Strait Sardine (Lemuru) Fishery*)”. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat dan pemerintah (responden) untuk mengetahui pendapat tentang kondisi perikanan lemuru, pendapat tentang

alternatif pengelolaan yang mereka inginkan, serta tingkat peran dalam pengelolaan perikanan lemuru. Penelitian menggunakan Analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dan pemerintah terhadap kondisi perikanan lemuru mengalami penurunan. Tingkat peran responden dalam bentuk konsultatif. Proses pengelolaan perikanan lemuru pada sel V (Matrik IE) yang berimplikasi kepada strategi bertahan dan terpelihara (*hold and maintain*) yang dilihat dari perspektif pemerintah sebagai alternatif defensif, sedang kuadran II (*Analisis SWOT*) yang menempatkan pada alternatif diversifikasi produk yang berarti alternatif yang mempertahankan produksi perikanan. Berdasarkan perhitungan AHP urutan prioritas kebijakan alternatif pengelolaan perikanan yang harus diambil pemerintah adalah penyempurnaan regulasi, penerapan MCS (*Monitoring, Control, Surveillance*), peningkatan ko-manajemen, pengalihan pola tangkap.

Hamid, (2011) menganalisis Pelaksanaan Ko-manajemen Sumberdaya Perikanan di Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu". Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana proses pelaksanaan Ko-manajemen Sumberdaya Perikanan di desa Empangau, peran ko-manajemen sumberdaya perikanan dalam meningkatkan produktivitas dan pelestarian sumberdaya perikanan di Desa Empangau, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan ko-manajemen sumberdaya perikanan di desa empangau. Penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan

kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pelaksanaan ko-manajemen sumberdaya perikanan, telah terjadi perubahan di masyarakat dari aspek tingkat pendapatan, pendidikan formal dan informal, kesadaran masyarakat, motivasi, kreativitas dan kemandirian, serta kemitraan setelah dilaksanakannya ko-manajemen sumberdaya perikanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi keberhasilan dalam pelaksanaan ko-manajemen sumberdaya perikanan di Desa Empangau.

Stanis (2005) Tesis yang berjudul: “Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur”. Sumberdaya pesisir dan laut dewasa ini mengalami degradasi sebagai akibat dari perilaku pemanfaatan yang tidak ramah lingkungan. Pemanfaatan cenderung bersifat destruktif dan merusak, serta tidak mempertimbangkan aspek konservasi dan keberlanjutan sumberdaya. Masyarakat memegang peranan penting, karena itu pengelolaan dengan berbasis pemberdayaan sumberdaya lokal. Tradisi dan hukum adat mempunyai kaitan dan bermanfaat terhadap upaya pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur

Pranoto (2003), tesis yang berjudul: “Dampak Penerapan Ko-manajemen Dalam Pengelolaan Sumberdaya Pesisir di Kabupaten Lombok Timur”. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan studi kasus yakni analisis terhadap kondisi faktual di lokasi studi tentang dampak dan tingkat keberhasilan Ko-manajemen. Pengumpulan data dilakukan melalui

observasi dan pengumpulan data sekunder. Analisa dampak dilakukan dengan menggunakan analisis statistik Multivariat yang didasarkan pada analisis komponen utama (PCA). Analisis keberhasilan dilakukan dengan menggunakan analisis Chi-kuadrat serta uji T berpasangan. Sedangkan penentuan arahan kebijakannya digunakan analisis SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan Ko-Manajemen dalam pengelolaan pesisir di Kabupaten Lombok Timur memberi dampak yang signifikan dengan tingkat keberhasilan yang berkelanjutan, dimana umur, penerimaan, pendapatan dan pendidikan merupakan komponen penentu dan mempengaruhi variabel dan keterkaitan variabel Ko-Manajemen.

### C. Kerangka Berpikir

Menurut Sekaran (1992) dalam Sugiyono (2009: 65). Mengemukakan bahwa, kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

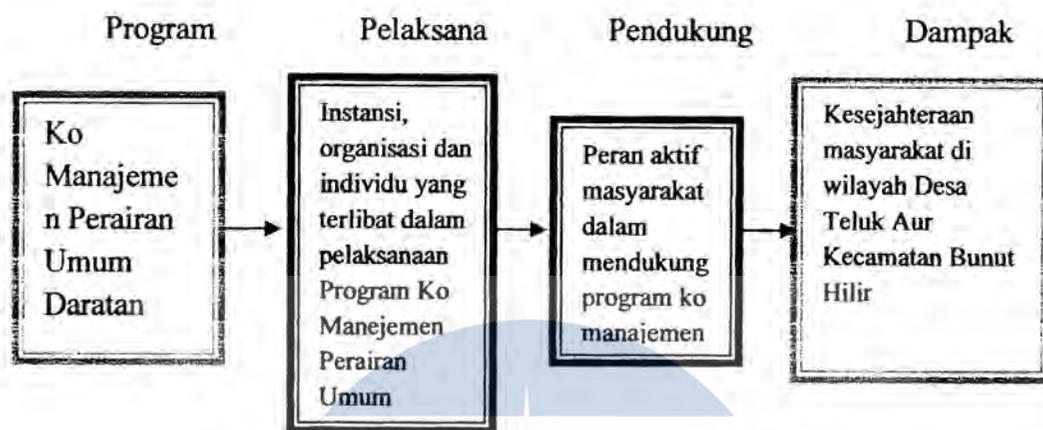
Penelitian ini mengangkat masalah yang terjadi di Desa Teluk Aur yakni pengelolaan ko-manajemen perairan umum daratan dengan indikasi awal adalah menurunnya hasil dari tangkapan ikan oleh nelayan atau masyarakat setempat sehingga mempengaruhi pendapatan yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat di desa Teluk Aur.

Berdasarkan masalah tersebut, terdapat aspek yang berhubungan dengan menurunnya hasil tangkapan yang diperoleh oleh nelayan setempat yakni cara kerja nelayan perairan daratan dalam melakukan pengelolaan

danau lindung yang menjadi sumber pendapatan nelayan sehingga masalah yang terjadi di desa Teluk Aur mendapatkan respon dari pemerintah Kabupaten dalam hal ini instansi yang terkait adalah Dinas Perikanan Kabupaten. Untuk itu Dinas Perikanan Kabupaten memberikan bantuan yang terpadu melalui program bantuan kepada masyarakat di Desa Teluk Aur yang bekerja sebagai nelayan. Dengan program ko-manajemen yang dilaksanakan melalui beberapa tahap meliputi: pra implementasi, implementasi, pasca implementasi yang melibatkan masyarakat dan tokoh setempat secara bertahap meningkatkan hasil pengelolaan ikan di desa tersebut. Pelaksanaan ko-manajemen kepada masyarakat oleh dinas perikanan kabupaten berupa pemberian biaya pengelolaan, sosialisasi mengenai tatacara pengelolaan perikanan, pemberian wewenang kepada masyarakat serta pembinaan yang dilakukan oleh dinas perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan perolehan ikan yang berimbas pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan setempat. Keberhasilan ko-manajemen yang dilakukan oleh dinas perikanan yang selama ini berjalan perlu mendapat evaluasi yang diangkat dalam penelitian ini.

Di dalam kerangka berpikir ini ingin digambarkan tentang pelaksanaan ko manajemen perairan umum daratan tentang sejauh mana pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk lebih jelasnya kerangka berfikir penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini:

Gambar 1.2  
Kerangka Berpikir



#### D. Definisi Operasional

Pengertian istilah atau definisi operasional yang dipakai dalam enelitian ini adalah:

##### 1. Ko-manajemen

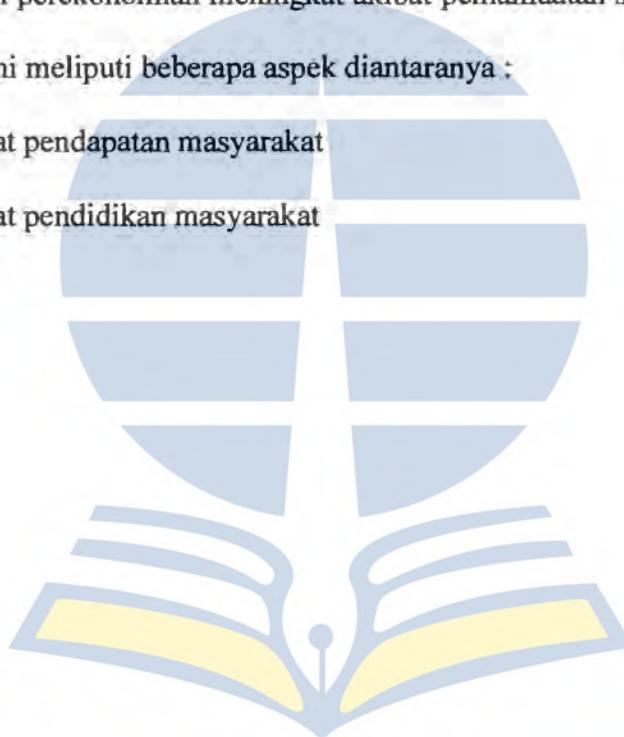
Merupakan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumberdaya perairan umum daratan dalam hal ini danau lindung sehingga berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar wilayah desa Teluk Aur terutama pelaksanaan program kemitraan dalam pemanfaatan perairan umum daratan yang meliputi kerjasama antara pemerintah dan masyarakat yang terdiri dari beberapa aspek diantaranya:

- Program kemitraan yang dilaksanakan antara pemerintah dan masyarakat
- Pengakuan hak atas pengelolaan perairan umum daratan

## 2. Kesejahteraan masyarakat

Merupakan dampak dari pengelolaan danau lindung yang berpengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat dari aspek perekonomian. Dalam hal ini dampak dari pengelolaan danau lindung yang dimanfaatkan oleh masyarakat desa Teluk Aur terhadap kerja masyarakat untuk mengelola perikanan darat sehingga kebutuhan hidup masyarakat dalam sisi perekonomian meningkat akibat pemanfaatan sumber daya danau lindung ini meliputi beberapa aspek diantaranya :

- Tingkat pendapatan masyarakat
- Tingkat pendidikan masyarakat



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Desain Penelitian

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian deskriptif karena bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu gejala/suatu masyarakat tertentu atau menggambarkan/melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan sebagaimana adanya. Komponen dan tata cara dalam penelitian ini terdiri dari rangkaian aturan tertentu yang saling berkaitan antara satu dan yang lainnya. Hal ini seperti diungkapkan oleh Nazir (2003:44) bahwa metode penelitian merupakan suatu kesatuan sistem dalam penelitian yang terdiri dari prosedur dan teknik yang perlu dilakukan dalam suatu penelitian.

Untuk mencapai maksud dan tujuan dari penelitian, maka pendekatan atau metode yang digunakan dan dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat fenomenologis dengan maksud untuk menemukan makna dari data dan ditelaah secara mendalam untuk menemukan jawaban dari permasalahan penelitian.

Menurut Sugiyono (2009:8), “penelitian kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti merupakan instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan triangulasi (gabungan), sifat analisis data dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi”.

Merujuk dari pendapat tersebut, maka penelitian ini dilakukan pada kondisi alamiah yaitu mendeskripsikan sesuatu yang terjadi dari tingkah laku, kata-kata atau aktivitas dan realita dari subjek penelitian berdasarkan kejadian yang sebenarnya sehingga dalam hal ini peneliti sebagai instrument kunci

dalam upaya menemukan jawaban penelitian yang bersumber dari obyek penelitian yang telah memberikan informasi dan menarik makna dari informasi yang disampaikan.

Pendapat Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2007: 3) yang menyatakan "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan namun tidak mengabaikan data-data yang bersifat kuantitatif seperti jumlah penduduk, tingkat kesejahteraan, jumlah pendapatan.

Menurut Maman (2002:3) penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial, dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Alasan pemilihan penelitian jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena data yang didapatkan dari hasil pengamatan, interaksi atau bergaul langsung dengan masyarakat di tempat penelitian. Dengan menggunakan metode kualitatif ini bisa didapatkan hasil penelitian yang lebih lengkap, lebih mendalam, dan bermakna sehingga tujuan penelitian dapat dicapai (Sugiyono, 2005: 180-181).

Penelitian ini diarahkan untuk melihat fenomena dan masalah sosial yang berhubungan dengan ko-manajemen perairan umum daratan, yakni pelaksanaan ko-manajemen perairan umum daratan di Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu serta bagaimana peran masyarakat dalam mendukung ko manajemen sehingga pada akhirnya

pelaksanaan ko manajemen benar-benar berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya mampu mengembangkan bentuk-bentuk pengelolaan yang baik terutama dalam budidaya dan pemanfaatan perairan daratan khususnya ikan air tawar.

## B. Instrumen Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6).

Menurut Nasution (1996:5) bahwa penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengamati orang-orang dalam hidupnya, berinteraksi dengan orang mereka, berusaha memahami bahasa mereka dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya. Lebih jauh, pendekatan kualitatif dirasa tepat mengacu pada pendapat Irawan (2007:6) bahwa ciri-ciri penelitian kualitatif antara lain: mengkonstruksi realitas makna sosial budaya; meneliti interaksi peristiwa dan proses; melibatkan variabel-variabel yang kompleks dan sulit diukur; memiliki keterkaitan erat dengan konteks; melibatkan peneliti secara penuh; memiliki latar belakang alamiah; menggunakan sampel purposif; menerapkan analisis induktif; mengutamakan "makna" di balik realitas; serta mengajukan pertanyaan "mengapa".

Berdasarkan beberapa konsep sebagaimana dikemukakan diatas, walaupun berangkat dari titik pandang yang berbeda-beda, namun pada prinsipnya mengarah pada tujuan yang sama, yaitu rumusannya menggambarkan

bahwa pendekatan kualitatif dapat menggambarkan data dalam bentuk deskriptif dan menekankan keterlibatan peneliti secara aktif atau terbatas dalam proses penelitian dan sedapat mungkin harus memahami dunia empirik dari masyarakat yang diteliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat diperlukan sebagai instrument kunci sekaligus pengumpul data, jadi dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang.

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2009:60) “Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama alasannya ialah bahwa,segala sesuatu masih bisa dikembangkan sepanjang penelitian. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan hanya tidak jelas itu hanya peneliti itu sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.”

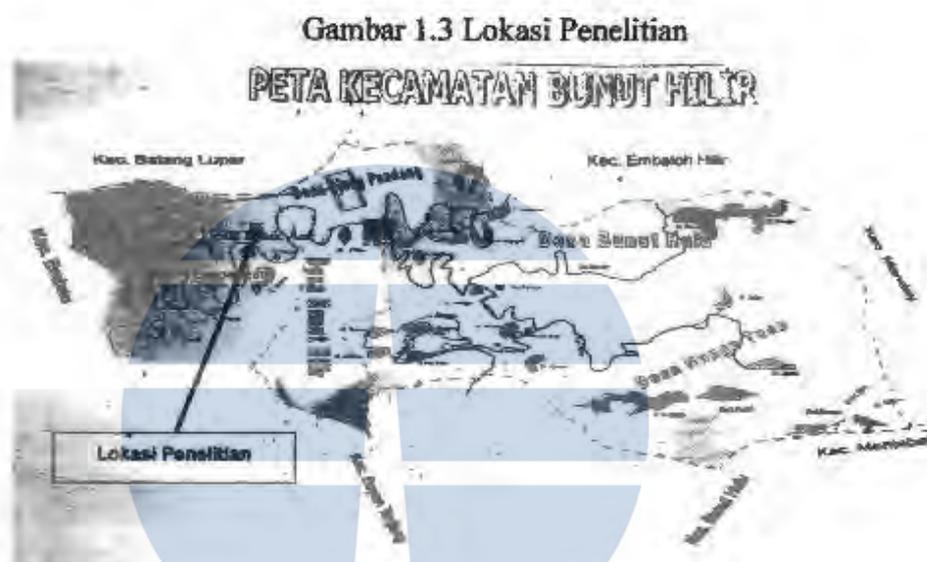
Dalam penelitian ini peneliti ikut berpartisipasi selama dilapangan melakukan wawancara, mencatat secara mendetail apa yang disampaikan oleh narasumber. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai proses pelaksanaan ko-manajemen perairan umum daratan di wilayah Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, peran ko-manajemen dalam meningkatkan produktivitas serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan ko-manajemen.

#### 1. Lokasi Penelitian

Dilaksanakannya Penelitian di wilayah Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya di Desa Teluk Aur. Pemilihan lokasi penelitian ini cukup beralasan, karena sampai saat ini pelaksanaan Ko-manajemen perairan umum daratan yang ada di Desa Teluk Aur belum

dievaluasi keberhasilan atau tidaknya, baik itu dari sisi dimensi kesesuaian ekologis, sosial dan ekonomi.

Desa Teluk Aur adalah salah satu desa di wilayah Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, untuk lebih jelasnya mengenai posisi Desa Teluk Aur dapat dilihat dalam gambar 1.3 di bawah ini:



## 2. Subjek Penelitian

Menurut Sanafiah (2005:19) "Subjek penelitian adalah sesuatu yang menunjukkan pada orang/individu atau kelompok yang dijadikan unit atau satuan (khusus yang diteliti)". Selanjutnya Sukandarrumidi (2002:44) "Sumber data adalah semua yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak". Adapun penarikan informan mempergunakan teknik *purposive* yaitu suatu teknik penentuan sumber informasi untuk tujuan tertentu saja, artinya yang dipilih adalah orang-orang yang mengetahui dengan jelas tentang permasalahan yang diangkat (Sugiyono, 2000:62).

Penentuan subyek penelitian atau informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* atau sampling bertujuan. Menurut Arikunto (2006), *purposive sampling* ialah teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Sampling bertujuan adalah suatu “strategi jika seseorang menginginkan agar dapat memahami sesuatu mengenai kasus-kasus terpilih tertentu tanpa membutuhkan (atau berhasrat) untuk menggeneralisasi kepada semua kasus seperti itu”.

Peneliti menggunakan *purposive sampling* untuk meningkatkan kegunaan informasi yang diperoleh dari sample yang sedikit. Sampling bertujuan membutuhkan informasi yang diperoleh atau diketahui itu dalam fase penghimpunan data awal mengenai variasi di antara sub-sub unit sebelum sampel dipilih. Peneliti pada mulanya menelusur informan, kelompok-kelompok, tempat-tempat, atau peristiwa-peristiwa kunci yang mempunyai informasi yang kaya dari mereka, sub-sub unit dipilih untuk kajian yang lebih dalam. Dengan perkataan lain, sampel-sampel ini dapat dipilih karena merekalah agaknya yang mempunyai pengetahuan banyak dan informatif mengenai fenomena yang sedang diinvestigasi oleh peneliti. Dalam penelitian ini terdapat subjek inti yang dianggap lebih memahami kondisi dari ko manajemen pengelolaan perairan umum daratan.

Pemilihan subjek yang terdiri dari tujuh unsur dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data primer adalah informan kunci. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pihak --

pihak yang mempunyai peranan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan yang menjadi subjek, sasaran penelitian dan menjadi informan dalam penelitian ini seperti pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2 Informan (Subjek) Penelitian

No.	Informan (Subjek) Penelitian	Jumlah
1	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	1
2	Kepala Bidang Pengelolaan Perairan	1
3	Pegawai Dinas Perikanan	1
4	Kasi Pemerintahan Bunut Hilir	1
5	Kepala Desa Teluk Aur	1
6	Ketua Danau Lindung	2
7	Tokoh Masyarakat Desa Teluk Aur	2

### C. Prosedur Pengumpulan Data

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan. Menurut Burhan Bungin (2003: 42), metode pengumpulan data adalah “dengan cara apa dan bagaimana data yang diperlukan dapat dikumpulkan sehingga hasil akhir penelitian mampu menyajikan informasi yang valid dan reliabel”.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode atau cara yang dipergunakan untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Agar memperoleh data yang tepat, akurat, serta diinginkan, maka untuk mencapai penggunaan metode tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Observasi

Teknik observasi merupakan studi sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejalanya dengan jalan pengamatan dan catatan. Menurut Burhan (2009: 115) observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Menurut Sugiyono (2009:64), mengklasifikasikan observasi yang secara terang terangan dan tersamar, dan observasi yang tidak terstruktur. Dalam melaksanakan pengamatan ini sebelumnya peneliti akan mengadakan pendekatan dengan subjek penelitian sehingga terjadi keakraban antara peneliti dengan subjek penelitian.

Data-data yang diperoleh dalam observasi selanjutnya ditulis dalam catatan lapangan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di tempat penelitian yaitu wilayah Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu di Desa Teluk Aur, mengenai aspek yang berkaitan dengan dengan ko-manajemen Perairan umum daratan dimana alat yang digunakan dalam observasi ini adalah pedoman observasi.

## Pedoman Observasi

Tujuan : Bentuk kerjasama antara Dinas Perikanan dan masyarakat Desa  
Teluk Aur

NO	Jenis Dokumentasi	Ada	Tidak	Keterangan Lengkap/Tidak
1	Program Pemerintah			
2	Peran masyarakat dalam mendukung manajemen			
3	SK Penetapan Danau Lindung			
4	Partisipasi dalam kegiatan pengawasan			
5	Proposal yang diajukan			
6	Sarana dan prasarana			
7	Peraturan adat dalam bentuk kearifan lokal			

## b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moloeng, 2005:186). Wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan subjek penelitian sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

Esterberg (Sugiyono, 2009:72) yang mendefenisikan interview atau wawancara sebagai berikut:” *a meeting of two persons to axchange information and idea through questions and responses, resulting in communication and joint contruction of meaning about particular topic.*” Artinya: Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.

Bentuk wawancara dalam penelitian ini salah satunya menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD). Menurut Saunder, Lewis dan Thornhil (Sarosa, 2012:53), FGD adalah bentuk khusus wawancara. Selanjutnya Greenbaum (Sarosa, 2012:53) FGD dapat didefinisikan sebagai sekelompok kecil partisipan yang bersifat formal dan berjangka waktu temporer, yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mendalami suatu topic. Dalam FGD partisipan terdiri dari beberapa orang secara berkelompok, kelompok biasanya terdiri dari beberapa orang. Menurut Napolitano (Sarosa, 2012:53), dalam FGD, partisipan yang terlibat wawancara adalah satu kelompok jumlah kelompok biasanya antara 6-10 orang tetapi bisa juga kurang atau lebih dari jumlah tersebut. Informasi yang berhubungan dengan latar belakang pengelolaan perairan umum daratan yaitu pelestarian ikan dan kebutuhan desa di bahas dalam teknik ini.

Selain menggunakan wawancara dengan interview lebih dari satu orang atau FGD, peneliti juga menggunakan wawancara *face to face* atau wawancara dengan satu partisipan baik pada proses pendahuluan dalam penelitian maupun pada sesi penelitian dengan tujuan yang sama yaitu untuk memperoleh informasi akurat mengenai bagaimana pengaruh program ko manajemen terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini, jenis-jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti dimana alat wawancaranya disebut pedoman wawancara dibuat peneliti dalam dua jenis yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur

yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian baik terhadap subjek yang lebih dari satu partisipan (FGD) maupun subjek dengan satu partisipan (dept interview).

Dalam melakukan wawancara, peneliti mengumpulkan subjek penelitian dalam satu tempat, hal ini dilakukan karena aktifitas subjek penelitian memiliki kesibukan masing-masing. Dalam wawancara ini peneliti berusaha membangun rasa kekeluargaan dan keakraban dalam pengumpulan data dengan menciptakan hubungan yang baik agar pelaksanaan wawancara berjalan dengan baik. Teknik wawancara di dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dan mendalam kepada subjek penelitian, guna pengumpulan data primer. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai: Bagaimana pelaksanaan program kemitraan yang diterapkan terhadap masyarakat nelayan di desa ini yang meliputi system pengelolaan perikanan, bagaimana peran masyarakat dalam mendukung progam yang dilaksanakan, serta pengaruh program ko manajemen terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang (Sugiyono, 2009: 82). Hasil observasi atau pengamatan akan lebih dipercaya apabila didukung dengan adanya dokumentasi. Dokumentasi yang akan diambil dalam penelitian ini berupa dokumentasi foto-foto.

## 2. Alat Pengumpulan Data

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yang terbagi menjadi observasi, wawancara dan dokumentasi adalah sebagai berikut:

- a. Pedoman Observasi, yaitu pedoman atau daftar yang digunakan untuk mengisi data yang dilihat dari hasil observasi atau pengamatan di lapangan guna memeriksa data atau informasi yang diperlukan, selain itu juga ada *field notes* dipersiapkan untuk mencatat hasil pengamatan.
- b. Panduan Wawancara, yaitu suatu alat pengumpulan data berupa kisi-kisi sebagai acuan untuk mengajukan pertanyaan yang telah disediakan sebelumnya. Panduan wawancara dalam penelitian ini bersifat terstruktur maupun tidak terstruktur dimana keduanya sama-sama menggunakan pedoman wawancara. Perbedaannya, pada jenis wawancara terstruktur, jumlah pertanyaan sudah jelas dan peneliti mengetahui gambaran jawaban, namun pada jenis wawancara tak terstruktur, jenis pertanyaan tidak dapat dikuantitaskan karena pertanyaan tersebut berkembang seiring dengan informasi yang diberikan oleh partisipan wawancara. Panduan wawancara dalam penelitian seperti berikut ini :

## Panduan Wawancara

NO	Subjek	Teknik pengambilan data	Hal-hal yang ditanyakan
1	Sekretaris Dinas Perikanan	<i>Indept interview</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana tingkat kesejahteraan sebelum adanya ko manajemen</li> <li>- Bagaimana Kondisi potensi perikanan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi yang ada</li> <li>- Apakah yang menjadi tujuan dari pengelolaan perairan umum daratan</li> <li>- Kegiatan apa saja yang dilaksanakan dalam ko manajemen</li> <li>- Bagaimana hubungan kerjasama dan koordinasi antara Dinas Perikanan dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan perairan umum daratan</li> </ul>
2	Kepala Bidang Pengelolaan perairan	<i>Indept interview</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah yang menjadi tujuan dari pengelolaan perairan umum daratan</li> <li>- Jenis dan bentuk bantuan apa saja yang diberikan kepada masyarakat dari Dinas Perikanan</li> <li>- Kegiatan apa saja yang dilaksanakan dalam ko manajemen pengelolaan perairan umum daratan</li> <li>- Siapakah yang terlibat dalam pengawasan pengelolaan perairan umum daratan</li> </ul>
3	Kasi Pemerintahan Kecamatan Bunut Hilir	<i>indept interview</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana tingkat kesejahteraan sebelum adanya ko manajemen</li> <li>- Bagaimana Kondisi potensi perikanan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi yang ada</li> </ul>

NO	Subjek	Teknik pengambilan data	Hal-hal yang ditanyakan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Apakah dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dalam pengelolaan perairan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan</li><li>- Apakah hukum tradisional atau lokal mampu menjamin kelangsungan pemanfaatan perairan</li></ul>
4	Kepala Desa Teluk Aur	<i>Indept interview</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bagaimana tingkat kesejahteraan sebelum adanya ko manajemen</li><li>- Bagaimana Kondisi potensi perikanan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi yang ada</li><li>- Apakah yang menjadi tujuan pengelolaan perairan umum daratan di Desa Teluk Aur</li><li>- Bagaimana hubungan kerjasama dan koordinasi antara Dinas Perikanan dengan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan perairan umum daratan</li><li>- Apakah ko manajemen pengelolaan perairan umum daratan telah mampu meningkatkan produktifitas sumber daya ikan di Desa Teluk Aur</li><li>- Apakah dengan meningkatnya pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan</li><li>- Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian perairan</li></ul>

NO	Subjek	Teknik pengambilan data	Hal-hal yang ditanyakan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah hukum tradisional atau lokal mampu menjamin kelangsungan pemanfaatan perairan</li> </ul>
5	Kepala Desa Teluk Aur, Ketua Danau Lindung dan tokoh masyarakat	FGD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagaimana peranan masyarakat dalam menentukan jenis dan bentuk pengelolaan perairan umum daratan di Desa Teluk Aur</li> <li>- Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pengelolaan perairan umum daratan di Desa teluk aur</li> <li>- Apakah di Desa teluk aur telah terjadi peningkatan pendidikan</li> </ul>
6	Pegawai Dinas Perikanan	FGD	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan apa saja yang dilaksanakan dalam ko manajemen pengelolaan perairan umum daratan</li> <li>- Bagaimana hubungan kerjasama dan koordinasi antara Dinas Perikanan dengan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan perairan umum daratan</li> <li>- Jenis dan bantuan apa saja yang telah diberikan dari Dinas Perikanan</li> </ul>

- c. Alat dokumentasi, untuk menunjang penelitian ini peneliti menggunakan alat dokumentasi berupa kamera.

#### D. Metode Analisis Data

Metode atau Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, artinya setelah data terkumpul baik primer maupun sekunder diklasifikasikan dan selanjutnya data tersebut diolah dan pengolahan data lebih banyak digunakan ungkapan-ungkapan kalimat sebagai interpretasi dari data-data yang diolah. Menurut Nazir (2003:346), "analisa data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi serta menyederhanakan data sehingga mudah untuk dibaca.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 3 komponen analisis, yaitu :

##### 1. Meringkas (*reduksi*)

Reduksi data dalam penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman (1992:16) diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

Menurut Sugiyono (2009:92), "Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk mengambil data selanjutnya".

Reduksi data akan sangat membantu dalam mengidentifikasi aspek penting dari pertanyaan yang diajukan dalam penelitian untuk memfokuskan data yang terkumpul, sehingga akhirnya sampai pada kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan dengan terlebih dahulu data yang diperoleh di

lapangan ditulis dalam bentuk utaian yang sangat lengkap dan banyak, kemudian data tersebut direduksi, dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Memaparkan (*display*)

Setelah mereduksi data selanjutnya melakukan display data. Display data merupakan proses penyajian data yang dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam melihat gambaran secara menyeluruh atau bagian-bagian tertentu untuk mengambil suatu kesimpulan secara tepat. Dengan mendisplay data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut (Sugiyono, 2009:95). Data dapat disajikan dalam bentuk bagan, matriks, grafis dan dalam bentuk naratif.

Cukup banyak data yang diperoleh dalam penelitian mulai dari wawancara, observasi sampai dengan dokumentasi. Dari informasi yang diperoleh tersebut terangkum dalam dokumentasi penelitian dengan tujuan untuk mengadministrasikan data penelitian sehingga memudahkan peneliti untuk menemukan data makna sebagai instisari dari keseluruhan dan informasi yang telah diperoleh oleh peneliti.

## 3. Menyimpulkan (*verifikasi*)

Menurut Sugiyono (2009:99), langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Menyimpulkan atau verifikasi yaitu meliputi proses pembuatan keputusan dan penyusunan kesimpulan yang berkaitan dengan hasil observasi dan wawancara. Data

yang tepat diharapkan mampu memperoleh pemahaman informasi yang lengkap dan jelas yang dapat membuat kesimpulan secara tepat dan akurat. Adapun data yang disimpulkan bersumber dari data-data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dengan harapan pada tahap penyimpulan, data yang diperoleh merupakan data yang sesungguhnya diperlukan untuk membuat keputusan penelitian. Kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil reduksi dan display data tersebut di susun oleh peneliti dengan secara runtut agar keputusan yang diambil tentang data penelitian menjadi terorganisir sehingga menjadi informasi yang akurat dan tepat.

#### **E. Pengecekan Keabsahan Data**

Uji kredibilitas data atau pengecekan keabsahan terhadap data hasil penelitian/temuan antara lain :

##### **1. Perpanjangan Pengamatan**

Hal ini dilakukan karena ketidakhadirannya narasumber maka peneliti menunggu waktu yang tepat untuk membuat janji sampai narasumber dapat melakukan wawancara lebih leluasa dan data yang diperoleh bisa lebih optimal dan tepat sasaran.

##### **2. Triangulasi**

Triangulasi dalam pengujian ini diartikan sebagai pengecekan data dari sumber-sumber dengan bermacam cara dan berbeda waktu. Dengan cara data-data yang diperoleh kemudian dipaparkan dan diringkas menjadi sebuah kesimpulan yang dianggap jenuh/valid. Dalam penelitian ini tiga teknik triangulasi yang dikemukakan oleh Sugiyono (2009:127) yaitu : Triangulasi sumber, Triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

a. Triagulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data peneliti melakukan dengan cara mengecek data dari berbagai sumber. Sugiyono (2009:127) berpendapat “Triagulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber, selanjutnya data yang diperoleh dideskripsikan, kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan.

b. Triagulasi Teknik

Menurut Sugiyono (2009:127) “untuk menguji kredibilitas keabsahan data dilakukan dengan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda.” Dalam penelitian ini peneliti mengkonfirmasi keabsahan data dari wawancara yang mendalam kemudian dicek dengan cara observasi kepada beberapa narasumber lain untuk mendapatkan data yang valid.

c. Triagulasi Waktu

Waktu yang digunakan dalam penelitian berperan dalam kredibilitas data pada saat penelitian ini peneliti melakukan wawancara pada saat pagi hari dan malam hari.

## F. Tahap-tahap Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Desa Teluk Aur memerlukan waktu yang relative cukup lama kurang lebih 4 bulan, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Tahap – tahap dalam penelitian dilakukan berkenaan dengan waktu penyelesaian yang ditargetkan dengan maksud

agar penelitian tersebut terprogram dengan baik untuk mencapai tujuan penelitian seperti yang diharapkan peneliti. Adapun tahap-tahapnya meliputi

a. Tahap Persiapan, yaitu dimulai sejak bulan Juli 2013 terdiri dari observasi Pendahuluan, Penyusunan proposal, Pematapan usulan melalui seminar, konsultasi perbaikan usulan penelitian sampai mengurus izin penelitian.

b. Tahap Pelaksanaan

Meliputi pengumpulan data dan analisis data :

- 1) Setelah mendapatkan izin penelitian pada bulan September peneliti langsung melakukan observasi dan permintaan data dokumentasi dan pengambilan data dari narasumber pada bulan September 2013.
- 2) Tanggal 11 September 2013 Peneliti mulai melakukan wawancara secara mendalam, observasi sambil mengolah data dan menganalisis data yang sudah terkumpul.

c. Tahap Pelaporan

Tahap ini terdiri dari penyusunan laporan (tesis), konsultasi dengan dosen pembimbing, pertanggungjawaban laporan (ujian tesis).

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Perairan Umum Daratan

Air dalam kehidupan manusia merupakan sumberdaya yang sangat diperlukan bagi kelangsungan kehidupan, seiring bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ketahun pemanfaatan terhadap sumberdaya air beraneka ragam. Indonesia memiliki perairan umum daratan cukup luas dan memiliki potensi sumber daya perairan yang cukup banyak pula.

Menurut Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum, (2011:3). Perairan daratan adalah hamparan perairan yang terletak pada sisi darat (*terrestrial*) dari titik surut air laut terendah sampai pada puncak gunung yang pada umumnya berupa muara sungai (*estuaria*), rawa hutan bakau (*mangrove*), sungai (*estuaria*), danau (*lake*), rawa (*swamp*), dan badan air buatan (*waduk*).

Perairan umum daratan yang ada di kabupaten Kapuas Hulu meliputi sungai dan danau yang merupakan potensi yang sangat baik bagi perkembangan sektor perikanan. Danau merupakan bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas sungai yang bersangkutan Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum, (2011:26). Untuk itu secara georafis posisi danau yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu aliran airnya mengalir ke sungai jadi danau dan sungai merupakan tempat berkembangnya beraneka ragam jenis flora terutama ikan. Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum, (2011:16) menyatakan bahwa sungai adalah

tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sepandan.

Secara umum perairan umum daratan Kabupaten Kapuas Hulu yang terdiri dari sungai dan danau merupakan satu kesatuan dari keanekaragaman ekosistem ekologis dan genetika flora dan fauna dari suatu daerah dikarenakan keunikannya tersebut sehingga dapat mendukung spesies-spesies ikan untuk dapat berkembang biak dan memberikan sumbangan nyata untuk keanekaragamannya secara global.

## 2. Kondisi Geografis Desa Teluk Aur

Desa Teluk Aur merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. Dari cerita rakyat yang disampaikan oleh “H. Sulaiman” sebagai salah satu tokoh adat menceritakan awal mula nama Desa Teluk Aur berasal dari sebuah bambu yang dinamakan Aur dan letak bambu tersebut tepatnya disebuah teluk akhirnya oleh masyarakat dinamakan Desa Teluk Aur.

Berdasarkan letak wilayah desa teluk aur dikelilingi oleh tiga desa dalam wilayah Kecamatan Bunut Hilir . Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ujung Pandang, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Empangau, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bunut Hilir dan sebelah Barat dengan Kecamatan Batang Lupar dan hanya dibatasi oleh Bukit Pengelang yang merupakan salah satu kawasan menuju ke Danau Sentarum. Desa teluk Aur terpecah menjadi 3 dusun yaitu Dusun Puring, Dusun Jaung I dan Dusun Jaung 2. Suhu di Desa Teluk Aur relative berhawa sedang dengan

keadaan suhu  $28^{\circ}$  C dengan jumlah bulan curah hujan sekitar 5 bulan, Desa ini mempunyai topografi / bentang wilayah sebagian tanah datar dan berbukit karena letaknya tidak jauh dari Bukit Pengelang.

Desa Teluk Aur termasuk tipologi desa yang cukup terisolir hal ini dikarenakan akses menuju desa tersebut hanya ditempuh melalui satu jalur sungai yaitu jalur sungai Kapuas. Kendaraan menuju Desa Teluk Aur hanya menggunakan Speedboad. Perjalanan dari Putussibau ke Desa Teluk Aur kadang dalam hitungan hari karena letak Desa Teluk Aur berada di sebelah hilir ibukota Kecamatan maka harus menunggu Speadboad dari Kecamatan lain untuk menuju ibukota Kecamatan dan ibukota Kabupaten Kapuas Hulu.

Desa Teluk Aur memiliki perairan umum daratan yang terdiri dari sungai, anak sungai, danau dan kerinan. Potensi perairan umum daratan yang ada di Desa teluk Aur terdiri dari Danau Lindung yang memiliki luas wilayah 31 Ha dan non danau lindung 121 Ha. Adapun jumlah sungai, anak sungai danau dan kerinan dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut :



Tabel 1.3  
Jumlah Perairan Umum Daratan Desa Telur Aur

No	Nama	Perairan
1.	Sungai	Sungai Kapuas
2.	Danau	Pengelang (danau lindung), sekumpai, Aur (danau lindung), semubur besar, semubur kecil.
3.	Anak Sungai	batang pengelang, buluh, labi, tali kayu ara ilik, tali kayu ara ulu, kali bubut, penan, ampar, pampang bolu inuk, pampang bolu anak, sungai keturun, resak, embaloh, medang, mani, menyekung, rasau, penyeluang, jayan, nyanar, mamud, aik mirah, pengubas, bujur tiang dan piambang.
4.	Kerinan	Kerinan (sejenis danau tapi bias mengalami kekeringan) meliputi : Bujak, piambang, beladau, lintang batang, raden suma, dua tiong besar, dua tiong senik, ruang pemali, teluk singka, bang ita ilik, dan bang ita ulu.

Sumber : Profil Desa Teluk Aur 2013

Dari Tabel 1.3 diatas terlihat bahwa Desa Teluk Aur memiliki potensi perairan umum daratan yang melimpah dari sektor perikanan. Pengelolaan perairan umum daratan di Desa Teluk Aur tidak terlepas dari kearifan lokalnya yang ditaati oleh seluruh masyarakat yang ada diwilayah Desa tersebut. Desa Teluk Aur memiliki danau yang ditetapkan sebagai Danau Lindung . Berdasarkan SK Bupati No. 314 Tahun 2007 ditetapkan danau pengelang menjadi danau lindung dan danau aur dengan SK Bupati No 141 Tahun 2004 ditetapkan sebagai Danau Lindung. Dua danau ini ditetapkan sebagai Danau Lindung dimaksudkan untuk melestarikan populasi ikan sehingga populasi ikan bisa terjaga dan merupakan lumbung ikan bagi masyarakat setempat. Adapun pengelolaan dua danau lindung ini

telah disepakati dalam bentuk peraturan adat termasuk didalamnya pengelolaan sungai, anak sungai, danau maupun kerinan.

Selain perairan umum daratan Desa Teluk Aur memiliki beberapa potensi lainnya seperti perkebunan, pertanian dan peternakan untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut ini :

**Tabel 1.4**  
**Data Umum Lahan Potensi Desa Teluk Aur berdasarkan Sub Bidang**

NO	LAHAN	LUAS WILAYAH (Ha)
1.	Pertanian (Ha)	277
2.	Perkebunan (Ha)	923
3.	Pertenakan (Ha)	9
4.	Hutan Lindung (Ha)	129.620
5.	Danau Lindung (Ha)	31
6.	Non Danau Lindung (Ha)	121
7.	Pemukiman Penduduk (Ha)	11
8.	Desa/SD/SLTP/SLTA	8

Sumber : Profil Desa Teluk Aur 2013

### 3. Kondisi Demografis dan Sosial Ekonomi

Berdasarkan data yang ada, Desa Teluk Aur memiliki jumlah penduduk 1.190 jiwa dengan jumlah KK terdiri dari 327 KK dengan jumlah laki-laki 582 jiwa dan perempuan 608 jiwa yang terbagi dari tiga dusun yaitu Dusun Puring terdiri dari 884 jiwa, Dusun Jaung 1 Terdiri dari 140 jiwa dan Dusun Jaung 2 terdiri dari 166 jiwa. Gambaran komposisi penduduk dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut ini :

Tabel 1.5  
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Teluk Aur

No	Dusun	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Lk + Pr
1.	Puring	229	424	460	884
2.	Jaung 1	47	73	67	140
3.	Jaung 2	51	85	81	166
	Jumlah	327	582	608	1.190

Sumber : Profil Desa Teluk Aur 2013.

Mata pencaharian masyarakat Desa Teluk Aur terdiri atas nelayan maupun pembudidaya ikan, berkebun karet, bertani, berdagang, dan beternak. Sektor yang menjadi andalan masyarakat Desa Teluk Aur dalam menopang perekonomian mereka adalah dari sektor perikanan. Sebagian besar masyarakat Desa Teluk Aur adalah Nelayan. Untuk kegiatan pembudidaya ikan dalam bentuk keramba yang terdiri dari 242 unit, ikan yang biasa dipelihara (ikan toman, paten, baung, tapah, belidak, jelawat, betutu). Pembudidayaan ikan dalam keramba dijadikan penghasilan sampingan selain pekerjaan mereka sebagai pencari ikan di sekitar danau. Sedangkan untuk pembudidayaan ikan di dalam kolam hanya sebagian kecil penduduk yang memilikinya dan sebagian besar ikan yang dibudidaya adalah arwana, ikan mas, lele, patin dan ikan nila. Lebih jelasnya dapat dilihat hasil penangkapan dari tahun 2011-2013 seperti pada Tabel 1.6 berikut ini :

Tabel 1.6  
Data Perkembangan Hasil Penangkapan Ikan di Desa Teluk Aur

No	Jenis Ikan	Tahun/Ton		
		2011	2012	2013
1	Jelawat	8,113	7,110	7,010
2	Gabus	42,015	52,015	72,015
3	Betutu	14,000	14,100	14,005
4	Toman	79,004	79,004	76,004
5	Lais	10,000	20,600	20,230
6	Tambakan	35,000	55,000	55,000
7	Belida	3,104	3,104	3,104
8	Lampan	39,000	39,000	39,000
9	Lainnya	239,000	239,000	239,000
	Jumlah	469,236	508,933	525,368

Sumber: Statistik Penangkapan Dinas Perikanan Kab.Kapuas Hulu 2013

Adapun alat tangkap yang biasa digunakan di perairan umum daratan Desa Teluk Aur adalah jala, temilar, bubu mini, rabai, rawai/rabai utas, pukot, seruak, penyebar, dan engkelap (bubu duduk). Sarana tangkap yang digunakan masyarakat berupa perahu 1.188 buah, motor temple 1.188 unit (terdiri dari 2,2 PK dan 3,3 PK/setiap KK), 237 unit motor temple 15/40 PK (Data pokok Dinas Perikanan Kab.Kapuas Hulu 2013).

Dalam sektor perkebunan sebagian besar masyarakat di Desa Teluk Aur memiliki perkebunan rakyat komoditas perkebunan adalah kebun karet ada juga gaharu tetapi yang banyak diproduksi adalah kebun karet, kegiatan menoreh karet biasanya dilakukan sebelum mencari ikan ataupun sesudah mencari ikan, kebiasaan masyarakat Desa Teluk Aur sebelum menoreh getah karet masyarakat memasang alat tangkap seperti pukot, pancing maupun bubu. Setelah itu mereka menoreh getah selang beberapa jam

mereka pulang dan mengambil hasil panen dari alat tangkap yang dipasang sebagian untuk lauk- pauk dan sebagian untuk dijual.

Untuk peternakan komoditas yang dternakan adalah sapi, ayam dan bebek. Usaha peternakan lainnya yaitu ternak lebah dengan produksi madu 500 kg/1 tahun. Untuk jasa perdagangan merupakan jasa hanya beberapa dari jumlah masyarakat di desa ini. Pada sektor pertanian komoditas yang diminati adalah menanam padi dan sayur-sayuran dijadikan persediaan untuk konsumsi sendiri, apabila lebih baru di jual ke pasar. Pemasarannya di dalam Desa dan keluar Desa di wilayah Kecamatan Bunut Hilir.

Tingkat pendidikan juga turut andil terhadap komposisi mata pencaharian masyarakat. Mayoritas penduduk di Desa Teluk Aur tingkat pendidikannya relatif rendah yakni hanya tamat sekolah dasar atau lulus SD bahkan ada yang tidak bersekolah sehingga hal ini memaksa penduduk untuk bekerja pada sektor informal seperti nelayan, petani dan peternak. Untuk lebih jelasnya tingkat pendidikan masyarakat di Desa Teluk Aur dapat di lihat pada Tabel 1.7 berikut ini :

Tabel 1.7

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Teluk Tahun 2013

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Tidak Tamat /Tidak Pernah Sekolah	479 Orang
2.	Tamat Sekolah dasar	580 Orang
3.	Tamat SLTP	35 Orang
4.	Tamat SLTA	47 Orang
5.	Tamat Akademi/Perguruan tinggi	3 Orang
	<b>JUMLAH</b>	<b>1144</b>

Sumber : Data Profil Desa Teluk Aur 2013

Dari Tabel 1.7 di atas dapat dilihat tingkat pendidikan masyarakat terbesar hanya tamat SD, sedangkan kalau dilihat prasarana yang tersedia meliputi TK, SD dan SMP dan gedung SMP, sehingga di dapat informasi bahwa apabila ingin melanjutkan ke jenjang SMA masyarakat harus keluar Desa ke ibu kota Kecamatan Bunut Hilir ataupun ke Kecamatan lainnya yang tentu saja menggunakan transportasi air yaitu Speedboat kadang tidak jarang menumpang pada motor air pengangkut barang. Dari berbagai kegiatan masyarakat tentunya didukung oleh sarana dan prasarana seperti jembatan, tempat ibadah dan sebagainya. Sarana transportasi darat di Desa Teluk Aur berupa jembatan yang menghubungkan rumah yang satu ke rumah lainnya, karena rumah dibangun di atas tanah rawa. Bagi yang tinggal di daerah dataran tinggi mereka hanya menggunakan jalan setapak. Lebih jelasnya keadaan sarana dan prasarana yang ada di Desa Teluk Aur dapat dilihat pada Tabel 1.8 berikut ini :



Tabel 1.8 Sarana dan Prasarana di Desa Teluk Aur

<b>NO</b>	<b>JENIS SARANA DAN PRASARANA</b>	<b>SATUAN</b>
1.	Prasarana Transportasi Darat - Jembatan Desa	Ada
2.	Sarana transportasi - Perahu Motor - Perahu tanpa motor - Speedboat	Ada Ada Ada
3.	Prasarana Komunikasi - TV - Handphone - Pesawat Radio	Ada Ada Ada
4.	Prasarana Pemerintahan - Balai Desa/Sejenisnya - Mesin Ketik - Laptop - Komputer - Kursi - Lemari	Ada 2 Buah 1 Unit 1 Unit 50 Buah 2 Buah
5.	Prasarana Peribadatan - Masjid - Langgar/Surau/Mushola - Gereja - Kapel	1 Buah 1 buah 1 Buah 1 Buah
6.	Prasarana Olahraga - Lapangan Sepakbola - Lapangan Bulu tangkis - Lapangan Pinpong - Lapangan Volly	2 Buah 1 Buah 1 Buah 1 Buah
7.	Prasarana Kesehatan - Puskesmas Pembantu - Posyandu	1 Unit 1 Unit
8.	Sarana Kesehatan - Paramedis - Petugas PLKB - Dukun Terlatih - Kader Posyandu	1 Orang 1 Orang 2 Orang 5 Orang
9.	Prasarana Penerangan	Ada
10.	Prasarana Pendidikan - TPA - TK - SD - SLTP - Perumahan Guru	1 Unit 1 Unit 3 Unit 1 Unit 6 Unit

Sumber : Profil Desa Tahun 2013

## B. Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Ko-manajemen Perairan Umum Daratan Desa Teluk Aur

Proses ko-manajemen pengelolaan perairan umum daratan yang ada di Desa Teluk Aur bermula dari menurunnya penghasilan penduduk dari sektor perikanan. Mengurangnya jumlah persediaan ikan di perairan yang meliputi sungai dan danau hal ini disebabkan eksploitasi yang berlebihan mengakibatkan menurunnya sumber mata pencaharian penduduk dan berimbas pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Sehubungan dengan hal ini Kepala Desa Teluk Aur mengatakan :

“Bahwa sebelum adanya kerjasama dengan pemerintah kondisi perairan umum daratan yang meliputi sungai dan danau yang ada di di Desa ini yang merupakan habitat ikan memang sangat kurang sekali hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga sumber daya alamnya,”

Hal ini diperparah dengan kebiasaan masyarakat yang menangkap ikan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak wajar mengakibatkan semakin berkurangnya populasi ikan bahkan ada beberapa species ikan yang sudah mulai langka, diantaranya jenis ikan arwana yang memiliki nilai jual tinggi.

Sehubungan dengan hal ini, Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu mengatakan :

“Sebelum adanya ko manajemen ini pertumbuhan pendapatan penduduk tidak seperti sekarang ini hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan perairan umum daratannya dalam hal ini sungai maupun danau yang memang merupakan lahan mata pencaharian masyarakat”

Produktivitas sumber daya perairan yang ada di desa Teluk Aur dari tahun ke tahun semakin berkurang hal ini ditandai dengan berkurangnya hasil tangkapan nelayan dengan berkurangnya hasil tangkapan secara tidak langsung dapat mengurangi pendapatan nelayan yang tentunya menimbulkan efek kekurangan kesejahteraan yang berpengaruh kepada sektor pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Berdasarkan hasil dilapangan didapat informasi bahwa sekitar 10 -15 tahun yang lalu persediaan ikan diwilayah Perairan Desa Teluk Aur sangat melimpah masyarakat tidak perlu mencari ikan ke wilayah lain hanya untuk sekedar dijadikan lauk pauk bahkan ikan yang menjadi unggulan komoditas ikan arwana yang mempunyai nilai jual tinggi pada zaman itu di olah menjadi ikan asin karena stoknya yang banyak di perairan hal ini menandakan bahwa sumber daya perairan umum daratan yang terdapat di Desa Teluk Aur pada waktu itu melimpah.

Seiring dengan perjalanan waktu persedian ikan di perairan desa Teluk Aur semakin berkurang bahkan ada dari beberapa species ikan yang semakin punah bahkan sudah tidak pernah didapat oleh masyarakat di desa ini lagi. Kondisi ini memicu kepedulian masyarakat untuk melestarikan sumber daya perairan yang ada di desa Teluk Aur, jangan sampai generasi kedepan tidak dapat merasakan kekayaan potensi perairannya.

Permasalahan ini menjadi topik yang hangat dibicarakan pada setiap pertemuan masyarakat di Desa Teluk Aur. Perbincangan hangat tersebut membicarakan tentang bagaimana caranya agar kejayaan dimasa lalu bisa terulang kembali disamping membicarakan tentang bagaimana membangun

fasilitas-fasilitas yang diperlukan desa tanpa harus menunggu bantuan dari pemerintah.

Bergotong-royong dalam melakukan sesuatu merupakan budaya turun temurun dari nenek moyang kita. Budaya ini masih tumbuh subur di kalangan masyarakat desa Teluk Aur. Dengan diprakarsai oleh ketua adat, maka diadakan pertemuan untuk membahas masalah tentang penurunan sumber daya perairan umum daratan yang ada di desa Teluk Aur disamping membicarakan tentang upaya membangun fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan desa. Pertemuan ini dihadiri oleh para tetua adat dan tokoh masyarakat dan anggota masyarakat yang ada di desa Teluk Aur. Pertemuan dimaksudkan untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Hasil pertemuan ini disepakati bahwa perlunya melakukan suatu model pengelolaan perairan umum daratan dengan memperhatikan aspek pelestarian dan perlindungan.

Hasil dari kesepakatan ditentukanlah dua danau untuk dijadikan danau lindung atau istilah lain untuk pelestarian ikan-ikan konsumsi, ikan hias dan habitat-habitat lainnya yang mendiami danau lindung tersebut. Selain itu wilayah perairan lainnya berupa sungai, anak sungai maupun keringan. Danau lindung yang dimaksud meliputi Danau Aur dan danau Pengelang. Berdasar kesepakatan dari seluruh masyarakat terhadap pengelolaan perairan umum daratan dibuatlah peraturan adat yang dibuat oleh dua etnis suku yang mendiami wilayah kecamatan Teluk Aur yaitu etnis suku Melayu dan suku Dayak Iban. Hal ini bertujuan untuk menjamin kesinambungan mengenai cara menangkap ikan seperti pengelolaan sungai,

anak sungai, danau maupun kerinan yang antara lain meliputi pengaturan perizinan dalam hal menangkap ikan, zona yang bisa ditangkap, pengaturan mata jaring yang digunakan dan pelarangan untuk jenis ikan tertentu serta bersama-sama melakukan pengawasan yang dilakukan oleh seluruh masyarakat yang mendiami wilayah Desa Teluk Aur. Berdasar kesepakatan yang dibuat dapat disimpulkan bahwa pengelolaan perairan umum daratan yang ada di Desa Teluk Aur merupakan kebijakan masyarakat dalam mengelola dan melestarikan sumber daya perairan atau murni dari permulaan internal masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan sumber daya perairan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nikijuluw (2002:122-123), bahwa asal usul terbentuknya ko-manajemen pada umumnya inisiatif membangun suatu rezim ko manajemen lebih banyak berada pada tangan pemerintah namun tidak menutup kemungkinan ko manajemen lahir berdasarkan inisiatif yang lebih besar dari masyarakat.

Sehubungan dengan hal ini Kades Teluk Aur mengatakan :

“Dari awal tujuan dari pengelolaan perairan ini adalah untuk dapat meningkatkan produksi ikan-ikan lokal maupun ikan hias imbas dari pelestarian ikan tersebut adalah diadakannya rapat desa dan melalui pembicaraan ini disepakatilah danau aur dan danau pengelang untuk dijadikan danau lindung, dan aturan-aturannya ada pada peraturan adat yang disepakati”

Kebijakan peraturan adat dalam bentuk kearifan lokal bertujuan untuk memanfaatkan perairan umum daratan agar bisa dimanfaatkan secara berkesinambungan atau dengan kata lain masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya perairan namun tetap menjaga kelestariannya. Hal ini selaras dengan UU No 31 Tahun 2004, Pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudi-

dayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat. Pengelolaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan terutama masyarakat yang mendiami wilayah desa disekitar Danau Lindung.

Menurut hasil wawancara dengan Ketua danau lindung pengelang :

“ Masyarakat sangat mendukung program pengelolaan perairan umum daratan ini hal ini dapat dibuktikan dengan mayarakat mau bersama-sama mengawasi danau lindung”

Oleh karena itu aspek menjaga kelestarian dan melakukan pengawasan pada perairan umum daratan merupakan salah satu alternatif dalam rangka meningkatkan tarap hidup untuk mencapai kesejahteraan.

Sehubungan dengan hasil wawancara dengan Kepala Desa Teluk Aur mengatakan :

“Bahwa masyarakat sangat mendukung biasanya jika ada masalah di danau lindung masyarakat langsung melapor bahwa ada yang melanggar batas danau terutama di zona larangan”

Lebih lanjut sebagaimana kutipan hasil wawancara dengan Tokoh masyarakat mengatakan:

“Bahwa yang terlibat dalam mengawasi pengelolaan perairan umum daratan adalah masyarakat dan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah dan masyarakat”

Hal ini diperkuat dengan pernyataan Kepala Desa Teluk Aur yang mengatakan :

“Ada rukun nelayan dan Pokmaswas serta seluruh masyarakat yang turut mengawasi perairan Desa Teluk Aur”

Sebagaimana pernyataan diatas, dapatlah di pahami bahwa dari segi pengelolaan terdapat tugas-tugas lainnya seperti pengawasan perairan dari

hasil kesepakatan masyarakat desa dibentuklah organisasi kemasyarakatan yaitu POKMASWAS atau lebih dikenal dengan Kelompok Masyarakat Pengawas dan Rukun Nelayan. POKMASWAS sendiri bertujuan untuk mengawasi kegiatan masyarakat dalam beraktifitas di perairan. Dalam menjalankan tugasnya POKMASWAS mengawasi dua wilayah perairan yang meliputi pengawasan untuk perairan sungai dan pengawasan untuk perairan danau. Tugas dari POKMASWAS adalah memantau setiap aktifitas masyarakat di wilayah perairan danau dan sungai yang meliputi penangkapan ikan yang tidak wajar seperti penyentruman, penubaan dan sebagainya. Kepengurusan POKMASWAS sendiri dibentuk oleh masyarakat dan diresmikan oleh pemerintah daerah khususnya Dinas Perikanan pada tahun 2011. Selain POKMASWAS masyarakat juga membentuk organisasi lain yaitu Rukun Nelayan, di dalam kepengurusannya dibentuk seksi keamanan dan hukum yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani segala perumusan hukum dan melakukan sanksi terhadap pelaku pelanggaran sesuai dengan hukum adat setempat.

Dalam pengelolaan perairan umum daratan masyarakat mulai menyadari perlunya kerja sama semua pihak untuk menjaga dan melestarikan sumber daya perairan untuk itu diambil kesimpulan perlunya campur tangan pemerintah sebagai lembaga perencanaan pembangunan untuk pengelolaan perairan umum daratan kearah yang lebih baik. Sependapat dengan apa yang dikemukakan Nikijiluw (Hamid,2011) bahwa pemerintah harus terlibat atau campur tangan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan kerana tiga alasan, *pertama* pemerintah ikut

mengelola sumberdaya perikanan karena alasan efisiensi. *Kedua* Pemerintah terlibat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan supaya keadilan dapat diwujudkan. *Ketiga* keterlibatan pemerintah diperlukan dalam hal mengelola sumberdaya perikanan karena alasan administrasi. Dengan mempertimbangkan luasnya daerah dan kompleksitas masalah, pemerintah relatif dapat mengatasinya dengan lebih mudah. Pemerintah juga diperlukan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan yang memang tidak langsung menghasilkan keuntungan ekonomi. Artinya tanpa insentif, tidak ada pihak swasta yang mau melakukannya.

Pengelolaan perairan umum daratan tidak terlepas dari UU No.31 Tahun 2004 tepatnya pasal 6 ayat 2 disebutkan bahwa pengelolaan perikanan harus mempertimbangkan hukum adat dan / atau kearifan local yang berlaku serta memperhatikan peran serta masyarakat. Dengan memperhatikan keseriusan masyarakat dalam melestarikan sumber daya perikanan maka pada tahun 2004 dengan persetujuan masyarakat pemerintah Kapuas Hulu dalam hal ini Bupati Kapuas Hulu (Drs. H. Abang Tambul Husin) meresmikan Danau Aur dan Danau Pengelang sebagai kawasan danau lindung. Untuk Danau Lindung Aur ditetapkan dengan SK Bupati No.141 Tahun 2004 dan Danau lindung Pengelang dengan SK Bupati No.314 Tahun 2007. Pada pengelolaan tersebut pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama menerapkan aspek perlindungan terhadap populasi-populasi ikan konsumsi maupun ikan komoditas seperti arwana selain itu pemerintah dan masyarakat memberikan ruang gerak kepada nelayan untuk menangkap ikan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maka disepakati dalam

mengadakan pembatasan zona larangan dan zona tangkap serta zona dilindungi. Dalam pengelolaannya, kedua danau ini masing-masing memiliki peraturan adat tersendiri yang mengikat.

Danau lindung Aur merupakan ekosistem rawa banjiran berair tenang dengan luas 12,112 Ha dengan kedalaman saat banjir 8 M dan saat kemarau 3 M memiliki letak geografis Nol<sup>0</sup>46'35,5"-E 112<sup>0</sup>24'39,5". Habitat yang terdapat di danau tersebut meliputi ikan arwana, entukan, belida, tapah, tengadak, toman dan ikan spesifik lokal lainnya. Pengelolaan Danau lindung Aur berdasarkan peraturan adatnya atau kearifan lokal meliputi Batas danau Lindung Aur Dusun Puring desa Teluk Aur adalah seluruh wilayah atau kawasan sekitar danau lindung Aur ditutup. Artinya tidak boleh ada aktifitas apapun khususnya dalam penangkapan ataupun perusakan hutan dan sebagainya, dalam peraturan adat yang telah direvisi kembali pada tahun 2012.

Pengelolaan yang disepakati oleh seluruh masyarakat Desa teluk Aur adalah di Danau Lindung Aur dilarang untuk aktifitas penangkapan dan sebagainya kecuali diluar zona larangan, untuk menghindari jumlah populasi ikan yang berlebihan serta kebutuhan pembangunan di desa maka pada tahun 2008 danau lindung Aur di panen adapun ikan yang dipanen meliputi ikan biawan (tambakan) 300 Kg dan ikan toman 500 Kg. Kemudian pada Tahun 2009 dipanen ikan entukan 800 Kg, hasil dari penjualan ikan-ikan tersebut digunakan untuk pembuatan fasilitas pembangunan di Desa.

Bentuk kerja sama pemerintah dan masyarakat di Desa Teluk Aur pada pengelolaan danau lindung Aur dimana pada tahun 2009 telah dilakukan restocking ikan arwana oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 3 ekor, pada Tahun 2010 juga dibangun pos pengawasan KKP dan pada Tahun 2013 berupa shelter.

Danau Lindung Pengelang merupakan ekosistem rawa banjiran berair tenang dengan luas 119,19 Ha meliputi 24,857 merupakan Zona lindung atau zona pelestarian 94.333 Ha merupakan zona kas Desa dan zona ekonomi. Kedalaman saat banjir 16 M dan saat kemarau 6 M letak geografis N 00°45'48.0"- E 112°24'39.5" . Danau lindung pengelang merupakan habitat hidup ikan arwana, entukan, belida, tapah, tengadak,toman dan ikan spesifik local lainnya.

Bentuk kerja sama pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan danau lindung pada Tahun 2007 meliputi Restocking ikan arwana sebanyak 4 ekor, pada Tahun 2012 berupa shelter.

Pengelolaan perairan umum daratan di danau lindung pengelang selain mengacu pada peraturan adat pengelolaan danau lindung pengelang juga memiliki beberapa zona yang terdiri dari zona ekonomi,zona pelestarian dan zona untuk kas Desa. Zona ekonomi adalah zona yang pemanfaatannya boleh diambil artinya boleh ditangkap menggunakan alat tangkap apapun, zona pelestarian adalah zona yang boleh diambil apabila ada acara-acara tertentu seperti panen raya yang mengundang masyarakat luar, selain itu sebagai zona untuk pelestarian sfesifik ikan-ikan lokal yang ada sedangkan zona untuk kas desa adalah zona yang di diambil apabila desa

atau dusun memerlukan dana untuk kegiatan apapun. Untuk lebih jelasnya jumlah dari zona kas desa dapat dilihat pada table 1.9 berikut ini :

Tabel 1.9  
Daftar Alokasi Dana dari Zona Kas Desa Danau Lindung Pengelang

NO	TANGGAL-BULAN -TAHUN	JUMLAH
1.	10 Maret 2008	Rp. 2.400.000
2.	15 September 2008	Rp. 7.780.000
3.	24 April 2009	Rp. 15.125.000
4.	11 September 2009	Rp. 20.700.000
5.	5 Maret 2010	Rp. 28.200.000
6.	4 Mei 2011	Rp. 18.440.000
7.	19 Desember 2011	Rp. 77.574.000
8.	20 Januari 2012	Rp. 22.152.000
9.	18 Mei 2012	Rp. 14.350.000
10.	8 Agustus 2012	Rp. 5.598.000
11.	4 Mei 2013	Rp. 15.119.000
12.	12 Juli 2013	Rp. 15.000.000
13	15 oktober 2013	Rp.17.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 259.438..000</b>

Sumber : Pengurus Danau Lindung Pengelang 2013

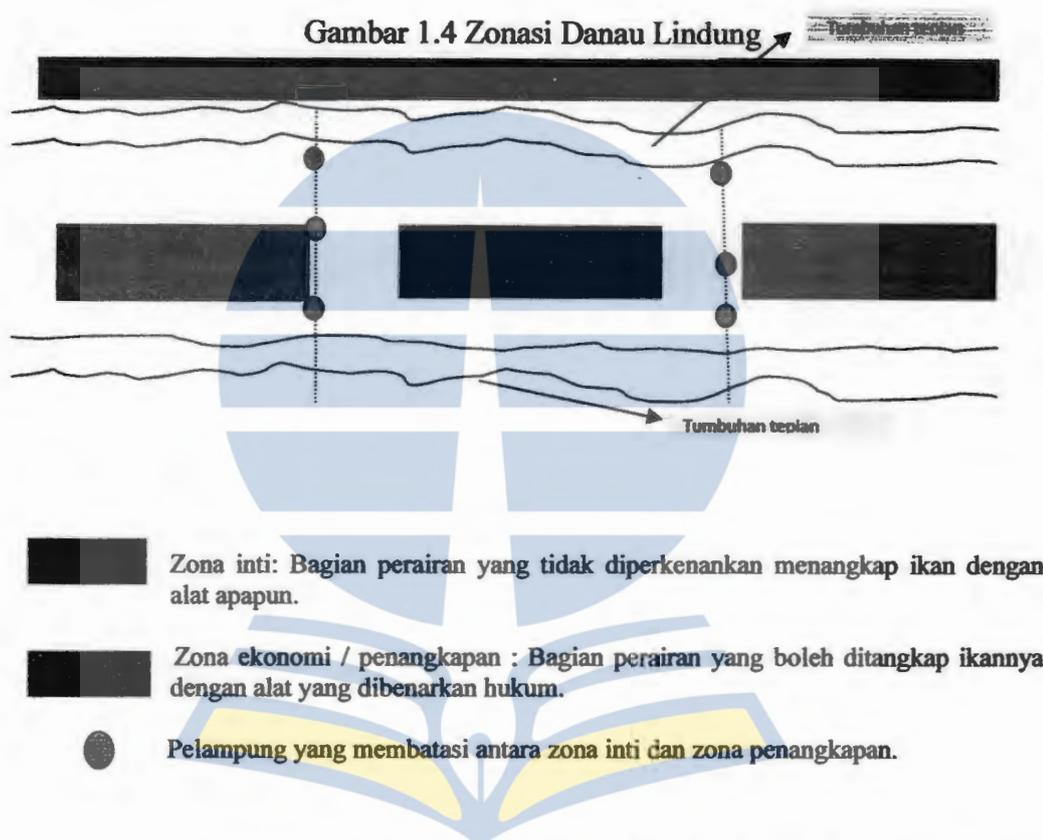
Dari pengelolaan kedua danau lindung ini pengelolaan lainnya dari perairan umum daratan adalah sungai dan batang sungai maupun kerinan, imbas dari pelestarian ikan di danau lindung mengakibatkan populasi spesifik ikan lokal bertambah akibatnya danau lindung yang merupakan tempat pelestarian ikan dan merupakan lumbung ikan keluar dari zona pelestarian dan penyebarannya ke sungai maupun batang sungai. Dari penyebaran inilah masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya perikanan sebagai mata pencaharian untuk meningkatkan taraf hidupnya menuju ke tingkat kesejahteraan, Khusus pengelolaan batang sungai fakta unik dari desa Teluk Aur adalah setiap akhir tahun diadakan undian dengan sistem kupon dan kupon tersebut ditawarkan kepada masyarakat dengan harga Rp.500 dan Rp.1000/kupon. Pembuatan Kupon sendiri dibuat sebanyak

mungkin oleh panitia. Dari kupon tersebut ditentukan titik-titik wilayah batang sungai yang bisa di dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menangkap ikan. Dari hasil penjualan kupon tersebut dikembalikan untuk kas Desa. Dari Pengelolaan Perairan umum daratan yang ada di Desa Teluk Aur semuanya untuk kebutuhan fasilitas desa atau kebutuhan dari masyarakat terutama dari segi sosial, apabila memerlukan dana maka bersama-sama masyarakat melakukan panen raya sesuai kebutuhan Desa atau Dusun, adapun pemasarannya melalui pengumpul-pengumpul ikan dari pengumpul ikan di pasarkan ke ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu maupun ibu kota lainnya yang tentunya dari hasil panen ini oleh pengumpul diolah menjadi berbagai macam olahan dari produk-produk perikanan seperti ikan asin, kerupuk basah, kerupuk kering, olahan isi ikan maupun ikan fermentasi. Adapun alokasi pemanfaatan Pengelolaan Perairan Umum daratan bagi Desa Teluk Aur meliputi :

- Perumahan listrik desa
- Jalan dusun puring 110 x 2
- Pembuatan rumah guru
- Bantuan pembangunan, masjid, musholla, gereja, dan kapel
- Bantuan dibidang sarana olahraga seperti pembuatan lapangan bola
- Bantuan bbm setiap tahun
- Pembersihan batang sungai yang melibatkan masyarakat/gotongroyong
- Pembuatan perahu untuk lomba sampan
- Bantuan acara gawai suku dayak dan acara suku melayu
- Bantuan acara rohani
- Bantuan orang meninggal
- Bantuan perbaikan jalan

- Bantuan alat tangkap untuk panen raya
- Bantuan untuk orang sakit yang berobat keluar desa
- Dana untuk lomba kebersihan per RT
- Bantuan dana konsumsi tamu yang datang kedesa semua dari incam desa.
- Acara keramaian saat idul fitri
- Dan acara 17 agustus seperti perlombaan 17 Agustus

Diagram system zonasi danau lindung dapat dilihat pada Gambar berikut ini :



Berdasarkan peta gambar 1.4 di atas, dapat dijelaskan bahwa zona inti atau zona perlindungan yang merupakan bagian perairan yang ikannya tidak boleh ditangkap oleh siapapun, kapanpun dan dengan alat apapun. Zona inti adalah bagian perairan yang menyangga kehidupan populasi sumber. Dari populasi sumber ini diharapkan dapat muncul indukan dan anakan ikan yang dapat mendukung stok ikan di perairan sekitarnya. Kemudian ada Zona ekonomi atau zona penangkapan yaitu bagian perairan

yang ikannya boleh ditangkap kapanpun dengan cara dan alat yang tidak melanggar aturan.

Berdasarkan deskripsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa proses kelahiran ko-manajemen di desa Teluk Aur adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan sumberdaya perikanan di Desa Teluk Aur dimulai dengan inisiatif yang muncul dari masyarakat lokal dengan menggunakan pemahaman yang mereka punya (pengetahuan lokal). Inisiatif munculnya gagasan pengelolaan sumber daya perikanan di Desa Teluk Aur disebabkan penurunan pendapatan atau penghasilan masyarakat nelayan dari hasil tangkapan mereka. Hal itu disebabkan karena eksploitasi berlebihan dari sumberdaya perikanan yang kemudian berdampak pada berkurangnya stock ikan di wilayah perairan Danau Teluk Aur.
- b. Pelaksanaan ko-manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan di Desa Teluk Aur bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, terutama komunitas masyarakat nelayan Teluk Aur yang bermukim di wilayah perairan umum.
- c. Pergeseran pengelolaan danau dari pengelolaan oleh masyarakat menjadi pengelolaan bersama pemerintah dan masyarakat bermula setelah di tetapkannya Danau Teluk Aur sebagai Danau Lindung SK Bupati No.141 Tahun 2004 dan SK Bupati No.314 Tahun 2007

Setelah mengetahui proses terbentuknya ko-manajemen sumberdaya perikanan didesa Teluk Aur, peneliti mencoba untuk mengetahui proses berjalannya ko-manajemen itu sendiri. Proses yang dimaksud disini adalah rangkaian pelaksanaan ko-manajemen mulai dari perencanaan hingga

evaluasi. Rangkaian ini bisa dipandang sebagai suatu siklus yang tiada akhirnya. Sehingga dari kegiatan evaluasi pelaksanaan ko-manajemen dapat ditarik saran dan rekomendasi bagi perbaikan ko-manajemen itu sendiri. Saran dan rekomendasi tersebut digunakan sebagai *input* baru dalam perencanaan. Dengan demikian argumentasi bahwa ko-manajemen adalah suatu proses memang benar adanya.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan maka proses pelaksanaan ko-manajemen Perairan umum daratan di Desa Teluk Aur dapat dikelompokkan tiga tahap yaitu tahap pra-implentasi, implementasi dan pasca implementasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Nikijuluw (2002;144-156), bahwa rangkaian proses ko-manajemen dapat dibagi dalam tiga fase, yakni : pra implementasi, implementasi, dan pasca implementasi

Proses ko-manajemen Perairan umum daratan di Desa Teluk Aur berjalan dalam tiga tahap yaitu pra-implimentasi, implementasi dan pasca implementasi.

#### **a. Tahap Pra-Implemetasi**

Tahap Pra-implimentasi ko-manajemen perairan umum daratan dalam hal ini sumber daya perikananannya di wilayah Desa Teluk Aur pada awalnya disebabkan oleh permasalahan menurunnya produktivitas hasil tangkapan nelayan disebabkan oleh cara penangkapan yang salah dan ekspoitasi berlebihan sehingga populasi ikan menjadi menurun. Kemudian pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang makin menurun menimbulkan kesadaran akan kebutuhan sarana

dan prasarana dalam mengelola sumber daya perikanan yang ada di wilayah Desa Teluk Aur.

Masalah penurunan hasil tangkapan memunculkan kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pelestarian potensi sumberdaya perikanan yang ada di wilayah Desa Teluk Aur. Jadi dapat dikatakan bahwa pada pra-implementasi ko-manajemen di Desa Teluk Aur berasal dari kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pelestarian sumber daya perikanan, dengan demikian pola awal pada pra implementasi ko-manajemen yang berasal dari “*bottom-up beginnings*” di mana inisiasi ko-manajemen perikanan dilakukan dari dalam komunitas dan *stakeholders* perikanan. Sejalan dengan pendapat Pomeroy and Rivera Guieb (2006), bahwa dalam tahap pra-implementasi ko-manajemen perikanan terdapat dua tipe permulaan yaitu permulaan internal di mana lebih banyak inisiasi ko-manajemen perikanan berasal dari dalam komunitas dan *stakeholders* perikanan dan permulaan *eksternal* di mana inisiasi berasal dari luar komunitas dan *stakeholders* perikanan.

Munculnya kesadaran masyarakat akan berbagai permasalahan di Desa Teluk Aur dibarengi dengan muncul kebijakan ko-manajemen dari pihak pemerintah, sehingga pada tahap pra implementasi ko-manajemen telah terbangun komunikasi antara masyarakat dan lembaga pemerintah. Hubungan ini ditandai dengan adanya proses penyampaian aspirasi, inisiatif dan gagasan terhadap pemerintah mengenai perlunya ditetapkan Danau Aur dan danau pengelang sebagai danau lindung, disamping perlunya dibangun sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan

sumberdaya perikanan di Desa Teluk Aur. Peran tokoh masyarakat dan aparat Desa sangat besar dalam rangka membantu masyarakat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah daerah khususnya instansi terkait yaitu Dinas Perikanan. Hal ini dikarenakan masyarakat tradisional seperti di Desa Teluk Aur masih menghormati tokoh yang mereka anggap sebagai pelopor atau pemimpin yang dapat diteladani. Tokoh masyarakat yang dimaksud disini seperti: tokoh agama, tokoh adat, dan kepala desa.

Keterbatasan pengetahuan dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat di wilayah Desa Teluk Aur, menyebabkan aspirasi dan gagasan yang disampaikan hanya sebatas usulan tanpa proposal yang jelas dan sistematis. Namun Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menyambut hangat aspirasi dan gagasan masyarakat Desa Teluk Aur tersebut. Kemudian pemerintah melalui Dinas Perikanan menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Hubungan baik antara masyarakat dengan pemerintah ini merupakan *social capital* yang sangat berarti dalam mendukung kerjasama yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan bersama. Karena untuk menjamin kelancaran setiap rangkaian proses ko-manajemen sangat dibutuhkan hubungan yang baik antara masyarakat lokal dengan pemerintah atau non pemerintah. Hubungan semua pihak yang berkepentingan dalam ko-manajemen tersebut harus selalu dijaga dan ditingkatkan.

Untuk mengetahui lebih jelas tentang proses pra-implementasi ko-manajemen sumberdaya perikanan di Desa Teluk Aur dapat dilihat pada tabel 1.10 sebagai berikut :

Tabel 1.10  
Pra-Implementasi Ko-manajemen SDP

No	Indikator	Kegiatan Pra-implentasi	Waktu
1.	Kesadaran akan adanya permasalahan terhadap produktivitas SDP	Pertemuan <sup>2</sup> untuk membicarakan masalah dan alternatif pemecahan	Tahun 2002
2.	Kemauan dan motivasi untuk bekerjasama dalam rangka menyelesaikan masalah sumberdaya perikanan	Restocking ikan arwana didanau Teluk Aur, Inisiasi dari masyarakat agar ditetapkannya Danau Teluk Aur sebagai danau lindung	Antara Tahun 2002-2003
3.	Keterbukaan Pemda dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat	Penetapan danau Teluk Aur sebagai Danau Lindung dengan terbitnya SK Bupati No.141 Tahun 2004 dan SK Bupati No.314 Tahun 2007	Tahun 2004-2007

Sumber: Hasil penelitian dilapangan 2013

#### b. Tahap Implementasi

Setelah tahap pra-implementasi dapat dilalui dengan baik, maka selanjutnya proses pelaksanaan atau implementasi ko-manajemen sumberdaya perikanan. Indikator pelaksanaan ko-manajemen dapat dilihat pada tumbuhnya kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama mengelola dan mengatasi permasalahan sumberdaya perairan yang ada di Teluk Aur. Terjalannya hubungan baik antara masyarakat dan pemerintah dimulai dari adanya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat lokal dengan pemerintah daerah dalam hal penyampaian gagasan untuk mengelola dan melestarikan sumberdaya perikanan yang ada secara bersama-sama. Asumsi ini sesuai dengan

pernyataan Edward III dalam Yousa (2007), mengusulkan 4 (empat) variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan salah satunya adalah *Communication* (komunikasi), komunikasi sangatlah penting karena komunikasi diperlukan untuk membentuk persamaan tujuan dan kejelasan instruksi diantara para pelaksana kebijakan. Kemauan dan keterbukaan Pemda untuk menerima dan memperjuangkan aspirasi masyarakat melahirkan kebijakan ko-manajemen.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, tahap implementasi ko-manajemen pengelolaan Perairan umum daratan ini dimulai dari kegiatan identifikasi potensi-potensi yang ada. Pada tahapan ini masyarakat secara bersama-sama melakukan kegiatan identifikasi potensi sumberdaya perikanan yang ada untuk disepakati bersama bagaimana tata cara atau aturan pengelolaan yang akan dilaksanakan nantinya. Hasil kesepakatan antara masyarakat ini kemudian dituangkan dalam petikan hasil keputusan bersama rukun nelayan. Setelah disepakati bersama maka aturan yang telah dibuat harus ditaati oleh seluruh masyarakat Desa Teluk Aur. Untuk lebih jelasnya mengenai potensi sumberdaya perikanan yang teridentifikasi dan disepakati untuk dikelola secara bersama-sama dapat dilihat pada Tabel 1.11 sebagai berikut :

Tabel 1.11 Potensi SDP yang Dikelola

No	Potensi Yang Teridentifikasi	Masyarakat	Pemerintah
1	Wilayah danau Teluk Aur	Menginisiasi Danau Teluk Aur Untuk Dijadikan Danau lindung tahun 2000-2003 Menetapkan aturan-aturan di Danau Aur 2000-2003 Membentuk seksi keamanan dan pengawasan	Menetapkan Danau Teluk Aur Sebagai Danau Lindung Aur (SK Bupati No.141 Tahun 2004)
2	Wilayah Danau Pengelang	Menginisiasi Danau Pengelang Untuk Dijadikan Danau lindung tahun 2004-2007 Menetapkan aturan-aturan di Danau Pengelang 2004 Membentuk seksi keamanan dan pengawasan	Menetapkan Danau Pengelang sebagai Danau lindung Pengelang dengan SK Bupati No.314 Tahun 2007

Sumber: Hasil penelitian di lapangan 2013

Selanjutnya dalam proses implementasi ko-manajemen perairan umum daratan, juga dilakukan penguatan kelembagaan dan organisasi masyarakat. Kelembagaan ini berfungsi sebagai wadah pengambilan keputusan serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola dan mengawasi Perairan umum daratan yang ada di Desa Teluk Aur. Pengelolaan Perairan umum daratan ini termasuk dalam mengalokasi, mengatur pengelolaan dan pemeliharaan. Upaya-upaya untuk menerapkan prinsip ko-manajemen merupakan salah satu bentuk kemitraan antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menghargai kelembagaan atau organisasi masyarakat

yang ada sehingga salah satu unsur akar budaya masyarakat lokal tersebut dapat terangkat dan dijadikan nilai-nilai yang mengatur proses ko-manajemen. Kenyataan ini selaras dengan pernyataan Nikijuluw (2002:148-158), bahwa dalam membangun dan mengembangkan organisasi masyarakat perlu diketahui organisasi masyarakat apa saja yang tersedia, apa tujuannya, apa visi dan misinya, siapa yang menjadi keanggotaannya, bagaimana kegiatannya selama ini, dan adakah kegiatannya yang berhubungan dengan sumberdaya perikanan. Bila memang ada, organisasi tersebut bisa dikembangkan sebagai organisasi masyarakat yang memiliki tanggung jawab dalam ko-manajemen.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Perairan Dinas Perikanan mengatakan :

“Dalam pengelolaan perairan umum daratan organisasi pengawasan sangat diperlukan untuk mengawasi perairan yang ada tentunya organisasi ini dibentuk oleh masyarakat dan diresmikan oleh pemerintah”

Ketika ditanya siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pengelolaan perairan umum daratan di Desa Teluk Aur, Tokoh masyarakat mengatakan:

“yang terlibat dalam pengawasan seluruh masyarakat bu...macam kami dituk yang tinggal dikawasan danau lindung pengelang semua kami dirumah betang iyak meh selain yak ada gak organiasi yang dibentuk masyarakat dengan pemerintah”

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteks ko-manajemen perikanan bahwa penguatan kelembagaan yang diorganisasi adalah Lembaga Kontak Tani Nelayan (LKTN), yaitu suatu bentuk kelembagaan ko-manajemen yang dalam pengelolaan sumber-daya

perikanannya berbasis masyarakat. LKTN ini diharapkan sebagai wadah pengambil keputusan dan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta sebagai penengah dan penyelesaian masalah yang muncul dalam upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan. Didalam LKPN itu sendiri terdiri dari beberapa seksi, yaitu seksi rukun nelayan, seksi danau lindung, seksi pokmaswas danau lindung, dan seksi perairan umum.

Ditinjau dari ko-manajemen Perairan umum daratan di Desa Teluk Aur antara lain dilakukan terhadap kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan penangkapan ikan. Pengelolaan dan pemanfaatan pada aspek penangkapan ikan dimaksudkan adalah pengelolaan yang ditujukan kepada hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas penangkapan ikan, seperti izin penangkapan ikan, penutupan musim, daerah perlindungan suatu populasi, pengaturan mata jaring yang digunakan dan pelarangan penggunaan alat tangkap tertentu sudah ditentukan dalam hukum adat yang disepakati dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa Teluk Aur :

“ Hukum disini masyarakat endiri yang ngawai ya bu dalam peraturan adat disitu tertulis hukum yang jelas tentang pelanggaran tergantung kepada tingkat kesalahan yang di buat..dengan adanya peraturan adat ini sangat membantu dalam proses pelestarian perairan umum daratan Desa ini”

Pada prinsipnya tindakan pengelolaan yang dilakukan, bertujuan memanfaatkan sumberdaya perikanan yang ada pada perairan Teluk Aur secara berkesinambungan atau dengan kata lain dimanfaatkan tetapi tetap memelihara kelestariannya.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses implementasi di Desa Teluk Aur dalam pengelolaan perairan umum daratan sudah berjalan baik sesuai dengan tujuan awal pengelolaannya, yaitu pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan dengan sebaik-sebaiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan dan petani ikan kecil serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya yang akan meningkatkan ketahanan daerah dalam menuju terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana hasil petikan wawancara dengan Kepala Desa Teluk Aur mengatakan :

“ Hubungan kerjasama kami dengan Dinas perikanan sudah berjalan dengan baik tentunya kerjasama dalam pengelolaan perairan”

Selanjutnya dikatakan oleh Kasi Pemerintahan Bunut Hilir :

“ Begini bu..kesejahteraan masyarakat di Desa Teluk Aur sekarang ini udah dibilang cukup sejahtera bila dibandingkan dulu sebelum ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dulu dalam mengelola perairan masyarakat mengelolanya ya..dengan pengetahuan sidak meh, tapi sekarang bisa dilihat dengan adanya kerjasama perlahan tapi pasti masyarakat mulai mengerti bagaimana cara mengelola alamnya terutama sungai dan danau dengan efektif”

Implementasi ko-manajemen pengelolaan perairan umum daratan, dari aspek pelestarian sudah berjalan baik, ini ditandai dengan semakin berkembangnya kegiatan pelestarian yaitu melalui kegiatan restocking terhadap ikan arwana di Danau Lindung Aur maupun danau lindung pengelang serta tetap diberlakukannya pengelolaan terhadap penangkapan ikan.

Tabel 1.12  
Program Pemerintah dalam Kegiatan pengelolaan perairan umum  
di Desa Teluk Aur dalam bentuk kerjasama yang teridentifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana	Tahun
1.	Penetapan Danau Teluk Aur sebagai Danau Lindung (SK Bupati No.141 Tahun 2004)	Pemerintah Daerah kabupaten Kapuas Hulu	Tahun 2004
2.	Sosialisasi peraturan Perundang-undangan No 31 Tahun 2004	Dinas Perikanan dan DKP Prov.Kal-bar	Tahun 2004
3.	Pertemuan Rukun Nelayan Di danau Vega ( beberapa peserta merupakan pengurus RN dan Pokmaswas)	Dinas Perikanan dan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia)	Tahun 2005
4.	Pertemuan Rukun Nelayan Di Pulau majang ( beberapa peserta merupakan pengurus RN dan Pokmaswas)	Dinas Perikanan dan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia)	Tahun 2006
5.	Pelatihan Ko-manajemen pengelolaan sumberdaya perairan	Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu dan DKP Provinsi Kal-bar	Tahun 2007
6.	Pertemuan Rukun Nelayan Di Selimbau( beberapa peserta merupakan pengurus RN dan Pokmaswas)	Dinas Perikanan dan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia)	Tahun 2008
7.	Pembangunan Pos jaga	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Perikanan	Tahun 2009
8.	Restocking ikan Arwana di Danau Lindung Aur (2009) dan Danau Lindung pengelang Tahun 2013	Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui Dinas Perikanan	Tahun 2009-2013
9.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah No. 8 tahun 2009)	Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Tahun 2009-2010
10.	Pembangunan Pos Pengawasan KKP	Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Tahun 2009
11.	Pembangunan Shelter	Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Tahun 2013
12.	Bantuan alat tangkap ikan, Cool Box, keramba jaring apung, kolam budi daya, bantuan bibit ikan serta alat pengolahan ikan	Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu	Tahun 2009-2013

Sumber: diolah dari hasil penelitian 2013

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai proses implementasi pelaksanaan ko-manajemen perairan umum daratan di Teluk Aur, maka dapat disimpulkan bahwa proses implementasi dimulai dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil proses implementasi terdiri dari hasil kebijakan yang segera atau disebut sebagai "*policy performance*", secara konkrit antara lain dapat kita lihat jumlah dan isi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan masyarakat dalam jangka waktu tertentu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan Teluk Aur. Perubahan dalam taraf hidup dan kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut juga sebagai "*policy outcome*" atau "*policy impact*".

### c. Pasca Implementasi

Pasca implementasi merupakan tahap pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi menjadi elemen paling utama dari keseluruhan implementasi ko-manajemen sumberdaya perikanan didesa Teluk Aur. Karena dengan evaluasi maka kelemahan dan kekuatan ko-manajemen dapat diketahui, selain itu hasil evaluasi juga bisa merupakan umpan balik bagi pembaharuan dan perbaikan ko-manajemen. Evaluasi ini seyogyanya dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah dengan masyarakat. Seperti yang dikemukakan Pameroy and Rivera Guieb (2006), bahwa kegiatan pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat serta pemegang kepentingan lainnya.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan ko-manajemen Perairan umum daratan dalam hal ini sumber daya perikanan di Desa Teluk Aur sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, walaupun dalam hal pemantauan dan evaluasi pengelolaan Perairan Umum daratannya di Desa Teluk Aur, masyarakat atau *usergroup* yang lebih banyak dalam hal pemantauan dan evaluasi. Hal ini ditandai oleh Pelaksanaan Rapat Akbar setiap tahun atau tepatnya tanggal 1 di Bulan Januari oleh masyarakat Desa Teluk Aur. Pelaksanaan Rapat akbar ini biasanya dihadiri hampir seluruh masyarakat di Desa Teluk Aur selama kurang lebih 3-4 hari. Dalam rapat akbar ini wacana yang diangkat yaitu mengenai evaluasi terhadap peraturan-peraturan adat, pertanggungjawaban dana hasil-hasil lelang pengelolaan sungai disekitar danau Pengelang, dana hasil prosentase penjualan anakan ikan arwana oleh masyarakat, penentuan jadwal pembukaan penangkapan anak ikan Arwana, rencana-rencana aksi lainnya dalam kegiatan pengelolaan perairan umum daratannya serta mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Ditingkat Pemerintah Daerah kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ko-manajemen perairan umum daratannya ini, biasanya dihadiri oleh Aparat Desa Selaku Pemerintah ditingkat bawah. Kantor Perikanan selaku salah satu *stakeholder*, biasanya hanya menerima hasil evaluasi berdasar informasi berupa laporan hasil kegiatan evaluasi dan juga berupa usulan-usulan/proposal. Hal ini sesuai dengan pendapat Pameroy and Guieb (2006) bahwa terdapat 5 (lima) tipe besar ko-

manajemen menurut peran dari pemerintah dan pelaku perikanan salah satunya ialah tipe *Informatif* dimana pemerintah mendelegasikan pengambilan keputusan kepada pelaku perikanan untuk kemudian diinformasikan kembali kepada pemerintah. Proposal dan usulan oleh pelaku perikanan di *crosscheck* kembali dengan kondisi yang ada dilapangan. Usulan-usulan tersebut nantinya akan dimasukkan kedalam Usulan RENJA kantor perikanan pada tahun berikutnya, dan menjadi program yang akan dilaksanakan.

Seperti cuplikan wawancara dengan Sekretaris Dinas Perikanan :

“Proses penyampaian aspirasi masyarakat biasanya melalui kunjungan kerja Pemerintah Daerah, ada juga yang menyampaikan aspirasinya lewat pegawai kita yang melakukan pembinaan kesana, ada juga lewat proposal yang disampaikan ke Dinas Perikanan ini”

Lebih lanjut Pegawai Dinas Perikanan mengatakan:

“untuk jenis bantuan yang diberikan bermacam-macam biasanya bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan, alat bantu pengolahan dan masih banyak lagi bu tergantung permintaan masyarakat dan progam masing-masing bidang”

Untuk memudahkan pemahaman kita mengenai monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan pelaku pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pemerintah daerah disimpulkan melalui Tabel 1.13 sebagai berikut :

Tabel 1.13  
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi antara  
Pemerintah dan Masyarakat

No.	Monitoring dan Evaluasi	Pegawai Sumberdaya (Ureagrip)	Pemerintah
1.	Peraturan-peraturan adat	Diubah jika ada kondisi yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dan tidak sesuai dengan kondisi yang ada dimasyarakat. Peraturan-peraturan adat ini mempunyai konsukuensi yang harus tetap dilaksanakan karena sudah merupakan keputusan bersama seluruh masyarakat desa Teluk Aur.	Memberikan informasi-informasi mengenai produk-produk hukum formal (Perbup, Perda, Perpres dan UU)
2.	Pertanggung jawaban Dana Hasil Lelang Sungai dan Hasil Penjualan	Mempertanggung jawabkan Penggunaan Anggaran oleh Pengurus Danau lindung dan Sungai kepada seluruh masyarakat. Pertanggungjawaban ini sangat terperinci dalam hal penggunaan anggaran.	Hanya bersifat mengarahkan dari segi administrasi tetapi keputusan akhir penggunaan ada pada masyarakat dan pengurus
3.	Jadwal penangkapan Anak Ikan Arwana	Jadwal ditentukan berdasarkan pengalaman kapan ikan tersebut akan keluar dari mulut induk ikan	Pemerintah Daerah yaitu Dinas Perikanan, Aparat Desa dan Aparat kecamatan hadir pada saat pembukaan kapan pembukaan dan penutupan penangkapan ikan arwana
4.	Permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam hal pengelolaan perairan umum daratannya	Bersama-sama seluruh masyarakat mencari Solusi dan memutuskan	Menerima Informasi saja berupa laporan
5.	Usulan-usulan dan rencana Program kegiatan kedepan	Membuat usulan-usulan kegiatan kedepan melalui dana hasil pengelolaan dan mengajukan usulan kepemerintah daerah	Menerima usulan/Proposal, <i>Crosscheck</i> kembali dan mengusulkan melalui RENJA pada tahun berikutnya

Sumber: Hasil Penelitian 2013

Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah, mempunyai tujuan untuk melihat apakah kegiatan pelaksanaan ko-manajemen perairan umum daratnnya di Desa Teluk aur sudah berjalan dan sesuai dengan tujuan awal dari pengelolaan perairan umum daratnnya. Kriteria-kriteria yang dilihat adalah Produktivitas, Keberlanjutan dan Pemerataan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, hal ini sejalan dengan pendapat Nikijuluw (2002:194) bahwa kriteria suatu sistem ditentukan oleh kinerja pelaksanaan dan penerapan sistem berdasarkan pada kriteria tertentu, seperti Efisiensi (*produktivitas*), Keberlanjutan dan Pemerataan.

## **2. Peranan Ko-Manajemen Perairan Umum Daratan di Desa Teluk**

### **Aur**

Tujuan utama pelaksanaan ko-manajemen perairan umum daratan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh masyarakat secara berkelanjutan, baik itu dari segi peningkatan produktivitas SDI, pendapatan, pendidikan, **menumbuhkan kelembagaan masyarakat yang kuat**, menumbuh kemandirian masyarakat dengan **berdasar** pada rasa percaya diri dan motivasi yang tinggi, serta mewujudkan suatu kondisi awal mengarah pada pengembangan kawasan perikanan terpadu (*integrated fisheries zone*).

Sesuai dengan tujuan diatas, dibawah ini dapat dilihat perubahan yang terjadi di masyarakat dari aspek tingkat pendapatan, pendidikan formal dan informal, kesadaran masyarakat, motivasi, kreativitas dan kemandirian, dan kemitraan setelah dilaksanakan ko-manajemen Perairan umum daratan.

### **a. Pendapatan Nelayan**

Dari hasil penelitian diketahui bahwa hasil penangkapan ikan oleh nelayan Teluk Aur dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, hasil tangkapan yang semula 469,237 kg/Tahun pada tahun 2011 meningkat menjadi 525,368 kg pada tahun 2013.

Terdapat bukti yang kuat bahwa daerah yang dikelola atau diatur memiliki produktivitas perairan yang tinggi, hal ini dikarenakan pada zona inti/larangan penangkapan (perlindungan) memiliki persediaan ikan yang lebih besar, ukuran ikan yang lebih besar serta komposisi spesies yang lebih beragam (spesies ikan komersial berukuran lebih besar) bila dibandingkan dengan zona pemanfaatan/wilayah penangkapan. Sehingga dampak wilayah perlindungan ikan tersebut, tidak diragukan lagi akan memberikan pasokan telur dan anak ikan untuk wilayah penangkapan sekitarnya. Hal ini terlihat dari banyaknya nelayan-nelayan yang melakukan penangkapan ikan disekitar batas antara zona penangkapan dengan zona inti atau zona terlindungi. Kecenderungan nelayan untuk memfokuskan kegiatan penangkapan di dekat wilayah perlindungan (*fishing the line*) menunjukkan bukti manfaat dari kawasan perikanan yang terlindungi bagi perikanan komersial.

### **b. Kesadaran masyarakat menjaga dan melestarikan sumberdaya ikan.**

Pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor perikanan di Desa Teluk Aur pada dasarnya mengacu pada upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan yang ada, dengan tetap memperhatikan pelestarian sumberdaya ikan dan lingkungan. Munculnya ko-manajemen

di Desa Teluk Aur dilatarbelakangi oleh kesadaran masyarakat dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah secara bersama dengan memanfaatkan potensi sumberdaya perairan yang tersedia, disamping potensi sumberdaya manusianya. Karena itu menjaga dan memelihara kelestariannya merupakan kegiatan yang diprioritaskan dalam setiap ko-manajemen, tidak terkecuali di Desa Teluk Aur, dimana tugas dan tanggung jawab menjaga dan melestarikan sumberdaya ikan berada ditangan masyarakat sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat.

Perda Kabupaten Kapuas Hulu No. 8 Tahun 2009 Pasal 8 Ayat (1) dan (2) tentang Pengelolaan dan Pengawasan Konservasi Sumberdaya Ikan di Perairan Umum Kabupaten Kapuas Hulu menyatakan bahwa: (1) Dalam rangka pemanfaatan yang bijaksana terhadap sumberdaya ikan sehingga menjamin kelangsungan hidup ikan, produktifitas yang berkesinambungan dan tidak punahnya spesies-spesies ikan di perairan pedalaman Kapuas Hulu perlu untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat di lingkungan perairan umum dan kawasan konservasi sumberdaya ikan. (2) menyatakan bahwa pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersama-sama antara masyarakat, pemerintah daerah, kepolisian dan semua *stakeholder* yang berkepentingan terhadap sumber daya ikan maupun karena tugas yang telah diamanatkan padanya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kesadaran dan tanggung jawab masyarakat desa Teluk Aur dalam menjaga dan melestarikan sumberdaya perairan dalam konteks ko-manajemen sangat

tinggi, hal ini terlihat dari antusias dan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan perairan umum daratnnya yang ada. Salah satu kegiatan yang nyata yang merupakan inisiasi awal dalam hal melestarikan dan mengelola perairan umum daratan ialah kegiatan *restocking* ikan arwana di perairan danau Aur dan danau pengelang yang merupakan hasil dari pengumpulan dana di setiap warga Desa Teluk Aur. Selain itu kesadaran dan tanggung jawab masyarakat menjaga dan melestarikan sumberdaya perikanan yang ada, ialah masyarakat secara bersama-sama merumuskan aturan adat/lokal. Hasil rumusan tersebut kemudian dituangkan kedalam kutipan peraturan adat/ peraturan hasil musyawarah rukun nelayan yang kemudian dikoordinasikan kembali kepada pemerintah daerah.

Sebagai tindaklanjut dari ko-manajemen pengelolaan perairan umum daratan khususnya dalam hal pengaturan peraturan adat/kearifan lokal, Pemerintah memasukkan pasal mengenai kearifan lokal pada Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No. 8 tahun 2009, pasal 15 (kearifan lokal) ayat 1, 2 dan 3 berbunyi: Ayat (1): Dalam rangka pemanfaatan yang bijaksana terhadap sumberdaya ikan sehingga menjamin kelangsungan hidup ikan, produktifitas yang berkesinambungan dan tidak punahnya spesies-spesies ikan di perairan pedalaman Kapuas Hulu, maka setiap kelompok masyarakat diperbolehkan membuat aturan adat, aturan lokal atau kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat (2) Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili

di wilayah hukum adat dan masyarakat pendatang diharuskan untuk mentaati hukum adat atau kearifan lokal yang dibuat oleh masyarakat setempat. Ayat (3) Pemerintah menghargai setiap hukum adat atau kearifan lokal yang dibuat oleh masyarakat sepanjang hukum adat atau kearifan lokal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Hal ini kemudian dipertegas kembali didalam UU No 31 tahun 2004 tepatnya pada pasal 6 ayat 2 yang menyatakan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan/atau kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.

Konskuensi dari penetapan peraturan adat di Teluk Aur, maka peraturan adat harus dipatuhi dan diterapkan seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Dari beberapa kasus pelanggaran yang dilakukan masyarakat, peraturan adat ini mempunyai peranan yang kuat dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran yang terjadi, karena peraturan adat merupakan hasil keputusan bersama dan diketahui oleh seluruh masyarakat.

### **c. Program Kemitraan dalam Pemanfaatan perairan umum daratan**

Untuk menentukan indikator keberhasilan ko-manajemen perairan umum daratan adalah dengan melihat terbentuknya program kemitraan dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan yang ada. Indikator ini diukur dengan melihat bagaimana efisiensi dan intensitas program kemitraan dalam menunjang kegiatan masyarakat lokal Dahuri dalam Nikijuluw (2002:198).

Program kemitraan yang terbentuk secara umum adalah dilaksanakannya kegiatan Pelestarian Ikan Arwana secara bersama-sama melalui kegiatan Restocking. Pada Kegiatan ini yang menjadi *stakeholder* atau pemegang kepentingan adalah masyarakat nelayan Desa Teluk Aur dengan Pemerintah Daerah kabupaten Kapuas Hulu yang dilaksanakan oleh Kantor Perikanan (sekarang Dinas Perikanan) sebagai lembaga teknisnya. Oleh karena kedua belah pihak merupakan *stakeholder* yang berkepentingan maka terjalin hubungan kerjasama dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, dimana kedua belah pihak dapat saling menutupi kelemahan masing-masing. Karena menurut Nikijuluw (2002:110-111) baik pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis masyarakat (PSPBM) maupun pengelolaan sumberdaya perikanan oleh pemerintah memiliki kelemahan masing-masing. Sehingga perlu penginterasian kedua rezim pengelolaan sumberdaya perikanan tersebut dengan jalan kolaborasi manajemen, kooperasi manajemen, atau ko-manajemen.

Pada Intinya program pengelolaan sumberdaya perikanan di Desa Teluk Aur dilaksanakan dalam rangka ko-manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan menerapkan sistem kemitraan antara pihak yang kuat (*power*) dengan pihak yang lemah (*powerless*). Karena itu perlu adanya proses interaksi antara kedua pihak dalam rangka memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan kepada masyarakat (*powerless*) agar individu yang bersangkutan menjadi lebih berdaya.

### **3. Faktor-faktor Pendukung Keberhasilan Ko-manajemen di Teluk Aur**

#### **a. Semangat dan Partisipasi Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa Teluk Aur diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ko-manajemen Perairan umum daratan sangat tinggi, hal ini terungkap dari beberapa informasi yang diperoleh dalam penelitian. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat nelayan dalam pelaksanaan ko-manajemen disebabkan karena dilatarbelakangi oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian sumber daya perikanan yang ada di wilayah Danau Lindung maupun sungai yang ada. Hal tersebut disebabkan karena rendahnya produktivitas sumberdaya perairan diwaktu dulu yang berimbas terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan, sehingga menggugah masyarakat untuk mengubah pola pemanfaatan sumberdaya perikanan serta mengoptimalkan potensi yang tersedia. Namun karena keterbatasan kemampuan masyarakat baik dari ketrampilan, pengetahuan, teknologi maupun sarana dan prasarana pengelolaan sumberdaya perikanan, mereka kemudian meminta bantuan dan intervensi pemerintah dalam memperkuat daya untuk mengakses kebutuhan tersebut, yang pada akhirnya terbentuk kerjasama atau ko-manajemen dalam mengelola sumberdaya perikanan di Teluk Aur.

Ditambah lagi keberhasilan pembinaan instansi terkait terhadap pengelolaan perairan umum daratan memotivasi pegawai dinas perikanan untuk melakukan pembinaan lebih baik lagi.

Inti dari pelaksanaan ko-manajemen adalah pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan masyarakat lokal dalam mengelola sumberdaya perikanan. Seperti yang dikemukakan oleh Borrini-Feyabarend, *et al.* dalam Adrianto (2007) bahwa, ko-manajemen adalah sebuah situasi di mana lebih dari satu pihak (*stakeholders*) bernegosiasi, mendefinisikan dan menjamin pembagian peran dalam pengelolaan dan tanggung jawab di antara mereka terhadap sebuah area atau sistem sumberdaya. Pembagian peran ini dapat terlaksana apabila ada kemauan masyarakat untuk mengemban tanggung jawab dan menjalankan wewenang tersebut berdasarkan ketentuan yang telah disepakati bersama. Konsukuensinya harus tumbuh partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan sumberdaya perikanan mulai dari tahap perencanaan sampai pengawasan. Seperti yang dikemukakan oleh Davis dalam Ndraha (1987:37), bahwa partisipasi sebagai suatu dorongan mental dan emosional yang menggerakkan mereka untuk bersama-sama mencapai tujuan dan bersama-sama bertanggung jawab.

Indikator partisipasi masyarakat nelayan di Desa Teluk Aur dalam pelaksanaan kegiatan ko-manajemen sumberdaya perikanan dapat dilihat dari intensitas dan tingkat kehadiran masyarakat dalam setiap pertemuan, keaktifan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan saran terhadap pemerintah, kreativitas dan kemandirian nelayan dalam pengelolaan sumberdaya perikanan dalam konteks ko-manajemen. Hal ini menunjukkan terjadi dua bentuk partisipasi masyarakat di Desa Teluk

Aur yakni *partisipasi horizontal* maupun *partisipasi vertical*. Pernyataan ini sama dengan yang dikatakan oleh Nelson dalam Bryant and White (1982:206), menyebutkan dua macam partisipasi yaitu partisipasi antara sesama warga atau anggota suatu perkumpulan yang dinamakan *partisipasi horizontal* dan partisipasi yang dilakukan oleh bawahan dan atasan, antara *Klien* dan *Patron*, atau antara masyarakat sebagai suatu keseluruhan dengan pemerintah yang diberi nama *partisipasi vertical*.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa faktor tingginya partisipasi masyarakat yang terlibat dalam ko-manajemen dikarenakan masyarakat mempunyai tujuan atau misi utama untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya perairan, yang nantinya akan berimbas terhadap peningkatan pendapatan mereka. Pernyataan ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Pomeroy dan Williams (1994:15), bahwa keberhasilan ko-manajemen sumberdaya perikanan lebih bergantung kepada keterlibatan atau partisipasi pemegang kepentingan (*stakeholders*). Jika nelayan adalah salah satu pemegang kepentingan, biarkanlah mereka memutuskan sendiri keinginan dan tujuannya. Jika tujuannya untuk meningkatkan pendapatan, hal tersebut harus ditempatkan sebagai salah satu tujuan pengelolaan sumberdaya perikanan. Dan jika pemerintah (pusat maupun daerah) adalah salah satu pemegang kepentingan biarkanlah mereka memutuskan sendiri keinginan dan tujuannya. Jika menurut mereka tujuannya adalah peningkatan pendapatan masyarakat dan pengurangan insiden kemiskinan, hal tersebut harus diikuti juga sebagai tujuan pengelolaan sumberdaya perikanan.

## **b. Organisasi Kemasyarakatan**

Seperti diketahui bahwa sebelum dilaksanakannya ko-manajemen Perairan umum daratan di Desa Teluk Aur antara masyarakat lokal dan pemerintah, di Desa Teluk Aur telah berlangsung pengelolaan perairan umum daratan khususnya pengelolaan sungai dan danau dengan menggunakan hukum adat setempat walaupun tidak tertulis. Hal ini menandakan bahwa pengelolaan sumberdaya perikanan sudah merupakan tradisi dan budaya mereka. Di dalam ko-manajemen ada ketentuan bahwa untuk memperkuat keberdayaan masyarakat nelayan di desa Teluk Aur maka unsur pertama yang diangkat dan diprioritaskan adalah unsur tradisi, budaya, dan potensi masyarakat tersebut. Karena dengan demikian setiap bentuk intervensi akan sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat sehingga pengakuan dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kegiatan pengelolaan akan semakin tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kelembagaan atau organisasi yang ada di masyarakat nelayan di Desa Teluk Aur terbentuk karena dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan bersama masyarakat untuk mengelola sumberdaya perikanan, walaupun masih tidak teratur dan terarah. Kemudian dengan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah di Desa Teluk Aur, kelembagaan yang sudah ada dibenahi kembali dengan saling berkoordinasi. Peran Lembaga Kontak Tani Nelayan (LKTN) dalam pelaksanaan ko-manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan di Desa Teluk Aur sangat besar, hal ini dikarenakan legalitas LKTN ditengah masyarakat di akui keberadaannya.

Selain itu proses terbentuknya kelembagaan ini didasarkan oleh aspirasi masyarakat Desa Teluk Aur yang berlangsung secara demokratis, sehingga secara otomatis masyarakat harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam LKTN ini.

Seperti yang disampaikan oleh Ismail (2001:215-217), bahwa salah satu faktor eksternal yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas petani sebagai bagian dari pemberdayaan petani adalah tersedianya kelembagaan di masyarakat. Oleh karena itu kelembagaan kelompok tani-nelayan perlu terus didorong dan ditumbuh kembangkan sebagai ujung tombak dari pelaksanaan pembangunan perikanan. Adanya kelembagaan di masyarakat nelayan berupa nilai-nilai kebersamaan dalam berusaha, keterampilan nelayan maupun semangat kerja keras yang terbentuk dari perjuangan merintis usaha pengelolaan merupakan potensi dasar terbentuknya kelembagaan yang murni berasal dari inisiatif masyarakat.

Secara garis besar peranan keberadaan kelembagaan dan organisasi masyarakat di Desa Teluk Aur dalam mendorong tercapainya keberhasilan ko-manajemen, peranan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Kelembagaan nelayan di Desa Teluk Aur merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat setempat, karena lahir dari adanya dampak perjuangan nelayan melawan ketidakberdayaan menggapai sumberdaya.
- 2) Lembaga Kontak Tani Nelayan di Desa Teluk Aur merupakan lembaga pengambilan keputusan di tingkat nelayan dalam rangka

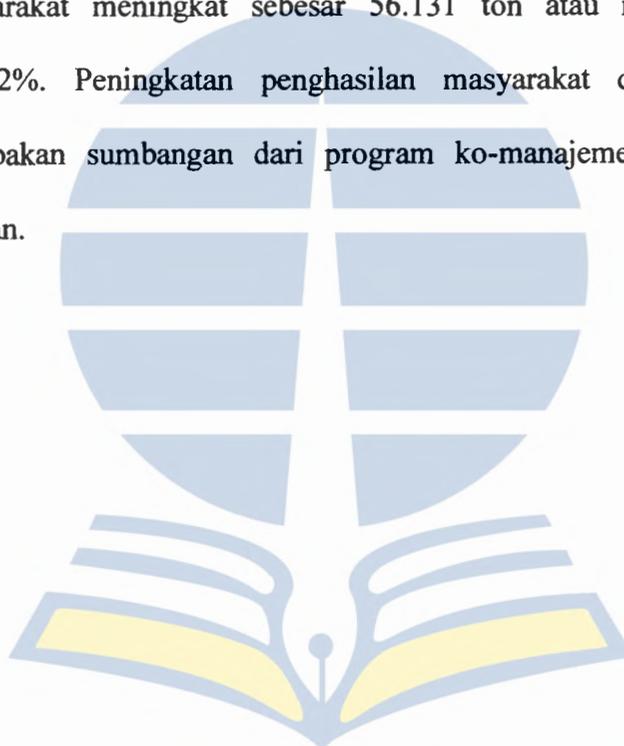
partisipasi terhadap perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sektor perikanan di Desa Teluk Aur, khususnya bagi pengelolaan sumberdaya perikanan.

- 3) Lembaga Kontak Tani Nelayan di Desa Teluk Aur juga berfungsi sebagai tempat pertemuan, diskusi atau dialog baik diantara sesama masyarakat, dengan masyarakat luar atau dengan pihak pemerintah.
- 4) Kelembagaan di Desa Teluk Aur merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian masalah atau konflik.
- 5) Kelembagaan di Desa Teluk Aur adalah pusat pengelolaan bantuan atau proyek dari luar, sehingga proyek tersebut dapat lebih efisien dan efektif.

Dengan berjalannya beberapa peran kelembagaan diatas dengan baik, maka memberi pengaruh terhadap keberhasilan ko-manajemen pengelolaan sumberdaya perikanan khususnya bagi keberhasilan dalam pelestarian sumberdaya perikanan di Desa Teluk Aur. Hal ini selaras dengan pendapat Pomeroy dalam Yakin (2003:62-63) bahwa ko-manajemen akan berhasil apabila didukung tersedianya organisasi dan kelembagaan di masyarakat. Atau dengan kata lain ko-manajemen biasanya berhasil didaerah dimana nelayan atau petani telah sebelumnya memiliki pengalaman dalam mengelola sumberdaya perikanan berdasarkan atas tradisi dan budaya mereka.

### c. Peningkatan Pendapatan Masyarakat

Seperti diungkap oleh Dinas Perikanan Kab. Kapuas Hulu tentang perkembangan hasil penangkapan ikan di desa Teluk Aur, bahwa telah terjadi peningkatan penghasilan masyarakat. Jika pada tahun 2011 hasil tangkapan sebanyak 469,237 ton, kemudian pada tahun 2013 peningkatan pendapatan masyarakat menjadi 525,368 Ton. Hal ini berarti jika dihitung selisih pendapatan dari tahun 2011 sampai 2013 pendapatan masyarakat meningkat sebesar 56.131 ton atau meningkat sebesar 11.962%. Peningkatan penghasilan masyarakat disektor perikanan merupakan sumbangan dari program ko-manajemen perairan umum daratan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang ko-manajemen perairan umum daratan di wilayah Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Kabupaten Kapuas Hulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Proses ko-manajemen pengelolaan perairan umum daratan yang ada di Desa Teluk Aur bermula dari menurunnya penghasilan penduduk dari sektor perikanan. Mengurangnya jumlah persediaan ikan di Danau dan sungai disebabkan eksploitasi yang berlebihan mengakibatkan menurunnya sumber mata pencaharian penduduk dan berimbas pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Program yang telah dilakukan pemerintah dalam pengelolaan perairan umum daratan di Desa Teluk Aur meliputi Pembinaan dalam mengelola sungai dan danau ,Restocking ikan, serta bantuan pembangunan maupun bantuan lainnya.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa hasil penangkapan ikan oleh nelayan Teluk Aur dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 hasil tangkapan yang semula 469,237 ton/Tahun pada tahun 2011 meningkat menjadi 525,368 ton pada tahun 2012.

Terdapat bukti yang kuat bahwa daerah yang dikelola atau diatur memiliki produktivitas perairan yang tinggi, hal ini dikarenakan pada zona inti/larangan penangkapan (perlindungan) memiliki persediaan ikan yang lebih besar, ukuran ikan yang lebih besar serta komposisi spesies yang lebih beragam (spesies ikan komersial berukuran lebih besar) bila dibandingkan dengan zona

pemanfaatan/wilayah penangkapan. Sehingga dampak wilayah perlindungan ikan tersebut, tidak diragukan lagi akan memberikan pasokan telur dan anak ikan untuk wilayah penangkapan sekitarnya.

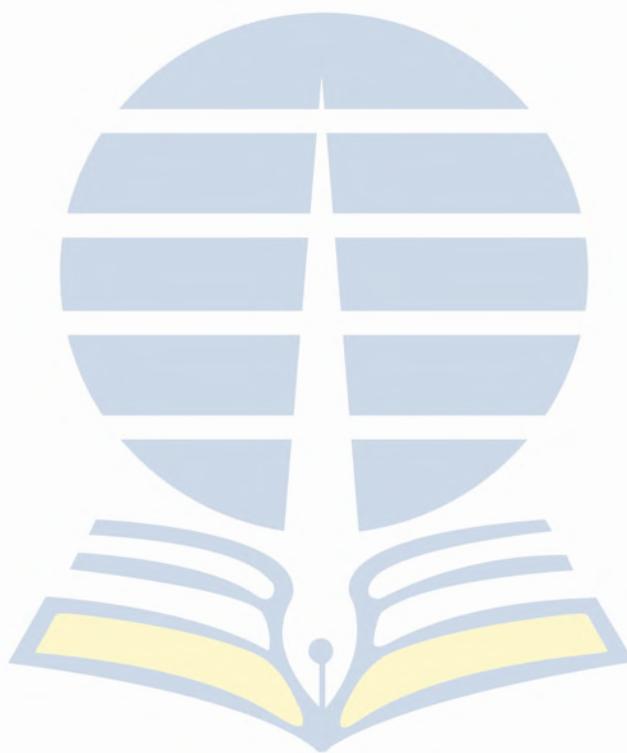
Berdasarkan hasil temuan dilapangan diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi kegiatan ko-manajemen sumberdaya perikanan di Desa Teluk Aur sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, walaupun dalam hal pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumberdaya perikanan di Desa Teluk Aur, masyarakat atau *usergroup* yang lebih banyak dalam hal pemantauan dan evaluasi.

## **B. Saran**

Pelaksanaan ko-manajemen perairan umum daratan terutama pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah Desa Teluk Aur perlu ditingkatkan. Kesadaran dan antusias masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan khususnya dalam menjaga kelestarian populasi ikan yang ada di danau lindung sangat besar. Program kemitraan ini dalam wujud ko-manajemen wilayah perairan Danau Lindung perlu ditingkatkan kearah memberdayakan masyarakat sesuai kearifan lokal yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa Teluk Aur merupakan salah satu desa yang bisa dijadikan contoh dalam pengelolaan sumber daya alamnya, masyarakat yang arif dan bijak dalam mentaati peraturan yang dibuat membawa masyarakat Desa ini ke arah kemajuan dalam era moderenisasi. Dalam penelitian ini pembelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya bersatu dalam membangun Desa dengan

memanfaatkan sumber daya alam dan mematuhi peraturan yang disepakati bersama demi memajukan Desa.



## DAFTAR PUSTAKA

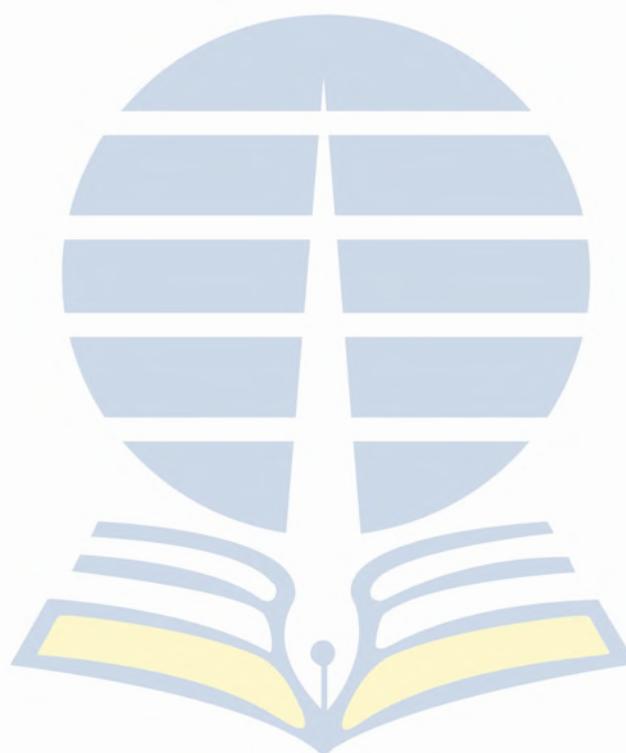
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi VI*. Jakarta : Asdi Mahasatya
- Armitage.D, Berkes.F, Doubleday.N, (2007). *Adaptive co-managemen*. Jurna Introduction moving beyond co managemen. Hal.3
- Aryono, Budi. (2004). *Kajian Peran Pengembangan Pariwisata Bahari Terhadap Kesejahteraan Nelayan di Pulau karimunjawa dan Pulau Kemujan Kabupaten Jepara*. Semarang: Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.
- Alimul Hidayat, Aziz. (2009). *Metode Penelitian Keperawatan dan Tekhnik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika.
- Barnawi & Arifin, M. (2012). *Manajemen sarana dan prasarana sekolah*. Yogyakarta: Arruz Media
- Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum. (2011). *Dukungan Iptek untuk Bisnis Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan Perairan Umum Daratan*. Palembang : Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum Daratan.
- Bejo, Siswanto. (2003). *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif Dan Operasional*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Borrini-Feyerabend. (2000). *Co-management of Natural Resources: Organising, Negotiating and Learning by Doing*. IUCN. Yaounde Cameroon
- Borrini-Feyerabend. (1996). *Collaborative Management of Protected Area: Tailoring the Approach to the Context*. Social Policy Group, IUCN.
- Bungin, Burhan. (2003). *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dahuri, R. (1998). *Kebutuhan Riset untuk mendukung Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Secara Terpadu*. *Jurnal Pesisir dan Lautan*, V 1, No. 2
- Faisal, Sanapiah. (2005). *Format-format Penelitian Sosial (Dasar-dasar dan Aplikasi)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hamid, A.,(2011). *Tesis Pelaksanaan Ko Manajemen Sumber Daya Perikanan di Desa Empangau Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu*.
- Hasibuan, Malayu S.P, (2005). *Organisasi & Motivasi*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Hasibuan, Malayu S. P. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

- Hidayat M. M., dan Surochiem As.,..., *Pokok-pokok Strategi Pengembangan Masyarakat Pantai Dalam Mendorong Kemandirian Daerah*, <http://www.hangtuah.ac.id/Barudepan/Humas/artikel.htm>.
- Irawan, Prasetya, (2007), *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, DIA FISIP UI, Jakarta.
- Kalu, K. N.(2008). Collaboration as negotiation: Structuring Organizational, (*Online*),(<http://onlinelibrary.Wiley.com/doi/10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x/pdf>). Diakses 11 Oktober 2013
- Keraf, S. A.,( 2002), *Etika Lingkungan*, Pn. Buku Kompas, Jakarta
- Kumurur, V.A. (2002). Aspek strategis pengelolaan Danau Tondano secara terpadu. *Ekoton* 2 (1) : 73-80.
- Maman, Kh, U, (2002). *Menggabungkan Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, IPB, Bogor
- Marita Ika Joesidawati, Purwanto, dan Asriyanto (2005) artikel dengan judul: "Alternatif pengelolaan Perikanan Lemuru di Selat Bali (The Alternative Management for The Bali Strait Sardine (Lemuru) Fishery)"
- Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. (2007) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mubyarto; Loekman Sutrisno;Michael Dove, (1984). *Nelayan dan Kemiskinan*, Jakarta:Rajawali Press.
- Mustamin, Andi. (2003). *Analisis Dampak Ko-Manajemen Terhadap Tingkat Kesejahteraan Nelayan di Kecamatan Pulau-pulau Sembilan Kabupaten Sinjai –Sulawesi Selatan*. Tesis Program Pasca Sarjana IPB PS SPL. Bogor.
- Muhammad Syafril, (2006), *Kelayakan Finansial Pembangunan Cold Storage Di Desa Senaken Kabupaten Paser*, *Jurnal: Fisheries Socio Economic Departement, Faculty of Fisheries and Marine Science, Mulawarman University* E.mail : [syafril\\_riona@yahoo.com](mailto:syafril_riona@yahoo.com) <http://agribisnisfpunjurnal.files.wordpress.com/2012/03/jurnal-vol-6-no1-syafril.pdf>.
- Mubyarto., (1994), *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Moleong, Lexy J. (1993). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Roksadakarya.
- Moleong, (2005). *Metodologi Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nasution, S. (1996). *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung : Tarsito
- Nazir, Moh. (1999). *Metode Penelitian*. Cetakan Keempat. Penerbit Ghalia Indonesia.

- Nazir, Moch. (2003), *Metode Penelitian*, Jakarta: Salemba Empat.
- Nikijuluw, Victor .P.H. (2002). *Rezim Pengelolaan Sumberdaya Perikanan*. Pusat Pemberdayaan dan Pembangunan Regional (P3R) Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Nikijuluw, V. (1999), Establishment of Local Fishery Co-Management: Lessons Gained From Bali Island, Paper presented for the ICLARM-IFM International Workshop on Fisheries Co-management, Penang, Malaysia, 23-28 August 1999.
- Ion G.Cowx O.Almeida C.Bene.R.Brummett S.Bush W.Darwall, J Pittack and M.Can Brakel, (2005). Jurnal Session 2 Revier Fisheries.(<http://ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/as525e/ad525e01.pdf>) di unduh 12 Mei 2014
- Pomeroy, R.S. and R.Rivera-Guieb. (2006). *Fishery Co-Management : A Practical Handbook*. CAB International and International Development Research Center (IDRC). Oxford, UK
- Salim. Mohc. (2010) tesis dengan judul: “Dinamika Kebijakan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang Pada Masa Reformasi dan Otonomi Daerah Tahun 1998 – 2008” (Magister Ilmu Sejarah Program Sarjana Universitas Diponegoro)
- Samiaji Sarosa,(2012). *Penelitian Kualitatif dasar – dasar*. Jakarta: PT.Indeks.
- Sinurat, Sahala P. (2008). Langkah Tepat Melakukan Rekrutmen dan Seleksi. Jakarta: Erlangga.
- Steven.D. (2005). Jurnal Arriviev of shambo fisheries managemenstrategi ([http://C2\\_socio\\_Institutionsl.psf](http://C2_socio_Institutionsl.psf)). Diunduh 12 mei 2014
- Sunyoto, Danang.(2012). Manajemen Sumber Daya Manusia.Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
- Syafril (2002) Tesis dengan judul: “Analisis Faktor-faktor yang berpengaruh Terhadap Kualitas Pelayanan Pada Kantor Pelayanan Pajak di Kabupaten Kudus (Studi Tentang pengaruh Kemampuan Kerja, Iklim Organisasi dan Gaya Kepemimpinan)”. (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang)
- Sugiyono, (2009). *Memahami penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, Alexander. (2008). Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan RPD. Bandung: CV.Alfabeta.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono.(2004). *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, (2000). *Metode Penelitian Administrasi*.Bandung: Alfabeta.

- Sukandarrumidi. (2002). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Suud, Mohammad. (2006). *Tiga Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Suwignyo P. (2003). Ekosistem Perairan Pedalaman, Tipologi dan Permasalahannya. Manajemen Bioregional Jabodetabek : Profil dan Strategi Pengelolaan Situ, Rawa dan Danau. Pusat Penelitian Biologi-LIPI, Bogor.
- Stanis. Steefanus (2005), Tesis dengan judul: “Pengelolaan sumberdaya Pesisir dan Laut Melalui Pemberdayaan Kearifan Lokal di Kabupaten Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur”. (Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang).
- Suwignyo S, Widigdo B., Wardiatno Y, Kristanti M, (2005), *Avertebrata Air*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Sipahelut. Michel (2010) tesis dengan judul: “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara” (Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor).
- Thomson, M. A. Perry, L. J. Miller, K. T. 2007. Conceptualizing and Measuring Collaboration. (On-line), (<http://onlinelibrary.wiley.com/10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x/pdf>). Diakses 10 Oktober 2013
- UU Republik Indonesia No. 45 Tahun 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN
- Wahyono A, (2000), *Hak Ulayat Laut di Kawasan Timur Indonesia*. Yogyakarta. Media Pressindo. 60p.
- Wahyono, A., (2001), *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Yogyakarta: Media Pressindo.
- Westra, Pariata. (1980). *Manajemen Personalialia*. Yogyakarta: Liberti
- Widodo J dan Suadi, (2006), *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Wiyanto (pada Workshop Pemberdayaan Masyarakat Pasca Proyek, (2004)
- Widodo, Joko. (2005). *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Wijaya. N.I (2011) tesis dengan judul: “Pengelolaan Zona Pemanfaatan ekosistem Mangrove Melalui Optimasi Pemanfaatan Sumberdaya Kepiting Bakau (*Scylla Serrata*) di Taman Nasional Kutai Provinsi Kalimantan Timur” (Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor).

Widjanarko, B. S., dkk. (2006). *Aspek Pertanahan Dalam Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian (Sawah)*. Jakarta. Pusat Penelitian dan Pengembangan BPN. <http://balittanah.litbang.deptan.go.id> diakses 16 Maret 2011.



## PEDOMAN WAWANCARA

### A. Pelaksanaan Ko Manajemen di Desa Teluk Aur

1. Kegiatan apa saja yang dilaksanakan dalam ko manajemen di Desa Teluk Aur
2. Apakah yang menjadi tujuan dari pengelolaan perairan umum daratan
3. Bagaimana hubungan kerjasama dan koordinasi antara Dinas Perikanan dengan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan perairan umum daratan.
4. Bagaimana kondisi potensi perikanan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi yang ada.
5. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat sebelum adanya ko manajemen
6. Apakah ko Manajemen perairan umum daratan telah mampu meningkatkan produktifitas sumberdaya ikan di Desa Teluk Aur
7. Bagaimana peranan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan perairan umum daratan.
8. Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pengelolaan perairan umum daratan di Desa Teluk Aur.
9. Apakah hukum tradisional atau lokal mampu menjamin kelangsungan pemanfaatan potensi yang ada
10. Jenis dan bantuan apa saja yang telah diberikan dari Dinas Perikanan kepada masyarakat Desa Teluk Aur.

## **B. Faktor yang mempengaruhi Kesejahteraan di Desa Teluk Aur**

1. Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Teluk Aur sebelum adanya ko manajemen.
2. Apakah dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dalam pengelolaan perairan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan
3. Bagaimana tingkat kesadran masyarakat dalam menjaga kelestarian perairan
4. Apakah di Desa Teluk Aur telah terjadi peningkatan pendidikan.



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

(Indept Interview)

Nomor : 01  
Tanggal Wawancara : Rabu, 11 September 2013  
Jam : 09.00-10.30 WIBA  
Nama Informan : Ir. Rismawati  
Jabatan : Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

---

Peneliti : Bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat di Desa Teluk Aur sebelum adanya ko manajemen pengelolaan perairan umum daratan?

Sekretaris : Sebelum adanya ko manajemen ini pertumbuhan pendapatan Desa Teluk Aur itu tidak seperti saat ini hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menjaga dan melestarikan perairan umum daratannya dalam hal ini sungai maupun danau yang memang merupakan lahan mata pencaharian masyarakat di Desa Teluk Aur.

Peneliti : Bagaimana kondisi potensi perikanan di Desa Teluk Aur pada saat ini bila dihubungkan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi yang ada?

Sekretaris : Desa Teluk Aur merupakan Desa yang memang letaknya di pesisir sungai Kapuas secara tidak langsung desa itu memiliki potensi perikanan karena memiliki anak sungai maupun beberapa danau yang merupakan perkembangbiakkan spesies ikan konsumsi maupun ikan hias, adapun upaya pemerintah untuk memanfaatkan potensi yang ada salah satunya dengan melakukan pembinaan yang merupakan program dari Dinas Perikanan kedepannya untuk meningkatkan produksi perikanan khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu ini.

Peneliti : Apakah yang menjadi tujuan dari pengelolaan perairan umum daratan di Desa Teluk aur?

Sekretaris : Khusus Dinas Perikanan tujuan dari pengelolaan perairan umum daratan yang terdapat di Desa Teluk Aur seperti yang saya katakan tadi bahwa adalah untuk meningkatkan produksi perikanan kedepannya yang merupakan salah satu

dari program kita untuk mengembangkan sektor perikanan yang tentunya masing-masing bidang sudah memiliki program yang terencana, adapun prosesnya bermula dari penurunnya persediaan ikan sampai akhirnya seperti yang saya katakan tadi.

**Peneliti** : Bagaimana proses penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah dalam pengelolaan perairan umum daratan di Desa Teluk aur ini?

**Sekretaris** : Proses penyampaian aspirasi masyarakat biasanya melalui kunjungan kerja Pemerintah Daerah, ada juga penyampaian aspirasinya lewat pegawai kita yang melakukan pembinaan di sana ada juga lewat proposal yang disampaikan ke Dinas perikanan ini.

**Peneliti** : Kegiatan apa saja yang dilaksanakan dalam ko manajemen

**Sekretaris** : Kalau kegiatan yang dilaksanakan biasanya lebih menitikberatkan kepada pembinaan, pembinaan sendiri macam-macam tergantung masing-masing bidang contohnya bidang pengelolaan perairan pembinaan yang dilakukan salahsatunya pembinaan tentang penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.

**Peneliti** : Bagaimana hubungan kerjasama dan koordinasi antara Dinas Perikanan dengan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan perairan umum daratan?

**Sekretaris** : Hubungan kerjasama maupun koordinasi sudah terjalin dengan baik salahsatunya kerjasama dalam beberapa hal contohnya dalam pengelolaan danau lindung, cara membudidaya ikan cara mengolah hasil perikanan dan masih banyak lagi kerjasama yang kita lakukan disana.

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

(Indept Interview)

Nomor : 02  
Tanggal Wawancara : Jum,at,13 September 2013  
Jam : 10.00-11.30 WIBA  
Nama Informan : Triwati,SP,M.Si  
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Perairan Dinas Perikanan Kab.Kapuas Hulu.

---

Peneliti : Apakah yang menjadi tujuan dari pengelolaan perairan umum daratan di Desa Teluk Aur?

Kabid : Yang menjadi tujuan dari pengelolan perairan umum daratan di Desa Teluk aur adalah dalam rangka meningkatkan persediaan ikan terutama ikan konsumsi lokal dan spesies ikan yang hampir punah salahsatunya ikan arwana dan beberapa species ikan lokal lainnya.

Peneliti : Jenis dan bentuk bantuan apa saja yang diberikan kepada masyarakat dari Dinas Perikanan ini bu?

Kabid : jenis dan bantuan yang sudah terealisasi berupa bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan seperti pukat dengan ukuran mata jaring  $\frac{3}{4}$  inc, cool box, pos pengawasan, shelter, pos jaga, Restocking ikan arwana dan ikan konsumsi, alat bantu pengolahan ikan, bibit ikan konsumsi dan bantuan untuk budidaya ikan.

Peneliti : Kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dalam ko manajemen pengelolaan perairan umum daratan di Desa Teluk Aur?

Kabid : Kegiatan yang sudah dilaksanakan khusus pada bidang saya yang secara langsung adalah kegiatan Restocking ikan arwana yang bertujuan untuk melestarikan species ikan yang hampir punah serta melakukan pembinaan lainnya dalam hal pengelolaan perairan yang baik.

Peneliti : Siapakah yang terlibat dalam pengawasan pengelolaan perairan umum daratan di Desa Teluk Aur?

Kabid

: Yang terlibat pengawasan pengelolaan perairan umum daratan pastinya masyarakat Desa Teluk aur selain itu di desa teluk aur telah dibentuk masyarakat pengawas yang diresmikan oleh pemerintah daerah yaitu Rukun Nelayan dan Pokmaswas masing masing dari kedua unsur organisasi ini mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat di desa tersebut.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA  
(FGD)

Nomor : 03  
Tanggal Wawancara : Jum,at,13 September 2013  
Jam : 14.00-15.15 WIBA  
Nama Informan : H.Djufriansyah dan Sartono,S.Pi  
Jabatan : Kepala Seksi Pengelolaan SDI dan Kepala Seksi Pengawasan dan Konservasi SDI

---

Peneliti :Kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dalam ko manajemen pengelolaan perairan umum daratan di Desa Teluk Aur?

H. Djufriansyah :Kegiatan yang sering kami lakukan untuk saat ini di perairan umum daratan lebih kepada membina perairan khususnya danau lindung

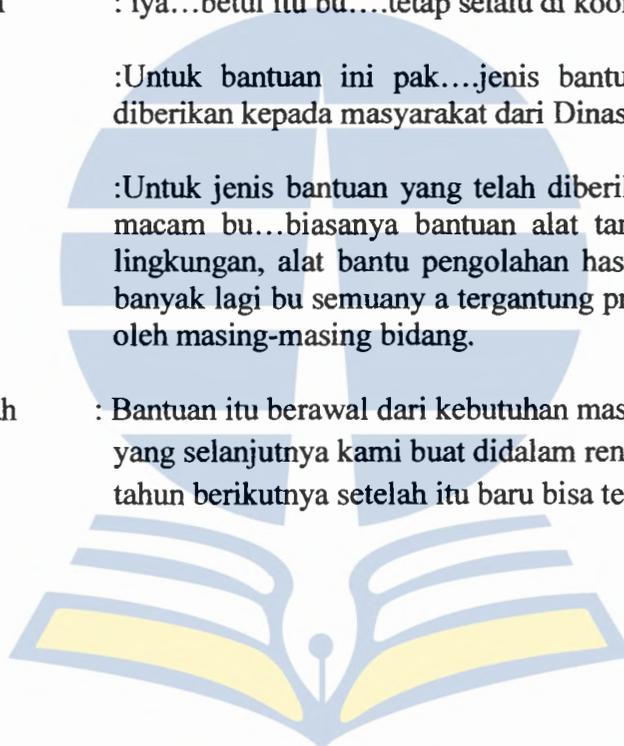
Sartono, S.Pi :iya bu...selain danau lindung sudah pasti sungai juga karena yang namanya perairan umum daratan itu meliputi sungai dan danau

H. Djufriansyah :Danau lindung ini terbentuk dari kesadaran masyarakat bu...jadi kami sangat senang untuk membina Desa Teluk Aur karena pada intinya masyarakat disana sudah sedikit demi sedikit sadar untuk menjaga kelestarian perairannya mereka bikin peraturan sendiri dalam bentuk peraturan adat yang kami rasa sudah sangat membantu dalam sistem pengawasan.

Sartono, S. Pi :Dalam mengelola danau lindung maupun sungai ataupun danau yang bukan danau lindung itu tetap ada dalam peraturan adat yang dibuat disana kami dari dinas sifatnya hanya membina aja bu....macam-macam pembinaan itu tergantung kepada program masing-masing bidang yang ada di sini

Peneliti : Bagaimana dengan hubungan kerjasama dan koordinasi antara Dinas Perikanan dengan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan perairan umum daratan.

- H. Djufriansyah :Untuk hubungan kerjasama sih sudah terjalin dengan baik bukan hanya dengan kepala desa tapi dengan seluruh masyarakat disana, selama ini apabila ada masalah yang berkenaan dengan pengelolaan perairan umum daratan tetap dikoordinasikan dulu dengan kami selaku instansi pemerintah misalnya apabila ada kegiatan panen yang hasilnya untuk kebutuhan desa tetap dikoordinasikan dulu
- Sartono, S. Pi :Selain itu kami juga selalu mendata persediaan ikan yang sudah di panen ataupun hasil tangkapan nelayan kami buat dalam data pokok perikanan tangkap yang mana gunanya untuk mengetahui hasil tangkapan nelayan.
- H. Djufriansyah : iya...betul itu bu....tetap selalu di koordinasikan dulu.
- Peneliti :Untuk bantuan ini pak...jenis bantuan apa saja yang diberikan kepada masyarakat dari Dinas Perikanan?
- Sartono, S. Pi :Untuk jenis bantuan yang telah diberikan itu bermacam-macam bu...biasanya bantuan alat tangkap yang ramah lingkungan, alat bantu pengolahan hasil perikanan masih banyak lagi bu semuanya tergantung program yang dibuat oleh masing-masing bidang.
- H. Djufriansyah : Bantuan itu berawal dari kebutuhan masyarakat sendiri yang selanjutnya kami buat didalam rencana kerja untuk tahun berikutnya setelah itu baru bisa terealisasi



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA  
(FGD)

Nomor : 04  
Tanggal Wawancara : Senin, 16 September 2013  
Jam : 19.00-21.00 WIBA  
Nama Informan : Suratno,H.Ibrahim,Yusuf Alyuda,H.Marzuki dan Panglima Burung  
Jabatan : Kepala Desa Teluk Aur, Ketua Danau Lindung Pengelang, Ketua Danau Lindung Aur dan Dua orang tokoh masyarakat

---

Peneliti : Bagaimana peranan masyarakat dalam menentukan jenis dan bentuk pengelolaan perairan umum daratan di Desa Teluk Aur?

Ketua Danau Lindung Pengelang : Sejauh ini peranan masyarakat bu....sangat mendukung program pengelolaan yang kami buat hal ini dibuktikan dengan masyarakat mau bersama-sama mengawasi danau lindung.

Kepala Desa : iya betul bu....masyarakat disini sangat mendukung biasanya jika ada masalah di Danau lindung pasti masyarakat yang melapor bahwa ada yang melanggar batas danau lindung karena jika di danau lindung pengelang itu ada zona lindung dan zona yang bisa diambil.

Ketua Danau Lindung Aur : iya bu....jika di Danau lindung aur itu ditutup semua karena sudah menjadi kesepakatan masyarakat disini,danau lindung aur hanya bisa diambil apabila ada warga yang meninggal selain tu bisa dipanen apa bila ada keperluan Desa hanya saja tidak pernah di tulis dibuku..

Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pengelolaan perairan umum daratan di Desa teluk aur?

Tokoh Masyarakat I : yang terlibat dalam pengawasan seluruh masyarakat bu...macam kami dituk yang tinggal di dalam kawasan danau lindung pengelang semua kami yang dirumah betang.

Tokoh Masyarakat 2 : Iya bu..seluruh masyarakat disini termasuk meh sungai maupun danau kalau di sungai jika ada yang melakukan aktifitas penyentruman ataupun penubaan cepat meh masyarakat melapor

Kepala Desa : Selain itu ada juga rukun nelayan dan pokmaswas yang mengawasi..

Peneliti :Apakah di Desa teluk aur telah terjadi peningkatan di bidang pendidikan?

Tokoh masyarakat 2 : adalah bu.... dulu kami dituk paling tamat SD sekarang sih adalah yang sampai kuliah tapi belum selesai..

Kepala Desa :betul bu...sekarang kami sudah ada gedung SMP Cuma jika mau melanjutkan ke jejang yang lebih tinggi kami mesti keluar dari kampung, saat ini anak-anak kami disi sudah ada yang melanjutkan ke bangku kuliah...Cuma memang belum selesai semua.

Peneliti :Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat disini dalam ikut menjaga kelestarian sumberdaya ikan?

Ketua Danau lindung Pengelang :Masyarakat disini sudah memahami benar bagaimana caranya melestarikan ikan ya...seperti yang saya bilang semua sudah terangkum di peraturan adat ada masalah dalam pelanggaran semua ada sanksi.

Kepala Desa : Betul bu...masing-masing peraturan sudah ada terangkum diperaturan adat tersebut.

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

(Indept Interview)

Nomor : 05  
Tanggal Wawancara : Rabu, 18 September 2013  
Jam : 19.00- 20.00 WIBA  
Nama Informan : Suratno  
Jabatan :Kepala Desa Teluk Aur

---

Peneliti : Bagaimana tingkat kesejahteraan sebelum adanya ko manajemen

Kepala Desa :Tingkat kesejahteraan masyarakat disini sebelum adanya ko manajemen belum begitu baik seperti sekarang ini, disebabkan belum adanya pengetahuan masyarakat tentang pengelolaan perairan umum daratan yang baik, setelah adanya pembinaan dari Dinas Perikanan perlahan sistem pengelolaan sudah mulai membaik tetapi hal ini terbantuan juga dengan adanya kesadaran masyarakat bu...

Peneliti :Bagaimana kondisi potensi perikanan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi yang ada?

Kepala Desa :Potensi perikanan di Desa Teluk Aur ini dari dulu sampai sekarang memang ada potensi karena Desa ini dikelilingi oleh sungai maupun danau, apalagi setelah adanya danau lindung kebutuhan desa dapat terpenuhi dari danau lindung tersebut..misalnya saya contohkan kebutuhan desa untuk membangun sarana dan prasarana semua terbantuan dari hasil danau lindung...selain itu sungai juga dimanfaatkan masyarakat dengan sistem arisan berapa persen dari hasil penen tersebut kembali ke kas Desa tapi untuk disungai bisa setahun sekali hal ini tidak lepas dari sistem pengelolaan yang baik dan ada campur tangan pemerintah juga.

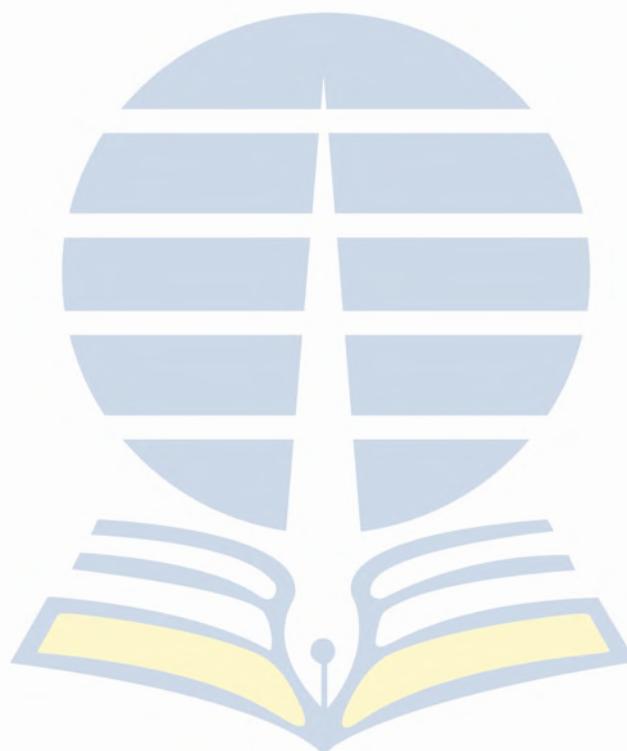
Peneliti :Apakah yang menjadi tujuan pengelolaan perairan umum daratan di Desa Teluk Aur ini pak ?

Kepala Desa :dari awal tujuan dari pengelolaan perairan ini adalah untuk dapat meningkatkan produksi ikan –ikan lokal maupun ikan hias imbas dari pelestarian ikan tersebut pasti masyarakat, awal mula adanya pelestarian ini berawal dari penurunan

persediaan ikan yang ada di perairan kami melalui pembicaraan lalu dibikin rapat jadilah danau tersebut danau lindung dengan tujuan pelestarian ikan...karena ikan-ikan yang ada di zona lindung kalau terlalu padat pasti keluar, jadi ikan yang keluar dari zona tersebut yang di ambil olah masyarakat.

- Peneliti :Bagaimana hubungan kerjasama dan koordinasi antara Dinas Perikanan dengan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan perairan umum daratan
- Kepala Desa :Hubungan kerjasama kami sudah terjalin dengan baik bu...kami disini tentunya..apabila ada masalah pasti kami koordinasi dengan Dinas baik melalui telepon ataupun kami yang turun langsung ke Dinas Perikanan.
- Peneliti :Apakah ko manajemen pengelolaan perairan umum daratan telah mampu meningkatkan produktifitas sumberdaya ikan di Desa Teluk Aur pak...
- Kepala Desa :Jelas bu...pengelolaan perairan kami tidak akan baik tanpa binaan dari pemerintah...pada intinya saling kerjasamalah dalam mengelola perairan.
- Peneliti :Apakah dengan meningkatnya pendapatan masyarakat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di sini?
- Kepala Desa :Sejauh ini sih sudah banyak peningkatan kesejahteraan seperti anak-anak kami yang dulunya banyak yang tamat SD sekarang minimal tamat SMP atau SMA malah sekarang ada yang sampai kuliah...kehidupan masyarakat juga ada peningkatan bisa terpenuhilah kebutuhan sandang, pangan dan papan sarana yang dibutuhkan jugasecara perlahan sudah mulai tersedia walaupun tidak begitu bagus tapi ada dan bisa dipakai.
- Peneliti :Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian perairan?
- Kepala Desa :Tingkat kesadaran masyarakat disini sudah cukup bagus bu dengan melaporkan jika ada temuan yang melanggar aturan dalam pengelolaan perairan pada intinya sama-sama menjaga perairan umum daratan yang ada di Desa ini.
- Peneliti :Apakah hukum lokal mampu menjamin kelangsungan pemanfaatan perairan yang ada di Desa ini pak ?

Kepala Desa : iya bu...hukum disini masyarakat sendiri yang membuatnya dalam peraturan adat disitu tertulis hukum yang jelas tentang pelanggaran tergantung kepada tingkat kesalah yang dibuat..dengan adanya peraturan adat ini sangat membantu dalam proses pelestarian perairan umum daratan di Desa ini.



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

(Indept Interview)

Nomor : 05  
Tanggal Wawancara : Jumat, 20 September 2013  
Jam : 10.20.00-12.00 WIBA  
Nama Informan : Abang Samson  
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Kantor Kecamatan Bunut Hilir

---

Peneliti : Bagaimana tingkat kesejahteraan sebelum adanya ko manajemen ini pak?

Kasi Pemerintahan : Begini bu...tingkat kesejahteraan Desa Teluk Aur sekarang ini sudah dibilang cukup sejahtera jika dibandingkan dulu sebelum adanya campur tangan pemerintah, sebagian masyarakat disana berprofesi sebagai nelayan kehidupan hari-harinya mencari ikan bagaimana mau hidup sejahtera jika pesediaan ikan semakin berkurang setelah ada kerja sama dengan pemerintah inilah dalam hal pembinaan khususnya dari Dinas perikanan kita bicara masalah pengelolaan perairan akhirnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola perairan umum daratannya bisa seperti ini.

Peneliti : Bagaimana kondisi potensi perikanan dengan upaya pemerintah dalam memanfaatkan potensi yang ada di Desa Teluk aur ?

Kasi Pemerintahan : Kalau potensi perikanan sih ..saya rasa Desa itu memiliki potensi yang cukup bagus karena adanya danau yang dikelola oleh masyarakat yang mana fungsi dari danau tersebut adalah sebagai lumbung ikan bagi Desa Teluk Aur.

Peneliti : Apakah dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dalam pengelolaan perairan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Teluk Aur

Kasi Pemerintahan : berpengaruhlah bu....bisa dilihat secara langsung kehidupan masyarakat disana...

Peneliti : Apakah hukum tradisional atau lokal telah mampu menjamin kelangsungan pemanfaatan perairan umum daratan di Desa Teluk Aur pak?

**Kasi Pemerintahan** :Karena saya asli penduduk Bunut Hilir secara langsung saya mengetahui bahwa memang hukum adat yang ada di Desa tersebut sangat kuat terutama hukum adat dalam pengelolaan perairannya..



**PENGURUS DANAU LINDUNG PENGELANG  
DESA TELUK AUR KECAMATAN BUNUT HILIR  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

---

Berdasarkan diselenggarakannya rapat (musyawarah) seluruh masyarakat Desa Teluk Aur yang dihadiri oleh pemuka masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, pemuda, ketua BPD, dan Kepala Desa pada tanggal 02 November 2007, telah memutuskan tentang Peraturan Danau Lindung Pengelang dan Rukun Nelayan Desa Teluk Aur yang tertulis dibawah ini.

**Pasal 1**

Batas danau lindung pengelang desa teluk aur

1. Batas Sebelah Utara : Kebun karet masyarakat
2. Batas Sebelah Selatan : Kebun karet masyarakat
3. Batas Sebelah Timur : Bekas Gereja Lama
4. Batas Sebelah Barat : Sungai Labi

**Pasal II**

Peraturan Semi Danau Lindung Pengelang Desa Teluk Aur

1. Dilarang memasang semua alat penangkap ikan didalam batas semi Danau Lindung Pengelang.
2. Dilarang menangkap/menangkap induk ikan dan anak ikan arwana dari ukuran lebar 4 cm sampai keatas didalam wilayah Danau Lindung Pengelang dan sekitarnya.

**Pasal III**

Sangsi Hukum di wilayah danau pengelang

1. Jika terjadi pelanggaran pada pasal II butir I akan dikenakan sangsi berupa uang tunai sebesar Rp. 500.000 dan peralatan disita. Bila orang tersebut tidak melunasi dalam waktu satu minggu orang tersebut akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.
2. Jika pelanggaran pada pasal II butir 2 akan dikenakan sangsi hukum berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- per ekor, dan peralatan disita, ikan tersebut ditarik kembali. Orang tersebut dilarang bekerja ikan di Danau Pengelang dan sekitarnya selama 5 tahun. Bila orang tersebut tidak melunasi dalam waktu 1 minggu, maka orang tersebut akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.
3. Barang siapa yang mendapat ikan arwana dari ukuran 4 cm keatas di daerah Danau Pengelang dan sekitarnya harus dilepaskan. Jika ikan tersebut tidak dilepaskan akan dikenakan sangsi hukum pada pasal III butir 2 diatas.

4. Dilarang menangkap ikan atau memasang penangkap ikan di waktu air pasang dari pantai danau 50 m bila melanggar akan dikenakan sanksi hukum pada pasal III butir 2.
5. Dilarang merabai atau mengail di Danau Pengelang dan Sekumpai umpan keriang, ketam, cacing mengolang, jumak dan empalak. Bila melanggar akan dikenakan sanksi hukum pada pasal III butir 2 diatas.
6. Dilarang memasang pukot ukuran 3 inci sampai keatas di Danau Pengelang bila melanggar akan dikenakan sanksi hukum pada pasal III butir I diatas.
7. Dilarang memasang pukot tangkop di Danau Pengelang dan Sekumpai, bila melanggar akan dikenakan sanksi hukum pada pasal III butir I diatas.
8. Dilarang memasang pukot bujur pantai atau ngerap rangkang di Danau Pengelang bila melanggar dikenakan sanksi hukum pada pasal III butir I diatas.
9. Dilarang memasang penyarak di Danau Pengelang dan Sekumpai, bila melanggar akan dikenakan sanksi hukum pada pasal III butir I diatas.
10. Dilarang menarik pukot atau pukot tarik di Danau Sekumpai dan Pengelang bila melanggar akan dikenakan sanksi hukum pada pasal III butir I diatas.
11. Bila mendapatkan induk ikan silok diluar batas danau lindung tanpa sengaja dalam keadaan membawa anak seperti didalam tikop dan dapat menjala sewaktu belum diadakan penyuluhan/nyilok, orang tersebut mendapatkan separuh anak yang didapatkan. Sedangkan induk ikan silok (arwana) dilepaskan kembali kecuali orang tersebut sengaja menjala atau mendapat silok dalam tikop tidak melapor, maka orang tersebut dikenakan sanksi hukum pada pasal III butir 2.
12. Bagi orang diluar Desa Teluk Aur tidak melapor masuk wilayah danau pengelang dan orang Sekumpai, orang tersebut dikenakan sanksi hukum pada pasal III butir 2.
13. Penghasilan dari danau akan dibagi sebagai berikut :
  - a. 30 % akan digunakan untuk pembiayaan upah pekerja masyarakat yang ada di danau
  - b. 70 % akan digunakan untuk pembangunan di desa dan di dusun.

Demikian peraturan ini kami buat atas kesepakatan bersama seluruh masyarakat dan disetujui oleh Kepala desa agar dapat kiranya ditaati dengan penuh rasa tanggung jawab.

Teluk Aur, 02 Nopember 2007

**Ketua Semi Danau**

**Lindung Pengelang**

Ttd

**H.IBRAHIM**

**Sekretaris**

Ttd

**SURATNA**

**Mengetahui :**

**Ketua BPD**

Ttd

**MOHTAR**

**Kepala Desa Teluk Aur**

Ttd

**H. MARJUKI**



**PANITIA DANAU LINDUNG AUR  
DESA TELUK AUR KECAMATAN BUNUT HILIR  
KABUPATEN KAPUAS HULU**

---

**PERATURAN DANAU LINDUNG AUR**

Berdasarkan hasil dari keputusan rapat seluruh lapisan masyarakat Dusun Puring, Desa Teluk Aur, telah diputuskan bahwa peraturan danau lindung aur adalah sebagai berikut:

**Pasal 1**

Batas Danau Lindung Aur Dusun Puring Desa Teluk Aur adalah seluruh wilayah atau kawasan sekitar Danau Lindung Aur ditutup.

**Pasal 2**

Peraturan Danau Lindung Aur Dusun Puring Desa Teluk Aur adalah:

- a. Dilarang semua alat penangkapan ikan di wilayah Danau Aur, antara lain seperti:
  1. Menjala
  2. Memasang Pukat
  3. Memasang Pancing
  4. Memasang Bubu
  5. Pukat Tarik
  6. Dan lain-lain.
- b. Dilarang menangkap induk ikan arwana (silok) dari ukuran lebar 4 Cm sampai keatas di wilayah Danau Lindung Aur.

**Pasal 3**

**SANKSI HUKUM**

- a. Jika terjadi pelanggaran pada pasal 2 butir a, akan dikenakan sangsi berupa uang sebesar Rp. 500.000. dan peralatan disita dan jika dalam waktu 7 hari tidak melunasi denda orang tersebut diserahkan kepada pihak berwajib.
- b. Jika terjadi pelanggaran pada pasal 2 butir b, akan dikenakan sangsi hukum berupa uang sebesar Rp.25.000.000 / per ekor dan ikan tersebut dilepaskan kembali di wilayah Danau Lindung Aur.
- c. Barang siapa mendapat ikan arwana/silok, di wilayah Danau Lindung Aur dari ukuran 4 cm keatas harap dilepas kembali. Jika tidak orang tersebut dikenakan sangsi hukum pada pasal 3 butir b diatas.

- d. Sangsi bagi pengurus Danau Lindung Aur bila diketahui melanggar peraturan diatas dikenakan sangsi dua kali lipat dari sangsi atau denda masyarakat biasa. Bagi tersangka atau yang ditangkap dalam jangka waktu 7 hari belum melunasi maka sangsi atau denda tersebut diatas dan akan diserahkan kepada pihak berwajib.
- e. Kemudian dari penghasilan danau, untuk pembagian hasil danau 30 % untuk dibagikan ke desa. Untuk kas 20 % dan untuk sarana dan prasarana 50 %.

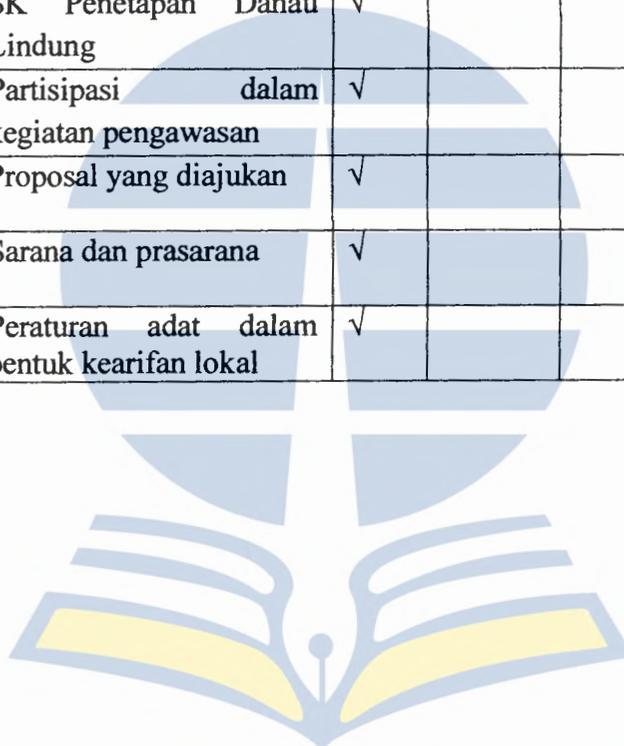
Teluk Aur, 25 Maret 2012



## PEDOMAN OBSERVASI

√Bentuk kerjasama antara Dinas Perikanan dan masyarakat Desa Teluk Aur

NO	Jenis Dokumentasi	Ada	Tidak	Keterangan Lengkap/Tidak
1	Program Pemerintah	√		
2	Peran masyarakat dalam mendukung manajemen	√		
3	SK Penetapan Danau Lindung	√		
4	Partisipasi dalam kegiatan pengawasan	√		
5	Proposal yang diajukan	√		
6	Sarana dan prasarana	√		
7	Peraturan adat dalam bentuk kearifan lokal	√		



## DOKUMENTASI

Dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa Teluk Aur, Ketua Danau Lindung  
dan Beberapa Tokoh Masyarakat



Dokumentasi wawancara dengan Kepala Desa Teluk Aur



Salah Satu Bentuk Kerjasama antara Pemerintah dan Masyarakat Desa Teluk Aur  
yaitu Restocking ikan arwana



Dokumentasi Desa Teluk Aur

